

***ISLAMIC PRUDENTIAL BANKING PADA PEMBIAYAAN DI
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH***

(Studi Multi Situs Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Surabaya,
Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik)

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh
BINTI NUR ASIYAH
NIM. F53317006

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Binti Nur Asiyah
NIM : F53317006
Program : Doktor
Institusi : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya (UINSA)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Desember 2019
Saya yang menyatakan,



Binti Nur Asiyah

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi Binti Nur Asiyah ini telah disetujui
Pada tanggal 2019

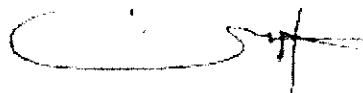
Oleh

PROMOTOR

A handwritten signature in black ink, featuring a series of vertical strokes in the center and curved lines extending to the left and right.

Prof. Dr. H. M. RIDLWAN NASIR, MA.

PROMOTOR

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a series of vertical strokes on the right.

Dr. MUHAMAD AHSAN, MM.

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN VERIFIKASI

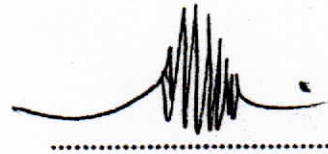
Disertasi Binti Nur Asiyah ini telah diuji pada ujian verifikasi
Tanggal 6 Agustus 2018

Oleh

Tim Penguji

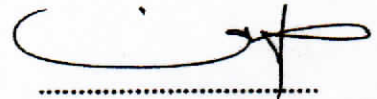
- 1 Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.

Promotor & Ketua Penguji



- 2 Dr. Muhamad Ahsan, MM.

Promotor & Sekretaris



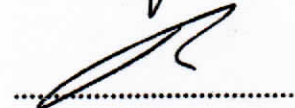
- 3 Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc. MA,

Penguji



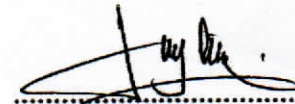
- 4 Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., SS., M.E.I.

Penguji



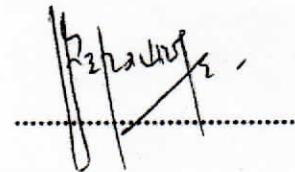
- 5 Dr. Mugiyati, M.E.I.

Penguji



- 6 Dr. Hj. Fatmah, M.M.

Penguji



Surabaya, 06 Agustus 2019
Direktur,


Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP

Disertasi Binti Nur Asiyah ini telah diuji pada ujian tertutup
Tanggal 03 Oktober 2019

Oleh

Tim Penguji

1 Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

Ketua Sidang

2 Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag

Sekretaris Sidang

3 Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.

Penguji

4 Dr. Muhamad Ahsan, M.M.

Penguji

5 Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM.

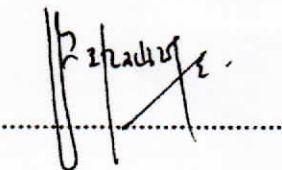
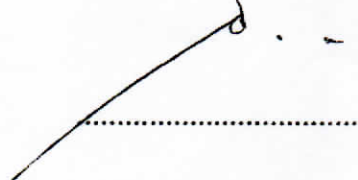
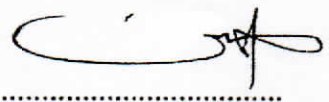
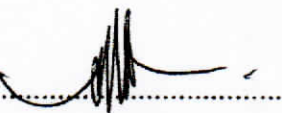
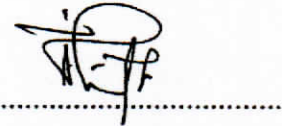
Penguji Utama

6 Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., SS., M.E.I.

Penguji

7 Dr. Hj. Fatmah, M.M.

Penguji



Surabaya, 03 Oktober 2019

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA

Disertasi Binti Nur Asiyah ini telah diuji pada ujian terbuka

Oleh

Tim Penguji

1 Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

Ketua Sidang

2 Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag

Sekretaris Sidang

3 Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.

Penguji

4 Dr. Muhamad Ahsan, M.M.

Penguji

5 Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM.

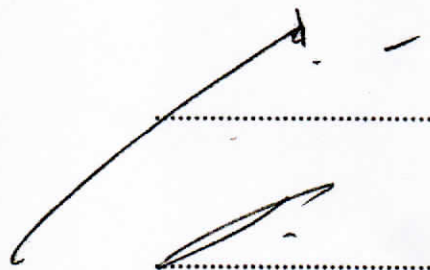
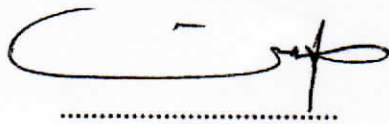
Penguji Utama

6 Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., SS., M.E.I.

Penguji

7 Dr. Hj. Fatmah, M.M.

Penguji



Surabaya, 13 Januari 2020

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-84311972 Fax. 031-8413300
E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Binti Nur Asiyah
NIM : F53317006
Fakultas/Jurusan : Program Doktor Pascasarjana – Ekonomi Syariah
E-mail address : binti.advan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☒ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ISLAMIC PRUDENTIAL BANKING PADA PEMBIAYAAN DI BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

(Studi Multi Situs Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Maret 2020

Penulis

Binti Nur Asiyah

ABSTRACT

The background of this research is the management of Non Performing Financing (NPF) at BPRS over the Financial Services Authority's benchmark which affects the Allowance for Earning Assets Losses (PPAP). NPF occurred due to careless implementation of Islamic finance and improvement is needed for this issue. Based on this problem then focuses of this research are; 1. What is the Non Performing Financing (NPF) management strategy to minimize PPAP provision? 2. How is Islamic prudential banking to minimize NPF and PPAP?

This research's approach is study case on multiple sites. Informants are commissioners, directors, Sharia Supervisory Board (DPS), account officers and financial services authorities. The data are analyzed by making examining, categorizing, tabulating, testing, combining primary and secondary data evidence so all of these efforts produce research results.

Results of research are; 1. NPF management strategy to minimize PPAP includes a preventive and corrective strategy. 2. The Islamic prudential banking in financing in the form of an internal policy of sharia perspective, sharia compliance rules of BPRS, sharia compliance units are able to minimizing NPF and PPAP is needed to be owned and implemented as an operational reference for BPRS financing and to carry out the mandate.

There are two propositions offered in this research; the first, Minor propositions: 1. "If the NPF management strategy is carried out, then PPAP can be minimized". 2. "If Islamic prudential banking is run on financing, then the condition of Islamic banks is getting better, NPF and PPAP can be minimized" and the second, Major propositions are "if Islamic prudential banking in BPRS financing must be owned and applied operationally by BPRS, then it useful to minimize NPF and PPAP"

The theoretical implications of this research is propotion of Islamic prudential banking principles in financing. The practical implications is the need for BPRS to explore every problem analysis in Islamic prudential banking to minimizing NPF and PPAP, it is necessary to apply financing policies and standard operating procedures (SOP) of financing in sharia perspective at BPRS.

Keywords: Islamic prudential banking , financing, Sharia Rural Bank

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PROMOTOR.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN VERIFIKASI.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP	v
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ixx
ABSTRACT.....	x
مَلَاخَصَ	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR BAGAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Batasan Masalah dan Fokus Penelitian	14
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Kegunaan Penelitian.....	17
F. Kerangka Teoritik	18
G. Penelitian Terdahulu	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PPAP BPRS Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik (dalam ribuan rupiah - Desember 2017).....	4
Tabel 1.2 Rekap Rasio Keuangan BPRS	11
Tabel 2.1 Penggolongan Kualitas Aktiva pada Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> dan <i>Musharākah</i>	101
Tabel 2.2 Penggolongan Kualitas Aktiva pada Pembiayaan <i>murabahāh</i> , <i>Salam</i> , <i>istiṣnāʾ</i> ʹ, <i>qarḍ</i> , <i>Ijarah</i> , <i>Ijarah Mutahiya Bittamlik</i> dan Multijasa (Di luar Kredit Kepemilikan Rumah)	103
Tabel 2.3 Penggolongan Kualitas Aktiva pada Pembiayaan <i>murabahāh</i> , <i>Salam</i> , <i>istiṣnāʾ</i> ʹ, <i>qarḍ</i> , <i>Ijarah</i> , <i>Ijarah Mutahiya Bittamlik</i> dan Multijasa (Kredit Kepemilikan Rumah).....	105
Tabel 3.1 Karakteristik Informan Penelitian pada BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya	119
Tabel 3.2 Karakteristik Informan Penelitian pada BPRS Jabal Nur Surabaya ..	121
Tabel 3.3 Karakteristik Informan Penelitian BPRS Bakti Makmur Indah Sido ..	123
Tabel 3.4 Karakteristik Informan BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik	127
Tabel 3.5 Karakteristik Informan pada BPRS Mitra Mandiri Sukses Gresik	129
Tabel 3.6 Karakteristik Informan Penelitian pada BPRS Amanah Sejahtera	131
Tabel 3.7 Aktiva Produktif pada BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya	132
Tabel 3.8 Aktiva Produktif pada BPRS Jabal Nur.....	134
Tabel 3.9 Aktiva Produktif pada BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo	135
Tabel 3.10 Aktiva Produktif pada BPRS Unawi Barokah Kabupaten Sidoarjo ..	138
Tabel 3.11 Aktiva Produktif pada BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik.....	139
Tabel 3.12 Aktiva Produktif BPRS Amanah Sejahtera Gresik.....	140
Tabel 3.13 Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di 3 Kabupaten/Kota.....	141
Tabel 3.14 Pembentukan dan Pemenuhan PPAP pada Pembiayaan Bermasalah di BPRS 3 Kabupaten / Kota.....	146
Tabel 4.1 Rata- Rata Aktiva Produktif Pada BPRS Bulan Maret 2017 - Juni 2018.....	228

Angka Konseptual Penelitian.....

Angka Kepatuhan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.....

Angka Kepatuhan Bank Pembiayaan Rakyat.....

Angka sertifikasi, solusi dan penanggungjawab strategi pengendalian meminimalisir PPAP.....

Angka General Credit Process.....

Angka Formulasi Temuan Strategi Pengelolaan NPF dan meminimalisir PPAP.....

Angka masalah *Islamic prudential banking* pada pembiayaan Syariah.....

Angka Pembiayaan Perspektif Syariah.....

Angka formulasi temuan Bangunan *Islamic Prudential Banking* pada pembiayaan dalam Meminimalisir NPF dan PPAP di Indonesia.....

Angka Konseptual Penelitian.....

Angka Kepatuhan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.....

Angka Kepatuhan Bank Pembiayaan Rakyat.....

Identifikasi, solusi dan penanggungjawab strategi pengendalian meminimalisir PPAP.....

General Credit Process.....

Formulasi Temuan Strategi Pengelolaan NPF dan meminimalisir PPAP.....

Penyebab masalah *Islamic prudential banking* pada pembiayaan Syariah.....

Pembinaan dan Pembiayaan Perspektif Syariah.....

Formulasi temuan Bangunan *Islamic Prudential Banking* pada Pembiayaan Syariah.....

Pembinaan dan Pembiayaan dalam Meminimalisir NPF dan PPAP di Bank Syariah.....

PENDAHULUAN

Ajaran Islam memberikan tatanan dan norma bagi kehidupan manusia. Norma dan tatanan sosial diharapkan bisa memberi keselamatan.¹ Norma dan tatanan kehidupan manusia dalam ajaran Islam identik dengan *Rahmān* dan *Rahīm* Allah. *Rahmān* dan *Rahīm* Allah bagi umat manusia bertujuan agar manusia mendapatkan falah.² *Rahmān* dan *Rahīm* Allah SWT. diwujudkan dalam setiap pemberian Allah kepada umat manusia tanpa terkecuali, meminta atau tidak meminta. Wujud syukur atas *Rahmān* dan *Rahīm* diwujudkan dalam kepatuhan aspek ekonomi yang sejalan dengan ketentuan Allah, yang merupakan bentuk riil keberimanan.³

Manusia dihadapkan pada perintah dan larangan agar mendapat *ridha* Allah SWT. Larangan tersebut tercermin dalam praktik mu'amalah. Larangan Allah termanifestasikan ke dalam setiap langkah usaha berjalan di atas prosedur Islami. Upaya memenuhi kebutuhan tidak didasarkan kepentingan hawa nafsu/keinginan, melainkan tercukupinya kebutuhan.

³Elida Elfi Barus, "Tauhid sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 2, No. 1 (2017), 69–79.

Perekonomian tumbuh dengan baik atas peran serta bank syariah.

⁴Muhammad Tahir Jan, “Will It Survive? Challenges Faced by Islamic Banking and Finance in Today’s World,” *Journal of Islamic Finance*, Vol. 7, No. 1 (2018), 58–67.

[illegible]

Perbankan syariah menawarkan produk penyimpanan dana dan jasa lainnya. Pengelolaan simpanan dana nasabah harus dilakukan dengan prinsip amanah. Prinsip amanah mewujudkan terciptanya stabilitas bank syariah.⁶ Kondisi bank syariah yang stabil meneguhkan nasabah mempercayakan uangnya untuk dikelola bank syariah. Bank syariah mengelola dana nasabah melalui penyaluran pembiayaan, namun demikian pembiayaan yang dikelola ada yang mengalami permasalahan yaitu pembiayaan macet dan tingginya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

⁶Hafnida, Selamah Maamor, and Hussin Abdullah, "Islamic Financing Towards Economic Growth: a Study on 4 OIC Countries," *IJIB* Vol.1, No. 1 (June 2016), 50–59.
⁷ Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah

⁷ Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah

Tabel 1.1PPAP BPRS Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik (dalam ribuan rupiah - Desember 2017)

Sumber: diolah dari laporan keuangan publikasi BPRS pada <http://ojk.go.id>

Pembiayaan bermasalah muncul sebagai akibat kurang maksimal dalam pengelolaan asset produktif bank syariah. Portofolio asset produktif pada perbankan syariah terdiri dari jual beli⁸, pembiayaan bagi hasil⁹ dan jasa¹⁰. Di

⁹ Pembiayaan bagi hasil yang dimaksud adalah bank melakukan pembiayaan dimana ada kontribusi modal dan keahlian antara kedua belah pihak sehingga keuntungan akan dibagi sesuai kontribusi bisnis yang sedang dijalankan. Pembiayaan bagi hasil ini ada pembiayaan dengan prinsip *mudārabah*, dan pembiayaan dengan prinsip *musharākah*. Pembiayaan dengan prinsip *mudārabah* dilakukan dengan cara bank syariah selaku *sahib al-māl* memberikan 100 persen

Persoalan lain dalam implementasi syariah misalnya, penyediaan barang yang dijual dilakukan dengan mewakilkan pembelian kepada nasabah, namun tidak diikuti dengan akad *wakālah*, baik secara lisan maupun tulisan. Pembiayaan *muḍārabah* dan *musharākah* dilakukan dengan menetapkan keuntungan nominal pada saat akad. Pembiayaan multijasa diterapkan, namun tidak adanya keterlibatan jasa oleh BPRS, hanya memberikan sejumlah nominal uang untuk keperluan nasabah. Dinamika tersebut menjadi sejarah perjalanan pembiayaan dan sedang mengalami permasalahan. Pembiayaan mengalami permasalahan jika kehalalan dan proses terlewatkan. Upaya menekan permasalahan tersebut, pada bank konvensional menggunakan *prudential banking*, sedangkan pada bank

¹⁰ Pembiayaan jasa yang dimaksud adalah bank syariah memberikan pembiayaan berupa jasa perwakilan (*wakālah*), penjaminan (*kafālah*), pengambilalihan hutang (*hiwālah*) maupun pinjaman (*qard*) dll.

Prudential banking pada praktiknya menyangkut peraturan pengelolaan risiko bisnis sedangkan unsur halal produk, halal proses, halal marketing tidak melekat sebagai risiko produk. Risiko halal produk, halal proses, halal marketing seharusnya merupakan bagian dari penilaian proses pada kesehatan bank pada unsur manajemen. Artinya keberadaan *prudential banking* berdiri terpisah dengan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Hal itu nampak pada ketentuan *prudential banking* bank umum mencakup tentang:

Ketentuan kehati-hatian tersebut tidak memunculkan syariah sebagai instrumen kehati-hatian. Jika unsur syariah berada pada cakupan kehati-hatian, maka akan meminimiliasir pembiayaan macet. Hal ini akan memastikan bahwa bank syariah memiliki instrumen yang memastikan halal mulai dari input, proses hingga output yang diperoleh.

¹¹Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, and Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

Dewan Pengawas Syariah adalah “bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip

¹³ Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Implementasi kepatuhan terhadap prinsip syariah wajib dievaluasi oleh Dewan Pengawas Syariah berdasarkan kebijakan dan prosedur prinsip kepatuhan Syariah Bank Umum Syariah yang dimiliki oleh bank syariah berdasar produk dan atau aktivitas baru bank.¹⁶ Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Komisaris, bersamaan dengan rapat umum pemegang saham. Hal tersebut berpotensi sikap dan tindakan DPS tidak independen. Peran DPS tidak sebagai wasit bisnis syariah, melainkan berfungsi sebagai partner bisnis. Dampak dari hal ini adalah kewajiban DPS mengevaluasi prinsip syariah sebagaimana peraturan otoritas jasa keuangan syariah kurang maksimal sehingga kurang memberikan efek perubahan kinerja

¹⁵ Surat Edaran Bank Indonesia No 15/22/DPbS kepada semua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

[illegible]

Dewan pengawas syariah pada BPRS menjadi *filter* atas terlaksananya prinsip syariah. BPRS menarik untuk dikaji, karena lembaga ini merupakan lembaga menengah yang memiliki kewajiban menjaga kesehatan lembaga sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan layaknya Bank Umum Syariah. Lembaga ini memiliki keterbatasan akses untuk masyarakat jika dibandingkan dengan Bank Umum Syariah karena tidak memiliki fasilitas dan kewenangan yang sama. Hal ini berdampak pada kecukupan sumber dana yang harus dikelola BPRS sehingga BPRS mengalami fluktuasi dalam pengelolaan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).¹⁸

¹⁷ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS kepada semua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

¹⁸Moh. Sochih, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau dari Camel (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, and Liquidity*) Untuk Mengukur Keberhasilan Manajemen pada PT BPRS Margirizki, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (Studi Kasus pada PT BPRS Margi Rizki Bahagia).” *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* Vol 6, No. 2 (2008): 82–95.

¹⁹Rimi Gusliana Mais and Dita Indah Sari, "Evaluation of Banks Health Rate of Indonesia and Malaysia Islamic Bank With RGEC Method," *IJABER*, Vol 13, No. 7 (2015): 29.

BPRS menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghadapi tantangan persaingan antara lembaga perbankan syariah, perbankan konvensional dan penyediaan pembiayaan lainnya dengan cara halal. Tantangan pada tahun 2017, bank umum konvensional menggunakan tingkat suku bunga pinjaman di bawah 0,5 persen dengan menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bunga di bawah 0,5 persen disebabkan karena pemerintah membantu sebagian dari tanggungan bunga nasabah kepada perbankan sebagai bentuk inklusi keuangan. Kondisi ini berdampak pada BPRS yang memiliki pasar usaha menengah kebawah. Lahan pasar BPRS semakin kecil.

²⁰ Adi Sucipto, Pengawas BPRS Wilayah Surabaya, Otoritas Jasa Keuangan, *Wawancara*, 18 April 2018

Bulan September 2018 NPF BPRS Karya Mugi Sentosa 11,71% artinya lebih rendah dibandingkan dengan Desember 2017. Pembiayaan lancar pada bulan yang sama sebesar 89,34 persen. Berbeda dengan BPRS Bakti Makmur Sidoarjo, BPRS ini memiliki tingkat pengelolaan pembiayaan lancar sebesar 79,1 persen dan pembiayaan macet sebesar 22,38%. Hal ini senada dengan ungkapan divisi pembiayaan BPRS Makmur Indah, bahwa hal yang masih menjadi beban adalah tingginya pembiayaan macet. Hal itu lebih disebabkan oleh kondisi usaha nasabah yang mengalami tekanan. Selain itu sebagian disebabkan ada unsur karakter nasabah yang diperkirakan sekitar 10 persen dari total pembiayaan macet.²⁴

²³Didik Supardana, Direksi BPRS Karya Mugi Sentosa, *Wawancara*, 30 Oktober 2018

[illegible]

BPRS Unawi Barokah Sidoarjo pada Desember 2017 memiliki NPF sebesar 13,38% dan FDR 58%. Asset lancar pada bulan Juni 2018 sebesar 96,11 persen dan NPF sebesar 10,51 persen. Menurut direksi BPRS Unawi Barokah, permasalahan utama dalam pembiayaan adalah karena faktor tidak mudahnya mencari *marketer* yang produktif dan selektif, tidak mudah menyimpulkan karakter nasabah baik atau tidak, kooperatif atau tidak, tidak mudahnya membekali *marketer* dalam waktu singkat.²⁶ BPRS Amanah Sejahtera Gresik memiliki NPF sebesar 22,72% dan FDR 173% pada Desember 2017. Pembiayaan dalam status lancar pada Juni 2018 sebesar 70,8 persen dan NPF sebesar 33,08 persen. BPRS Mandiri mitra sejahtera Gresik memiliki NPF sebesar 4,41% dan FDR 86% pada Desember 2017. Pembiayaan lancar pada Juni 2018 sebesar 94,7 persen dan NPF 5,62 persen. Menurut direksi BPRS Mandiri Mitra Sejahtera, permasalahan pembiayaan itu pada pemahaman nasabah tentang bank syariah yang minim.

Strategi mengelola pembiayaan agar tidak mengalami masalah terus menerus dilakukan oleh BPRS. Strategi yang dijalankan masih menjadikan pembiayaan bermasalah berada di atas ketentuan otoritas, yaitu 7%. Strategi yang

²⁶ Jawaban kuisioner angket pra penelitian dari direksi BPRS Unawi Barokah Sidoarjo, di akses melalui <http://gmail.com> pada 1 Nopember 2018

Pelaksanaan kehati-hatian dan kepatuhan syariah pada BPRS menjadi kegelisahan akademik bagi masyarakat pada umumnya. Kepatuhan Kehati-hatian dan kepatuhan syariah seyogyanya mencakup secara totalitas baik dalam hal Sumber Daya Manusia, operasional maupun evaluasi sehingga *Islamic prudential banking* pembiayaan menjadi ruh dalam perjalanan BPRS.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain:

- ²⁷ Samsun Maarif, Direksi BPRS Mandiri Mitra Sejahtera, *Wawancara* pada 30 Oktober 2018

1. Strategi pengelolaan NPF yang berimplikasi pada penurunan PPAP.
2. Penerapan *prudential banking* dan kepatuhan syariah belum terintegrasi. Dampak dari hal ini adalah terabaikannya syariah dalam operasional pembiayaan di BPRS (kehati-hatian yang didasarkan *risk* dan syariah) sehingga diperlukan bangunan *Islamic prudential banking* dalam meminimalisir NPF dan PPAP.

Berdasar identifikasi masalah dan batasan penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- #### D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis strategi pengelolaan NPF dalam meminimalisir alokasi PPAP

- ### E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

2. Manfaat Praktis

a. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Penelitian ini memberi manfaat dalam menguatkan pengelolaan pembiayaan sehingga mampu meminimalisir NPF dan PPAP. Integrasi kehati-hatian yang memiliki perspektif syariah memberikan dampak pada pembiayaan sehingga akan terserap maksimal, kesadaran melakukan pembiayaan dimiliki nasabah, pembiayaan macet dan PPAP dapat diminimalisir.

b. Pemerintah (Regulasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah (regulasi) yang mengeluarkan setiap kebijakan untuk dipatuhi oleh Bank Pembiayaan Rakyat syariah. Munculnya aturan tentang *Islamic prudential banking* secara utuh (*funding-financing*) menjadi instrumen perbankan syariah sebagai pedoman kehati-hatian yang utuh dan melekat pada setiap penyelenggara perbankan. Harapannya jika *Islamic prudential banking* menjadi sebuah aturan maka mampu meningkatkan perkembangan bank syariah di Indonesia.

F. Kerangka Teoritik

Upaya menggali jawaban atas problem penelitian *Islamic prudential banking* pada pembiayaan di BPRS digunakan teori *Islamic prudential banking*, teori pembiayaan.

1. Teori *Islamic Prudential Banking*

Prinsip amanah menjadi dasar bagi manajemen operasional BPRS sehingga membuat bank harus memenuhi *prudential banking*. *Prudential banking* didefinisikan Hulters dan Montes Negret sebagai kerangka kerja yang mendorong bank untuk beroperasi dengan cara yang aman dan bijaksana.²⁸ Tujuan dari aturan mikroprudential (kehati-hatian) adalah untuk menjaga keamanan dan kesehatan perbankan syariah, mengurangi risiko ketidakstabilan keuangan yang sistemik yang berdampak pada perbankan lainnya.

²⁸Katia D’Hulster and Fernando Montes-Negret, *Micro-Prudential Supervision* (World Bank Group, 2015).

keamanan dan kesehatan masing-masing institusi dan merupakan respon yang tepat terhadap ancaman kegagalan sehingga menciptakan stabilitas keuangan.²⁹ Kesehatan bagi perbankan merupakan potensi bisnis yang bisa menjadi tolak ukur bisnis. Valascas dan Kassey dalam papernya berpendapat bahwa untuk menjaga kekuatan stabilitas pada perbankan, maka diperlukan pembatasan ukuran dan mengurangi risiko.³⁰ Selain itu menurut Williams, risiko bank akan rendah apabila peran pemerintah berkualitas.³¹ Pemerintah memiliki peran dalam menjaga stabilitas moneter yang terkait langsung dengan perbankan syariah.

Kehatian-hatian dalam perbankan erat kaitannya dengan Peraturan keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan pengawasan terhadap bank syariah. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi risiko pada setiap bank syariah sehingga bank syariah bisa berkembang. Menurut Khann dan Bhatti³² bahwa perkembangan bank syariah di Asia ditunjukkan adanya minat dan sikap besar dari regulator terhadap bank syariah. Di Indonesia peraturan khusus tentang bank syariah diatur dalam Undang-undang perbankan syariah, peraturan otoritas jasa keuangan, surat edaran dan lain sebagainya. Peraturan ini bagian dari upaya regulator menyiapkan bank syariah yang *prudent*. Kehatian-hatian yang

²⁹Larry D. Wall, “Stricter Microprudential Supervision Versus Macroprudential Supervision”, *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Vol. 23, No. 4 (2015), 354–368.

³⁰ Francesco Vallasca and Kevin Keasey, “Bank Resilience to Systemic Shocks and the Stability of Banking Systems: Small Is Beautiful”, *Journal of International Money and Finance*, Vol. 31, No. 6 (2012), 1745–1776.

³¹Barry Williams, "Bank Risk and National Governance in Asia", *Journal of Banking & Finance*, Vol. 49 (2014), 10–26.

³²M. Mansoor Khan and M. Ishaq Bhatti, *Developments in Islamic Banking, The Case of Pakistan* (New York: Palgrave Macmillan, 2008).

Kehati-hatian pada pembiayaan terletak mulai dari input, proses dan output. Input yang dimaksud adalah pembiayaan akan berjalan baik apabila karyawan dan nasabah mampu melaksanakan fungsi akad dalam pembiayaan dengan sempurna. Pembiayaan dijalankan tidak sekedar memenuhi studi kelayakan bisnis, melainkan setiap proses kelayakan bisnis yang didasarkan pada risiko dan ketaatan terhadap syariah. Kehati-hatian tidak hanya menyangkut rasio keuangan yang sudah terpenuhi melainkan rasio keuangan yang dibentuk berdasarkan prinsip syariah.

³⁸ Pasal 5 POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

⁴⁰Naama Trad, Mohamed Ali Trabelsi, and Jean François Goux, "Risk and Profitability of Islamic Banks: a Religious Deception or an Alternative Solution?", *European Research on Management and Business Economics*, (2016), accessed December 7, 2018, <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2444883416300274>.

Proses pembiayaan pada praktiknya, nasabah mengajukan pembiayaan modal kerja sebesar 1 milyar. Akad yang digunakan adalah akad *muḍārabah*. Skim akad *muḍārabah* memberikan keuntungan yang diterima bank syariah adalah sebesar nisbah bagi hasil yang disepakati oleh bank syariah dengan nasabah yang diperoleh dari pendapatan usaha nasabah. Bank syariah sering kali memproyeksikan nisbah bagi hasil tersebut setara dengan bunga bank konvensional, sehingga bank syariah mematok target keuntungan tertentu kepada nasabah. Dalam kondisi demikian maka bank syariah harus konsisten menerima keuntungan yang bersifat fluktuatif dari pendapatan yang diperoleh nasabah. Jika bank syariah ingin keuntungan nasabah bersifat linier dan meningkat terus, maka proses memantau usaha nasabah harus dilakukan, sehingga nasabah tidak mengalami penurunan keuntungan, dan bank syariah tidak terkena dampaknya. Ketaatan terhadap prinsip syariah tidak menjadi risiko operasional. Hal ini terjadi di Bangladesh. Menurut Ullah⁴¹ bahwa status kepatuhan syariah dari bank-bank Islam di Bangladesh berada dalam kondisi rentan, status kepatuhan syariah sangat bervariasi di antara bank-bank Islam, dan pelanggaran Syariat adalah tinggi dalam

⁴¹Hafij Ullah, “Shari’ah Compliance in Islamic Banking: an Empirical Study on Selected Islamic Banks in Bangladesh”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 7, No. 2 (2014), 182–199.

2. Teori Manajemen Risiko Bank Syariah

Financial risks pada bank syariah terkait dengan pemenuhan kesehatan bank yaitu pemenuhan rasio *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity* dan *Sensitivity of risks* (CAMELS). *Operational risks* pada bank syariah menyangkut pada risiko yang timbul akibat aturan-aturan internal yang digunakan, pencatatan laporan keuangan. Aturan internal ini yang memiliki potensi besar agar *Islamic prudential banking* pada pembiayaan bisa diterapkan. *Business risk* terjadi dengan melihat risiko dari bisnis yang sedang dibiayai oleh bank syariah. Bank syariah harus bisa memprediksi bahwa bisnis yang akan dan sedang dibiayai memiliki produktivitas. *Event risk* terjadi akibat kejadian yang mungkin timbul sehingga berdampak pada bank syariah maupun bisnis yang sedang dibiayai. Bank syariah perlu memprediksi kejadian akan terjadi jika pembiayaan disalurkan.

⁴²Hennie Van Greuning and Zamir Iqbal, *Risk Analysis For Islamic Banks* (Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development, 2008), 65

⁴⁴Ibid., 49.

Pembiayaan *istiṣnāʾ*” memiliki karakteristik pembayaran yang bersifat fleksibel. Ketiga skim tersebut merupakan skim pembiayaan dengan jual beli. Skim pembiayaan yang lain yaitu skim pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil terdiri dari skim *muḍārabah* dan *musharakah*. Pembiayaan dengan skim *muḍārabah* menurut el-Tiby:

Skim *muḍārabah* ini membagi risiko bagi kedua belah pihak. Skim lain yaitu *musharākah* menurut el-Tiby:

Pembiayaan *musharākah* memiliki peran kedua belah pihak dalam kontribusi modal meskipun persentasenya masing-masing pihak tidak harus sama. Pembiayaan jual beli dan bagi hasil merupakan pembiayaan yang bersifat bisnis

⁴⁷Ibid., 56.

Bank syariah dalam upaya mewujudkan profitabilitas (bisnis dan sosial) dan keamanan pembiayaan maka diperlukan analisa kelayakan pembiayaan.

⁴⁹Ibid., 190.

Analisa Pembiayaan pada umumnya dijalankan dengan memegang teguh prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*). Karakter dapat membangun kepercayaan nasabah bank syariah menjadi nasabah yang loyalis dapat diwujudkan melalui berbagai aktifitas nasabah. Karakter nasabah yang baik membuat hubungan nasabah dengan bank syariah akan terbangun secara baik, sehingga pada saat nasabah selesai masa pembiayaan, maka nasabah akan tetap merasa nyaman bertransaksi dengan bank syariah dalam bentuk menabung atau melakukan pembiayaan ulang. Nasabah yang baik akan mendapatkan peluang untuk memperoleh pembiayaan secara maksimal dari pengajuan pembiayaan yang didasarkan pada analisa pembiayaan.

⁵⁰Choudhry, *An Introduction to Banking: Liquidity Risk and Asset Liability Management*.

tanpa mengeluarkan biaya promosi untuk mendapatkan nasabah, karena nasabahnya melakukan pembiayaan ulang serta dijamin bagus.

Capital yang dimaksud adalah besarnya modal yang diperlukan dalam usaha nasabah. Semakin tinggi nasabah memiliki modal sendiri maka menunjukkan nasabah memiliki kesungguhan dalam melakukan usaha. Modal sendiri akan menjadi benteng usaha ketika mengalami goncangan dari luar maupun dari dalam. Modal yang besar membuat keyakinan nasabah bahwa usaha yang dijalankan akan berjalan aman. Hal demikian menguatkan nasabah untuk melakukan pembiayaan atas dana yang kurang. Kenyamanan kedua belah pihak (bank syariah dan nasabah) membuat pembiayaan akan dengan mudah disalurkan ulang. Saat usahanya baik, nasabah dengan gampang akan menginformasikan sumber perolehan uang, kenyamanan yang diperoleh kepada calon nasabah lain.

Collateral merupakan jaminan yang telah dimiliki nasabah yang diberikan kepada bank syariah. Jaminan dalam bank syariah merupakan agunan. Agunan dalam pembiayaan menurut Wangsawidjaya terdiri dari agunan pokok dan agunan tambahan.⁵¹ Agunan pokok adalah berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan. Sedangkan agunan tambahan adalah berupa barang, surat berharga atau garansi risiko yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai. Jaminan dalam hukum Islam ada dua yaitu *kafālāh* dan *rahn*.⁵² *Kafālāh* menurut bahasa adalah menanggung (*hamalah*) dan menjamin (*za'amah*). *Kafālāh* menurut istilah adalah mempersatukan tanggungjawab dengan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak

⁵¹Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).

⁵²Ibid., 297 - 317.

Condition of economic merupakan situasi ekonomi yang mendukung usaha, yakni peraturan pemerintah dalam kemudahan bisnis, budaya yang mendukung dan kondisi ekonomi yang sedang berjalan. Kondisi ekonomi yang mendorong usaha nasabah dapat berjalan. Ketika usaha nasabah berjalan, disitulah investasi dari bank syariah akan disalurkan. Semakin baik kondisi ini maka semakin berpeluang pembiayaan berlangsung.

[illegible]

Jika *input* dan proses sudah berjalan, maka *output* pembiayaan bisa dipastikan sesuai harapan. Pembiayaan pada intinya harus mampu menolong nasabah keluar dari masalah, tidak menambah masalah. Dalam hal ini peran bank syariah untuk terus mendampingi dan memantau nasabah penting untuk proses menjaga output pembiayaan sesuai tujuan dan prinsip syariah. Risiko yang dikelola dengan hati-hati akan berdampak positif kepada bank yang sehat. Manajemen kesehatan bank secara individual dengan pendekatan *Risk-based Bank Rating*. Adapun faktor yang perlu diperhatikan adalah profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance (GCG)*, rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*capital*).⁵³ Selain memperhatikan risiko kesehatan bank, pembiayaan dilakukan dalam rangka untuk menjaga efisiensi. Menjaga efisiensi dengan memastikan

[illegible]

Rapuhnya institusi perbankan karena salah satu fungsi intermediasi tidak berjalan optimal. Sepertihalnya dalam *financing*, Mathur⁵⁵ menyampaikan bahwa pembiayaan akan dijamin lancar apabila tidak terjadi *a-symmetric information* antara nasabah dengan bank.

⁵⁴Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah....*

⁵⁶Samreen Ashraf, Julie Robson, and Yasmin Sekhon, "Consumer Trust and Confidence in the Compliance of Islamic Banks", *Journal of Financial Services Marketing*, Vol. 20, No. 2 (June 2015), 133–144.

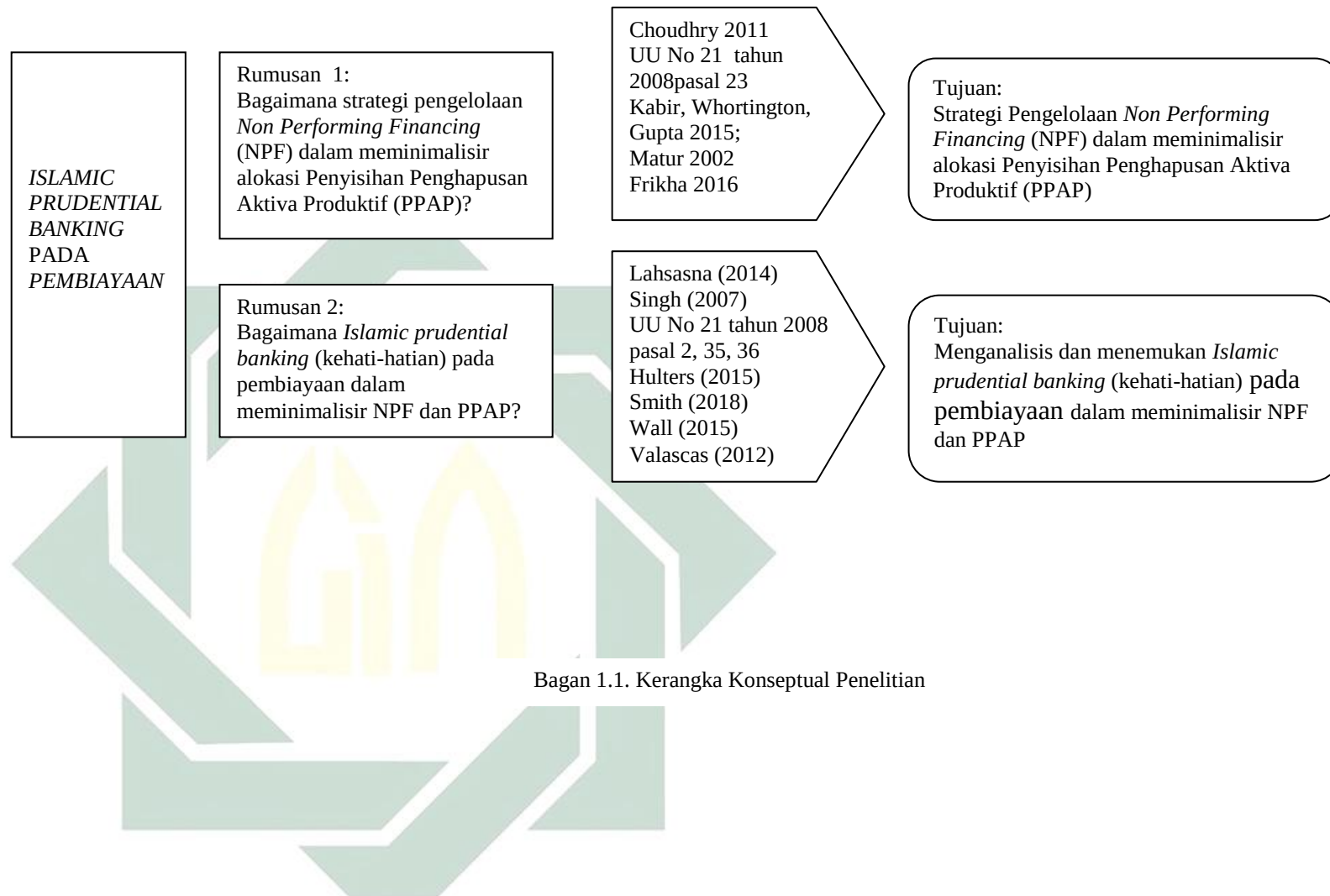
⁵⁷Mamadolimova, Ambiah, and Lukose, “Modeling Islamic Finance Knowledge for Contract Compliance in Islamic Banking.”...

BPRS akan berada pada pengawasan intensif apabila memiliki ciri dan karakteristik seperti *Pertama*, rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) lebih besar atau sama dengan 4% dan kurang dari 8%, kedua, *Cash ratio* selama enam bulan terakhir lebih besar atau sama dengan 3 dan kurang dari 4 persen, *Ketiga*, tingkat kesehatan bank masuk kategori kurang sehat secara berturut-turut sampai dengan 3 bulan.⁶⁰ Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum

⁶⁰ POJK No 65/POJK.03/2016 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

⁶³Brian L. Connelly et al., "Signaling Theory: A Review and Assessment", *Journal of Management*, Vol. 37, No. 1 (2011), 39–67.

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN



masalah dan dua tujuan penelitian sebagaimana dalam bagan di atas. Guna menjawab tujuan masalah maka digunakanlah teori dan penelitian terdahulu sebagai pisau analisis untuk mempertajam dan memberikan hasil sebagaimana teori yang berkembang.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian disertasi ini dikaji dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan tema yang berdekatan, antara lain:

1. Paper Kabir, Whortington, dan Gupta⁶⁴ yang meneliti tentang risiko kredit pada bank syariah dan bank konvensional. Hasilnya menunjukkan bahwa bank syariah memiliki pembiayaan macet lebih rendah dibanding bank konvensional. Hal itu memiliki latar belakang bahwa analisa pembiayaan hanya didasarkan pada penggunaan laporan akuntansi sehingga pembiayaan sangat menyesatkan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini bermaksud memasukkan input proses dan output berbasis syariah yang melekat dalam setiap transaksi, sehingga tidak hanya berbasis akuntabilitas laporan keuangan, melainkan akuntabilitas dalam proses operasional yang didasarkan pada prinsip syariah.
2. Paper Nicolo, Gamba dan Lucchetta⁶⁵ yang menganalisis dampak kuantitatif dari peraturan bank mengenai mikroprudensial pada pinjaman dan nilai

2. Paper Nicolo, Gamba dan Lucchetta⁶⁵ yang menganalisis dampak kuantitatif dari peraturan bank mengenai mikroprudensial pada pinjaman dan nilai

⁶⁴Md. Nurul Kabir, Andrew Worthington, and Rakesh Gupta, “Comparative Credit Risk in Islamic and Conventional Bank”, *Pacific-Basin Finance Journal* (2015), accessed December 7, 2018, <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0927538X1500075X>.

⁶⁵Gianni De Nicolò, Andrea Gamba, and Marcella Lucchetta, “Microprudential Regulation in a Dynamic Model of Banking”, *Review of Financial Studies* (April 2014), accessed December 7, 2018, <https://academic.oup.com/rfs/article-lookup/doi/10.1093/rfs/hhu022>.

- ⁶⁶Bambang Hermanto, “The Role of DSN-MUI to Ensure Shariah Compliance of Islamic Financial Transactions in Indonesia (A Political Ambiguity Perspective)”, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 6, No. 1 (2018), 37–44.
- ⁶⁷Abdulazeem Abozaid, “The Internal Challenges Facing Islamic Finance Industry”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 9, No. 2 (2016), accessed December 4, 2018, <http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IMEFM-05-2015-0056>.
- ⁶⁸Trisadini Prasastinah Usanti, “Characteristic of Prudential Principle in Islamic Banking Business” (Disertasi, Universitas Airlangga, 2017).

- ⁶⁹Mathur, “Prudential Practices and Financial Stability.”...

[illegible]

- ⁷¹Wan Amalina Wan Abdullah, Majella Percy, and Jenny Stewart, “Shari’ah Disclosures in Malaysian and Indonesian Islamic Banks: The Shari’ah Governance System”, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 4, No. 2 (September 23, 2013), 100–131.
- ⁷²Wall, “Stricter Microprudential Supervision Versus Macroprudential Supervision.”...
- ⁷³Mais and Sari, “Evaluation of Banks Health Rate of Indonesia and Malaysia Islamic Bank With RGEC Method.”...

- ⁷⁸Murniati Mukhlisin, Mohammad Hudaib, and Toseef Azid, "The Need for Shariah Harmonization in Financial Reporting Standardization: The Case of Indonesia", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 8, No. 4 (2015), 455–471.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikatakan tepat untuk *single case multi situs* karena penelitian ini memiliki karakteristik sebagaimana menurut Atkinson⁸¹ dan Yin⁸² antara lain *pertama*, merepresentasikan kasus kritis; *kedua*, kasus ekstrim

⁸²Robert K. Yin, *Case Study Research Design*, 39 - 42.

Pusat dari teori kritis menurut Dent, Khin dan Nazari bin Ismail adalah “adanya potensi akal sehat untuk merefleksikan secara kritis tentang bagaimana realitas dunia sosial, termasuk konstruksi diri, diproduksi secara sosial dan terbuka untuk transformasi”.⁸³ Artinya bahwa penelitian ini mengkaitkan hasil penelitian dengan realitas sosial sehingga memberi makna dan adaptif terhadap sosial kemasyarakatan. Walsham⁸⁴ menjelaskan bahwa analisis penelitian interpretatif dimulai dari posisi bahwa pengetahuan tentang realitas, termasuk domain tindakan manusia, yang merupakan konstruksi sosial oleh aktor manusia. Teori-teori tentang realitas adalah cara untuk memahami dunia, dan berbagi makna adalah bentuk inter subjektivitas daripada obyektifitas.

Nilai yang dibangun dalam penelitian ini berdasarkan pemikiran Glaser dan Strauss⁸⁵ sejauh mana hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas, nilai pemahaman yang muncul dari studi interpretatif

⁸⁵Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss, *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research* (USA: Aldine Transaction, 2009).

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini mutlak diperlukan. Peneliti bertindak sebagai pencari pengumpul data dan mengamati aktivitas-aktivitas serta operasional yang terjadi di lapangan. Selain itu, peneliti juga sebagai pengumpul dan penganalisis data, peneliti menemui secara langsung pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan informasi dengan jelas dan akurat. Di lokasi penelitian, peneliti dibantu oleh pihak BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, BPRS Jabal Nur Surabaya, BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, BPRS Unawi Barokah Sidoarjo, BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, BPRS Amanah Sejahtera Gresik dan Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Jawa Timur. Untuk mengkonfirmasi hasil penelitian, wawancara dilakukan dengan pihak *expert* di bidang ekonomi Islam yaitu Prof. Dr. Munawar Ismail, SE., DEA., dari Universitas Brawijaya Malang dan Dr. Muhammad Nafik Hadi Ryandono, SE., M.Si. dari Universitas Airlangga Surabaya.

Pemilihan lembaga penelitian dilakukan dengan *purposive sampling*. Lokasi penelitian didasarkan pada tujuan penelitian yaitu lembaga yang memiliki tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi, di atas ketentuan Otoritas Jasa

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder, data primer dan data sekunder.

Sumber primer adalah penggalian informasi yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti secara mendalam, yaitu Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Karyawan, Nasabah BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, BPRS Jabal Nur Surabaya, BPRS Bakti makmur indah Sidoarjo, BPRS Unawi barokah Sidoarjo, BPRS Mandiri mitra sukses Gresik dan BPRS Amanah Sejahtera Gresik.

[illegible]

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah literatur baik dari buku, jurnal ilmiah, laporan keuangan publikasi Bank Indonesia untuk BPRS, standar operasional prosedur pembiayaan, peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Pedoman Kebijakan Pembiayaan BPRS, SOP Pembiayaan BPRS.

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan yang berupa wawancara, observasi dan dokumen⁸⁶ terkait tema penelitian.

[illegible]

Penelitian ini dilakukan dengan memaknai realitas kehati-hatian yang

Langkah analisis data secara praktis dilakukan dengan, *pertama* memeriksa setiap data yang diperoleh sehingga bisa dipastikan kelengkapan dan kebenaran sesuai sumber aslinya baik sumber primer maupun sekunder. *Kedua* mengkategorikan masing-masing data yang diperoleh, apakah masuk bahasan fokus pertama atau kedua. *Ketiga* mentabulasi data penelitian ke dalam data tertulis baik berupa hasil wawancara maupun dokumentasi data. *Keempat* menguji setiap data yang ada dengan melakukan triangulasi dengan pihak terkait yaitu kepada pejabat di atasnya OJK maupun kepada nasabah.. *Kelima*, menggabungkan bukti data sekunder berupa laporan keuangan maupun data primer dari hasil wawancara sehingga menghasilkan hasil penelitian, proposisi minor dan mayor dari *islamic prudential banking* pembiayaan bank syariah pada BPRS.

Pengecekan kualitas desain penelitian dilakukan sebelum mulainya

Uji Kredibilitas dilakukan dengan memastikan data penelitian yang telah diperoleh adalah kredibel. Kredibilitas data diketahui setelah data dicek ke lokasi valid atau tidak, berubah atau tidak, bila setelah dicek kembali kelengkapan data sudah benar berarti data tersebut kredibel maka pengamatan dapat berakhir.

⁸⁸Ibid,,33 - 99.

Disertasi ini ditulis berdasarkan sistematika pembahasan yang terdiri dari bagian depan penelitian, bagian substansi dan bagian belakang. Bagian depan disertasi terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman persetujuan promotor, halaman pengesahan tim penguji, pedoman transliterasi, motto, abstrak, pernyataan ucapan terimakasih, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan. Bagian substansi disertasi akan diuraikan berdasarkan bab pendahuluan, bab landasan teoritik, bab karakteristik informan, bab hasil penelitian dan pembahasan dan penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari uraian latar belakang penelitian yang menggambarkan adanya NPF sebagai akibat kurang diterapkannya *Islamic Prudential Banking* pembiayaan, identifikasi masalah dan batasan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[illegible]

Bab Ketiga adalah pelaksanaan *Islamic prudential banking* di BPRS. Sub pembahasan dalam bab tiga berisi: pertama, karakteristik informan penelitian; kedua, strategi pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP, ketiga, penerapan *Islamic prudential banking* pada pembiayaan dalam meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS.

Bab Keempat adalah analisis *Islamic prudential banking* pada pembiayaan dalam meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS. Sub bab keempat terdiri dari pertama, strategi pengelolaan NPF dalam meminimalisir alokasi PPAP, kedua, analisis *Islamic prudential banking* pada pembiayaan dalam meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS.

Bab Kelima adalah penutup yang merupakan akhir dalam penelitian yang akan disajikan kesimpulan hasil penelitian, implikasi teoretik serta rekomendasi baik untuk BPRS maupun peneliti selanjutnya.

Pada akhir disertasi berisi daftar pustaka, surat keterangan telah melakukan penelitian dari lokasi penelitian, cek *similarity*, SOP Pembiayaan perspektif syariah serta Daftar Riwayat Hidup penulis.

BAB II

PRUDENTIAL BANKING PADA PEMBIAYAAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Perbankan syariah melaksanakan fungsi intermediasi pada nasabah yang surplus dana dan defisit dana. Intermediasi pada nasabah yang surplus dana dilakukan bank syariah dengan mengelola dana *funding*. Pengelolaan dana *funding* dijalankan dengan mengupayakan dana yang dihimpun dari masyarakat aman, memberikan keuntungan sehingga nasabah loyal kepada bank syariah. Intermediasi pada nasabah defisit dana dilakukan bank syariah dengan membantu dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Fungsi intermediasi ini membantu masyarakat dan sekaligus sebagai fungsi keberlanjutan bisnis perbankan.

Nasabah senantiasa percaya pada bank syariah apabila bank syariah menyalurkan *funding* dalam bentuk pembiayaan yang aman dan menguntungkan. Menurut Alam dan Risvi, ditemukan di berbagai negara bahwa bank Islam lebih mengedepankan profitabilitas dibandingkan bank konvensional.¹ Profitabilitas yang berhasil di kelola, bisa memupuk permodalan bank syariah. Permodalan yang cukup mampu menjadi penyangga bisnis yang dijalankan. Penyangga bisnis perbankan syariah semakin kuat maka semakin memudahkan langkah bank

¹Nafis Alam and Syed Aun R. Rizvi, eds., *Islamic Banking Growth, Stability and Inclusion* (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2017), 3–4.

Bank syariah selain menerapkan intermediasi antara yang surplus dan defisit dana kepada masyarakat, juga berfungsi melakukan transaksi sesama antar bank syariah. Hal ini berfungsi untuk upaya pemenuhan likuiditas bank. Likuiditas menurut Erik merupakan ketersediaan uang tunai atau sumber daya, kebutuhan yang diharapkan maupun kebutuhan yang tidak terduga dapat terpenuhi sehingga bisnis berjalan lancar.³ Krisis likuiditas menurut Chorafas akan memicu ketidakpastian kredit/pembiayaan.⁴ Agar ketidakpastian dalam bisnis perbankan dapat dikendalikan, maka harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan pengawasan yang cukup. Menurut Singh, kesalahan dalam pengawasan dan kehati-hatian (*prudential*) menjadi faktor terganggunya stabilitas perbankan.⁵ Oleh karenanya kehati-hatian dalam bisnis perbankan diharapkan tidak mengalami hambatan, baik karena kelebihan maupun kekurangan operasional.

Likuiditas menurut Erik pada umumnya memiliki tahapan pertama, menyeimbangkan arus kas masuk dan keluar, diversifikasi aset dan kewajiban sehingga memastikan aset dan kewajiban sesuai kebutuhan masyarakat, membuat cadangan likuiditas baik dalam bentuk surat berharga yang mudah dicairkan,

⁵Dalvirder Singh, *Banking Regulation of UK and US Financial Markets* (England: Ashgate Publishing, 2007), 15.

Upaya pemenuhan likuiditas bank syariah dapat diperoleh dari antar lembaga perbankan dan dapat dipastikan dilakukan dengan terlibat dalam Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), maupun syukuk negara. Selain itu bank syariah juga memiliki kesempatan untuk pemenuhan likuiditas pada Bank Indonesia dalam bentuk Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS) saat bank syariah kelebihan likuiditas, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)⁷ dan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bank Syariah (FPJPS) saat bank syariah defisit likuiditas. FPJS merupakan solusi terakhir saat bank syariah tidak mendapatkan pendanaan dari masyarakat maupun Pasar Uang Antar Bank Syariah.⁸ Likuiditas bank syariah memudahkan aset produktif dikelola.

⁷Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/43/DPM Tertanggal 16 Nopember 2015 Tentang Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah

⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 tentang Perubahan PBI Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ^{٤٩} ١٢

Ayat di atas memberikan pesan bahwa godaan dalam bisnis adalah hawa

¹² Alquran, 5: 49

[illegible]

Kehati-hatian dalam hadis Nabi SAW. dapat diambil hikmah dari hadis

berikut:

“عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ”¹⁴

Hadis di atas menceritakan bahwa Malaikat Jibril AS. selalu datang di malam hari bulan *Ramaḍān*, dan saat beliau datang, Nabi Muhammad SAW. selalu “menyetorkan” pada Malaikat Jibril AS. apa-apa yang telah turun dari al-Qur'an dari Allah SWT melalui malaikat Jibril AS. Dalam penjelasan panjang pada kitab *Fatḥ al-Bārī* penjelas dari kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukḥārī*, dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar bahwa ini merupakan sikap kehati-hatian Nabi Muhammad SAW. yang menerima amanat "al-Qur'an" untuk disampaikan kepada Umat. Setoran bacaan ini merupakan bentuk menyamakan bacaan Nabi Muhammad SAW. pada Malaikat Jibril AS yang juga mempunyai amanat menyampaikan dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.¹⁵

Hadis lain terkait dengan amanah *muḍārabah* yang memberikan persyaratan kehati-hatian antara lain:

“وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا الْمُضَارَبَةَ لِمُؤَافَقَتِهِ نَصَّ الْقُرْآنِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ - تَعَالَى - : (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) أَيْ يُسَافِرُونَ لِلتَّجَارَةِ ، وَهُوَ عَقْدٌ مَشْرُوعٌ بِالْآيَةِ وَبِالسُّنَّةِ ،

¹⁴Muḥammad b. Ismāʿīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī pada Kitab Faṭḥ al-Bārī*, vol. 4 (Bairut: Dār Ibn Kathīr, 1993), 1907.

¹⁵Ahmad b. 'Alī b. Ḥajr al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986), 660–662.

وَهُوَ مَا رُوِيَ أَنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ يَدْفَعُ مَالَهُ مُضَارِبَةً ، وَيَشْتَرِطُ عَلَى مُضَارِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ
بَحْرًا وَأَنْ لَا يَنْزِلَ وَاِدِيًّا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ
رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَحْسَنَهُ وَأَجَازَهُ ، وَبُعِثَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -
وَالنَّاسُ يَتَعَامَلُونَهُ فَأَقْرَهُهُمْ عَلَيْهِ . وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ دَفَعَ مَالَ الْيَتِيمِ مُضَارِبَةً ،
وَعَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ ، وَلِأَنَّ لِلنَّاسِ حَاجَةً إِلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مِنْهُمْ الْغَنَى الْغَبِيَّ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ ، وَالْفَقِيرَ
الذَّكِيَّ الْعَارِفَ بِأَنْوَاعِ التَّجَارَاتِ ، فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى شَرْعِيَّتِهِ تَحْصِيلًا لِمَصْلَحَتِهَا¹⁶”

Kehati-hatian tersebut dalam perbankan, sebagaimana Peraturan mikroprudensial menurut Wall dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan kesehatan masing-masing institusi dan merupakan respon yang tepat terhadap ancaman kegagalan sehingga menciptakan stabilitas keuangan.¹⁷ Valascas dan Kassey berpendapat untuk menjaga kekuatan stabilitas perbankan, maka diperlukan pembatasan ukuran dan mengurangi risiko.¹⁸ Selain itu menurut

Aturan kehati-hatian sebagaimana dalam undang-undang perbankan syariah bahwa “perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya

²¹Khan and Bhatti, *Developments in Islamic Banking, The Case of Pakistan...*

Peraturan tentang perbankan syariah diatur oleh regulator. Aturan kehati-hatian yang dikeluarkan oleh regulator yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan antara lain; Undang-Undang tentang perbankan²³, Undang-undang tentang perbankan syariah²⁴, fungsi kepatuhan bank umum²⁵. Peraturan yang secara spesifik terhadap operasional bank syariah antara lain; Produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah²⁶ Kualitas asset bank umum syariah dan unit usaha syariah²⁷, Penerapan manajemen risiko bank syariah dan unit usaha syariah²⁸, Penilaian kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah²⁹ dan restrukturisasi pembiayaan bank syariah dan unit usaha syariah.³⁰

³⁰ PBI Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan PBI Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas PBI Nomor

Bank syariah dan unit usaha syariah dalam prinsip kehati-hatian tersebut melaksanakan tata kelola bank syariah yaitu akuntabilitas dalam bisnis yang dijalankan. Akuntabilitas ini memunculkan kepercayaan bagi para nasabah, investor dalam menyimpan dana pada bank syariah. Kepercayaan investor memiliki simbiosis mutualisme bagi nasabah *financing*, bahwa pembiayaan akan difasilitasi karena likuiditas bank syariah yang lancar.

Kehati-hatian dalam hal penyaluran pembiayaan bagi bank syariah antara lain “Dalam penyaluran pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank syariah dan unit usaha syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank syariah dan / unit usaha syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”³². Prinsip kehati-hatian tersebut menaruh pesan bahwa intermediasi yang dijalankan bank syariah dan unit usaha syariah harus dipastikan aman dan menguntungkan. Karena diantara tujuan nasabah bertransaksi pada bank syariah adalah untuk tujuan profitabilitas dan usaha yang dijalankan memberikan dampak keuntungan dalam bisnisnya. Hal tersebut diterapkan dalam bentuk

³² Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

pengelolaan portofolio asset bank syariah dan unit usaha syariah yang menguntungkan. Bagi nasabah *financing*, fasilitas pembiayaan memberikan rasa aman dan tenang untuk berbisnis. Hal itu karena pada bank syariah terdapat pilihan keuntungan yang bisa diberikan pada bank syariah diantaranya adalah keuntungan yang bersifat *certainty* maupun yang *uncertainty*.

Pilihan pembayaran keuntungan secara *certainty* dibutuhkan masyarakat yang memiliki pendapatan lancar seperti karyawan, pegawai negeri sipil, atau masyarakat yang ingin kepastian harus membayar berapa sehingga menjadikan dasar untuk masyarakat mematok diri untuk mencari hasil serupa. Sedangkan pembayaran yang bersifat *uncertainty* cenderung cocok bagi masyarakat yang berbisnis, yang belum bisa ditentukan pendapatannya. Dengan pendapatan yang bersifat nisbah bagi hasil, besarnya yang dibayarkan kepada bank syariah sesuai persentase pendapatan. Hal ini meringankan beban nasabah. Namun demikian harus disiapkan mental bagi masyarakat bahwa saat nasabah memiliki keuntungan besar, maka persentase keuntungan yang harus dibayar kepada bank syariah juga besar. Kerelaan dan *riḍo* kedua belah pihak ini menjadi penentu. Saat keuntungan tinggi atau rendah, tidak boleh ada penyesalan, keuntungan rendah, nasabah senang karena membayar keuntungan kepada bank syariah rendah, sedangkan saat untung besar maka nasabah enggan jujur sehingga pembayaran yang dibayarkan lebih kecil dari persentase yang sesungguhnya.

Kehati-hatian perbankan syariah secara umum merupakan upaya menjaga kesehatan bank syariah. Upaya tersebut sebagaimana dalam undang-undang

Bank syariah dan unit usaha syariah wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen islami, serta aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank syariah dan unit usaha syariah...³⁴

³³ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
³⁴ Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
³⁵ Pasal 1 PBI Nomor 13/12/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. dan
 Pasal 1 POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Tata kelola bank syariah dilakukan dengan “bank syariah dan unit usaha syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prosedur internal terkait dengan hal tersebut wajib dibuat oleh perbankan syariah dan unit usaha syariah”³⁶. Definisi tata kelola yang baik menurut aturan adalah “suatu tata cara pengelolaan bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*)”³⁷

³⁷ Pasal 1 POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Pertama, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi dan dewan komisaris; kedua, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern; ketiga, penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern; keempat, penerapan manajemen risiko; kelima, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; keenam, rencana strategis; ketujuh, transparansi keuangan dan non keuangan...³⁸

Ikatan Bankir Indonesia memaknai “kepatuhan bank (*compliance*) bank sebagai ketaatan bank terhadap ketentuan atau peraturan Bank Indonesia ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan”³⁹. Harapan bank mentaati peraturan adalah agar bank berjalan dengan aman dan terkendali.

Serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta

Utama, 2015), 3.

Implementasi fungsi kepatuhan menjadi tanggungjawab direksi perbankan untuk menumbuhkan dan mewujudkan serta memastikan kepatuhan terlaksana pada semua tingkatan organisasi. Bank wajib memiliki direktur yang

[illegible]

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilarang membawahkan fungsi; bisnis operasional, manajemen risiko yang melakukan keputusan pada kegiatan usaha bank, treasury (*treasury*), keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang atau jasa, teknologi informasi, maupun audit intern.⁴² Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan pada bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib berkoordinasi dengan dengan dewan pengawas syariah terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.⁴³ Bentuk koordinasi dengan DPS dalam pelaksanaan syariah menjadi catatan apakah pelaksana fungsi kepatuhan mampu menyerap dan melaksanakan prinsip syariah dengan sepenuhnya. Koordinasi harus sering dilakukan dalam bentuk keterlibatan DPS dalam rapat-rapat internal. Kehadiran DPS akan memberikan masukan-masukan operasional yang bermanfaat pada operasioal syariah.

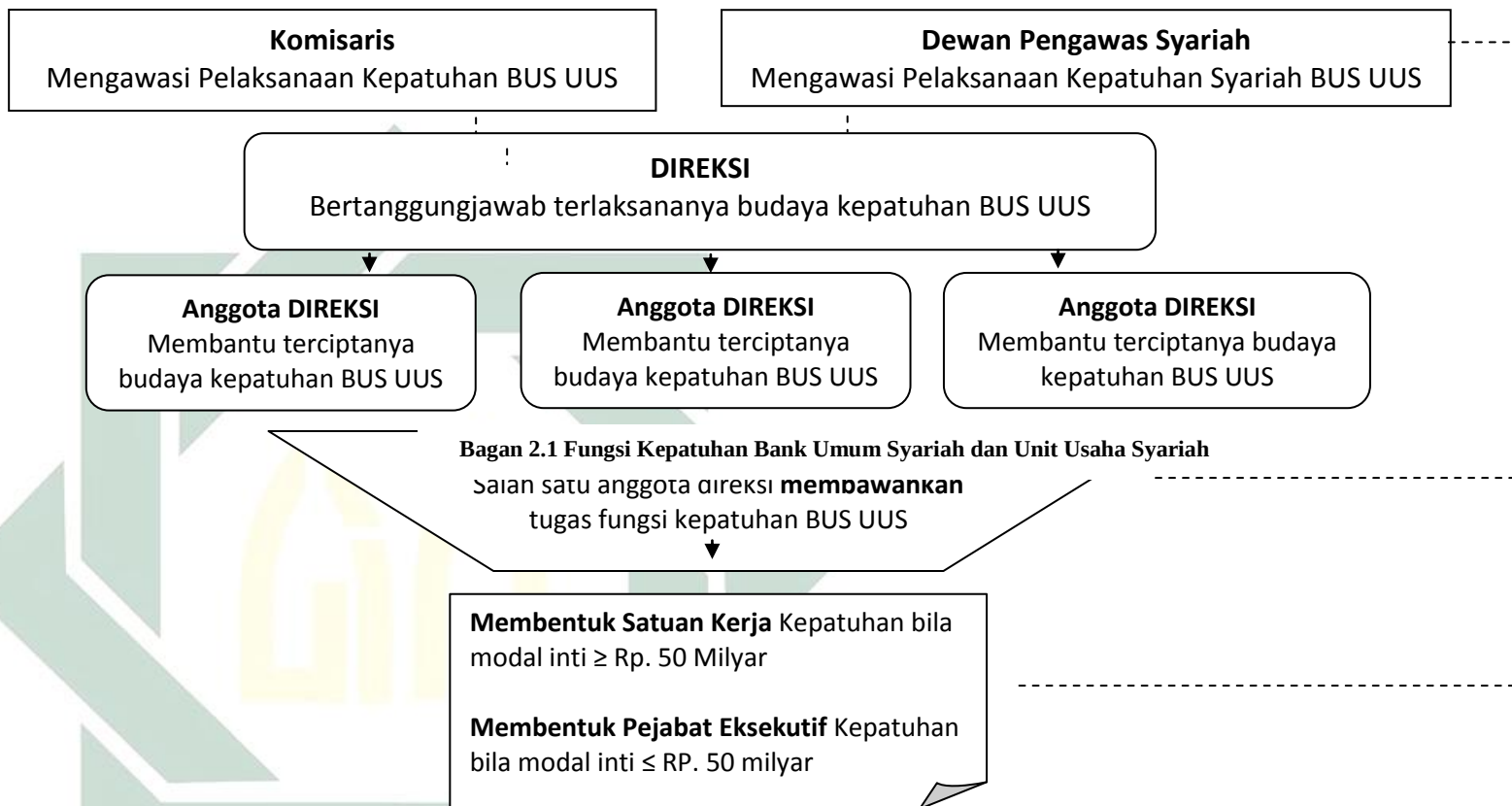
⁴¹ Pasal 4 PBI Nomor 13/12/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Dan Pasal 1 POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

⁴² Pasal 7 PBI Nomor 13/12/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Dan Pasal 1 POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

⁴³ Ibid.,

FUNGSI KEPATUHAN BUS & UUS

PBI 13/2/PBI/2011
PO OJK 46/POJK.03/2017



Bagan 2.1 Fungsi Kepatuhan BUS dan UUS

keduanya saling memahami bisnis yang dikerjakan, maka sistem transparansi keduanya menjadi penting untuk diterapkan.

Sistem transparansi dalam bank syariah akan terlaksana dengan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Rekrutmen sumber daya manusia harus memastikan pemahaman perbankan syariah yang teridentifikasi pada standard operasional prosedur yang terukur, sehingga kepastian terhadap pemahaman perbankan syariah dimiliki. Misalnya adalah kemampuan terhadap fiqih mualamat, manajemen syariah, pemahaman marketing secara syariah hingga produk-produk bisnis bank syariah dan unit usaha syariah. Realitas yang terjadi sangat jauh berbeda, bahwa pemahaman terhadap perbankan syariah tidak menjadi pilihan utama, dan penekanan utama pada kemampuan mengelola bisnis. Potret itu tercermin pada karyawan yang dimiliki oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagian besar merupakan karyawan bank konvensional. Hal dilakukan saat menyampaikan produk bank syariah dan unit usaha syariah tidak berbeda sama sekali. Padahal operasional bisnis bank umum syariah dan unit usaha syariah sangat jauh berbeda.

Kriteria Kepala Satuan kerja kepatuhan adalah independensi, menguasai ketentuan otoritas jasa keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu kepala satuan kerja kepatuhan tidak melaksanakan tugas lain di luar fungsi kepatuhan dan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan

Kehatian-hatian yang harus dijaga dalam setiap lembaga perbankan menurut Acharya⁵¹ adalah *pertama*, perbankan didanai oleh nasabah sehingga perhatian terhadap kesehatan bank adalah yang utama. Regulator dapat mewakili deposan dan menyelesaikan masalah tindakan kolektif mereka dalam memantau dan mengawasi bank dengan menempatkan beberapa kendala dalam pengambilan risiko. *Kedua*, karena pemerintah menjamin deposito hingga jumlah ambang untuk mengurangi timbulnya masalah, itu menjadi nasabah sehingga pemerintah ada kepentingan dalam meminimalkan risiko. *Ketiga*, di banyak negara - terutama di negara berkembang, bank adalah milik negara, sehingga membuat pemerintah menjadi pemangku kepentingan langsung di sektor keuangan. Peraturan kehati-

⁵¹ Acharya, “Adapting Micro Prudential Regulation for Emerging Markets.” ...

Dorongan agar lembaga perbankan beroperasi dengan aman dan bijaksana terwujud atas dasar budaya kepatuhan yang terbangun. Budaya kepatuhan yang dimaksud adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap peraturan otoritas jasa keuangan dan ketentuan undang-undang termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Kehati-hatian perbankan syariah merupakan salah satu entitas bisnis yang berperan dalam menjaga stabilitas dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam hal itu menurut Wang dan Chuan⁵² bank melakukan fungsinya sebagai: *Pertama*, memobilisasi tabungan untuk menyimpan kelebihan dana masyarakat dan menyediakan likuiditas bagi yang membutuhkan, *Kedua*, memfasilitasi transaksi dengan menyediakan berbagai fasilitas, *Ketiga*, membantu memecah risiko ke dalam berbagai portofolio yang berbeda, dan yang *Keempat*, menurunkan biaya dengan memberikan kemudahan layanan. Upaya perbankan dalam menjalankan bisnis di atas dilakukan dengan memperhatikan aspek kehati-hatian (*prudential banking*) sehingga tidak merugikan nasabah dan senantiasa menjaga stabilitas perekonomian. Saat bank syariah mengalami tekanan risiko, menurut Yazid, Isa, Zabid et al.⁵³ bank syariah terdorong untuk melakukan pengalihan risiko.

⁵³Yaziz et al., “Regulatory Capital Funds and Risk-Sharing Behavior in Distressed Financial Conditions,”...

Kepastian atas kehati-hatian operasional ditunggu nasabah dan stakeholder

⁵⁴Welfens, “Banking Crisis and Prudential Supervision.”...

karyawan dan nasabah mampu melaksanakan fungsi akad dalam pembiayaan dengan sempurna. Pembiayaan dijalankan tidak sekadar memenuhi studi kelayakan bisnis, melainkan setiap proses kelayakan bisnis yang didasarkan pada risiko dan ketaatan terhadap syariah. Kehati-hatian tidak hanya menyangkut rasio keuangan yang sudah terpenuhi melainkan rasio keuangan yang dibentuk berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah menerima dana *funding* dengan prinsip syariah (yaitu *Wadī'ah* dan *Muḍārabah*). Bank syariah mendapatkan tawaran *funding* besar yang meminta keuntungan fixed 1%/bulan, maka manajer harus berani untuk menolak. Keberanian ini tidak muncul dalam rasio keuangan, namun proses rasio keuangan itu terbentuk dari keuntungan yang diperjanjikan oleh bank syariah kepada nasabah.

Proses pembiayaan pada praktiknya, nasabah mengajukan pembiayaan modal kerja sebesar 1 milyar rupiah. Akad yang digunakan adalah akad *muḍārabah*. Akad *muḍārabah* memastikan keuntungan yang didapat bank syariah adalah sebesar nisbah bagi hasil yang disepakati oleh bank syariah dengan nasabah yang diperoleh dari pendapatan usaha nasabah. Bank syariah sering kali memproyeksikan nisbah bagi hasil tersebut setara dengan bunga bank konvensional, sehingga bank syariah mematok target keuntungan tertentu kepada nasabah. Kondisi demikian maka bank syariah harus konsisten menerima keuntungan yang bersifat fluktuatif dari pendapatan yang diperoleh nasabah.

bahwa Status kepatuhan syariah dari bank berada dalam kondisi rentan, status kepatuhan antara bank-bank Islam, dan pelanggaran Syariat ada-tasi karena kurangnya pengetahuan, kurangnya syariah, perhatian buruk dalam audit syariah dan penel-ayan pengawas syariah yang kuat yang terdiri dari rasan *prudential* menurut Bekker et al⁶⁰ b an masing-masing bank, melindungi kepentingan a promosi terhadap stabilitas dan transparansi ke- perlu untuk terus dipantau agar bank syariah berj

bahwa Status kepatuhan syariah dari bank berada dalam kondisi rentan, status kepatuhan antara bank-bank Islam, dan pelanggaran Syariat ada-tasi karena kurangnya pengetahuan, kurangnya syariah, perhatian buruk dalam audit syariah dan penel-ayan pengawas syariah yang kuat yang terdiri dari rasan *prudential* menurut Bekker et al⁶⁰ b an masing-masing bank, melindungi kepentingan a promosi terhadap stabilitas dan transparansi ke- perlu untuk terus dipantau agar bank syariah berj

⁶⁰et al. Bekker, ed., *Monetary Stability Through International Cooperation* (Springer, 1994), 337.

⁶⁰et al. Bekker, ed., *Monetary Stability Through International Cooperation* (Springer, 1994), 337.

Kehati-kehatian perbankan diwujudkan dalam tugas pengawasan terhadap kesehatan bank, termasuk pengawasan kesehatan bank syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Di Indonesia, pengawasan terhadap bank syariah dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan Bank Indonesia meakukan fungsinya sebagai bank sentral, dalam kaitannya memantau perkembangan moneter dan makroprudential yang ada kaitannya dengan nilai tukar dan kondisi perbankan yang bersifat systemic. Sedangkan syariah pada bank syariah menjadi pengawasan pada tingkat DPS.

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah “bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.⁶² BPRS pada umumnya perbankan, mengelola dana *funding* dan *financing* sebagai operasional bisnis. Hal yang membedakan dengan BPR Konvensional, BPRS menjalankan usaha berdasar prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah “prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.⁶³ Segala konsekuensi dari prinsip syariah maka pelaksanaan syariah bersifat menyeluruh, mulai dari operasional, rekrutmen sumber daya manusia, pemasaran,

⁶³ Ibid.,

BPRS memiliki keterbatasan dalam pengelolaan likuiditas yang berdampak pada penyaluran dana. Keterbatasan tersebut terletak pada operasional BPRS. BPRS tidak memiliki sumber likuiditas seperti halnya bank umum syariah. BPRS tidak diperkenankan terlibat dalam lalu lintas pembayaran. Hal demikian berdampak pada hilangnya kesempatan pemilik dana besar untuk bertransaksi dengan BPRS. Berbeda dengan Bank Syariah memiliki fasilitas operasional yang luas. Keterbatasan operasional BPRS tersebut antara lain BPRS dilarang:

Bentuk larangan pengelolaan giro di atas merupakan risiko bisnis BPRS dalam pengelolaan likuiditas yang artinya tidak dimiliki. Berbeda dengan bank syariah dan unit usaha syariah yang diperbolehkan mengelola simpanan giro, memberikan peluang untuk mendapatkan dana murah dalam bentuk giro.

⁶⁴ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

bawah BPRS berhadapan dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti Koperasi syariah, *Baitul Maal wat Tamwil* dan sejenisnya. Jika dibandingkan dengan perbankan syariah tidak diperbolehkannya BPRS ikut serta dalam lalu lintas pembayaran dapat dipastikan BPRS hanya akan mengelola dana yang bersifat *funding* dan *financing*. Keuntungan tertumpu pada bisnis riil tersebut. Sedangkan dalam perbankan syariah, keuntungan bisa digali dari *fee base income*. Penyaluran dana bank syariah didukung oleh sumber dana besar, sehingga pembiayaan akan tersalurkan sesuai permintaan nasabah. Kondisi inilah menyebabkan BPRS harus memastikan keunikan dan strategi bisnis yang berbeda. Yaitu bagaimana BPRS memastikan basis komunitas bisnis sebagai sentuhan untuk mengelola *funding* dan *financing*. Kepastian bahwa BPRS mampu dekat dengan masyarakat menjadi penentu. Selain itu keunikan bahwa syariah sebagai prinsip operasional harus dipastikan dalam setiap regulasi yang dibuat dan terlaksana, sehingga mampu dirasakan oleh nasabah.

Jumlah BPRS di Indonesia mencapai 167 lembaga. Jawa Timur memiliki jumlah BPRS terbanyak dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia, yakni sebanyak 29 BPRS. Asset BPRS di Indonesia mencapai 10.840.375 juta rupiah. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sebesar 6.987.280 juta rupiah. *Funding* terbesar berasal dari dana deposito 12 bulan, sebesar 2.329.815 juta rupiah. Sumber dana yang diperoleh dari antar bank sebesar 1.964.754 juta rupiah. Pembiayaan yang berhasil disalurkan sebanyak 7.763.951 juta rupiah, dimana pembiayaan *murabahah* mendominasi sebesar 5.904.751 juta rupiah. Selain

Jika dibandingkan dengan BPR Konvensional, Penyaluran kredit BPR konvensional mencapai 89.482 milyar rupiah, penyaluran antar bank 31.815 milyar rupiah. Sedangkan sumber dana yang dimiliki adalah dari dana pihak ketiga sebesar 84.861 milyar rupiah dan didominasi deposito sebesar 58.137 milyar rupiah. Selain dari DPK, sumber dana diperoleh dari antar bank sebesar 4.417 milyar rupiah, pinjaman yang diterima sebesar 13.820 milyar rupiah, dan kewajiban segera lainnya sebesar 776 milyar rupiah. Indikator kinerja BPR konvensional antara lain LDR sebesar 75,36%, NPL 6,15%, ROA 2,55%, ROE 23,06%.⁶⁶

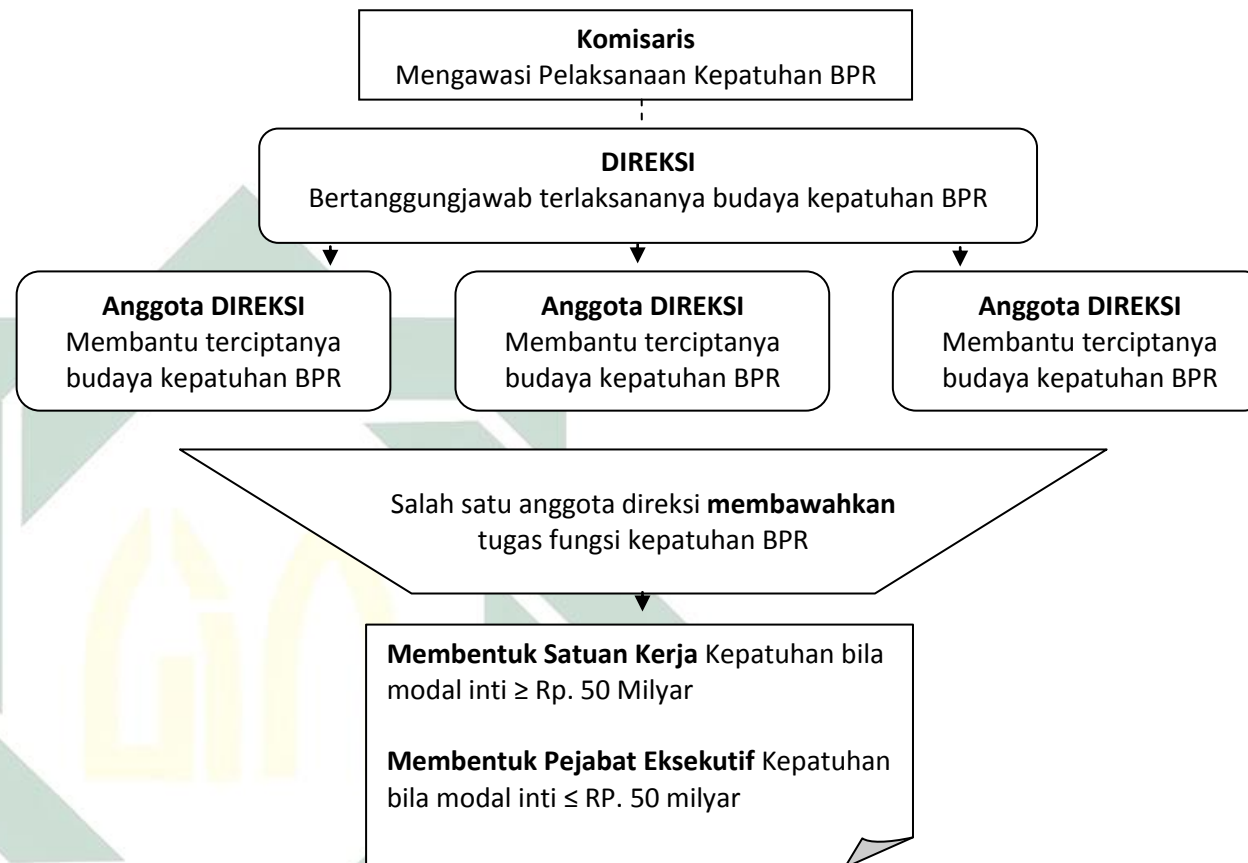
Aturan *Islamic prudential banking* pada BPRS dan hubungannya dengan kepatuhan syariah belum tersedia. Syariah pada operasional BPRS murni pada produk yang diluncurkan. Baik produk *funding* maupun produk *financing* sesuai

⁶⁶ Statistik Perbankan Syariah Desember 2017

⁷⁵POJK Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

ALUR KEPATUHAN BPR

SE OJK 06/SEOJK.03/2016 FUNGSI KEPATUHAN BPR



Bagan 2.2 Fungsi Kepatuhan Bank Bank Pembiayaan Rakyat

han Direksi dalam pelaksanaan pengelolaan BPR
orang direksi. 50% dari direksi memiliki pengam
2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan
syariah; 2 tahun sebagai pejabat di bidang pen
perbankan konvensional dan memiliki pengeta
ariah; 3 tahun sebagai direksi atau setingkat dir
ro syariah. Pendidikan formal minimal D3 atau
si memiliki sertifikat kompetensi kerja dari len
lambat 2 (dua) tahun sejak pengangkatan e

anggota direksi dilarang baik secara sendiri maupun bersama-sama memiliki saham 25% atau lebih dari modal disetor. Anggota direksi bertempat tinggal di sekitar lokasi BPRS; anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat pertama dengan pengurus BPRS lainnya, anggota dewan komisaris; anggota dewan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris.

dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain, kecuali sebagai pengurus organisasi / lembaga non profit sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai direksi BPRS dan harus melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan, anggota direksi dilarang memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada yang lain.⁷⁶

Kehati-hatian BPRS dalam menjalankan operasional bisnis wajib mengelola kesehatan lembaga dalam kategori baik. Pengukuran tingkat kesehatan BPRS antara lain dilihat dari “permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*), manajemen (*managemen*)”.⁸¹ Kelima

⁸¹ Pasal 3 PBI Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasar Prinsip Syariah

penilaian kesehatan BPRS tersebut dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Penilaian kualitatif yang dimaksud adalah penilaian terhadap faktor manajemen dan faktor-faktor hasil penilaian kuantitatif dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan. Sedangkan penilaian kuantitatif merupakan penilaian terhadap posisi, perkembangan dan proyeksi rasio-rasio keuangan BPRS. Pada saat penilaian BPRS pada posisi bulanan, triwulanan dan semester, maka perhatian terhadap rasio-rasio tersebut menjadi suatu kewajiban.

Penilaian permodalan meliputi penilaian mengenai pertama, kecukupan, proyeksi dan kemampuan permodalan dalam mengantisipasi risiko, kedua, fungsi intermediasi atas dana investasi dengan metode *profit sharing*. Selain permodalan, aset BPRS merupakan bagian penting yang dinilai kesehatannya. Diantaranya yang pertama, dari sisi kualitas aktiva produktif dan konsentrasi eksposur risiko; kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

Tujuan penilaian permodalan dan kualitas aset adalah meningkatnya rentabilitas BPRS. Hal yang dinilai antara lain pertama, kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba. Kedua, tingkat efisiensi operasional. Meningkatnya penyaluran pembiayaan harus memberikan dampak pada peningkatan keuntungan. Pembiayaan menguntungkan jika sirkulasi pembiayaan nasabah lancar. Meningkatnya keuntungan tidak berarti apa-apa bagi BPRS, jikalau pengelolaan operasional tidak dilakukan dengan efisien. Jika dua hal ini bisa diterapkan maka rentabilitas BPRS akan berhasil di dapat.

Upaya meningkatkan rentabilitas tentu mengandung berbagai kesulitan. Kesulitan yang berpeluang dihadapi oleh BPRS adalah kesulitan likuiditas. Penilaian terhadap likuiditas BPRS dilakukan dengan yang pertama, kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dan potensi *maturity mismatch*; kedua, kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas. Mayoritas sumber dana BPRS adalah dari dana masyarakat golongan menengah. Sehingga kemampuan menyerap *funding* tidak sebesar bank syariah. Dampak dari hal ini maka BPRS harus senantiasa mengelola pembiayaan dengan tenor yang sesuai, jika tidak maka terjadi *mismatch*. Apalagi BPRS memiliki keterbatasan dan larangan dalam mengelola neraca pembayaran. Hal ini berdampak pada sumber dana murah yang dikelola tidak berpeluang didapat. Sumber utama *funding* adalah dari masyarakat menengah dan bawah.

Hal lain yang tak kalah pentingnya dalam penilaian kesehatan BPRS adalah terkait dengan penilaian faktor manajemen. Penilaian yang dilakukan antara lain mengenai pertama, kualitas manajemen umum, termasuk pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain; kedua, penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko BPRS, ketiga, kepatuhan BPRS terhadap prinsip syariah dan fungsi sosial. Fungsi sosial yang dimaksud adalah peranan bank dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf uang dan lain-lain yang relevan.

Kehati-hatian BPRS dilihat dari unsur manajemen dan Sumber daya manusia serta kesehatan BPRS. BPRS juga diwajibkan patuh terhadap aturan

Batas maksimum yang dianggap kategori aman dalam pengelolaan pembiayaan antara lain dengan memiliki batas atas bawah (*Loan to Funding Ratio*) LFR sebesar 78% dan batas atas LFR sebesar 92%.⁸⁴

D. Manajemen Risiko pada BPRS

Risiko yang dihadapi BPRS dalam mengelola dana *funding* maupun *financing* menjadi pilihan dalam menjalankan bisnis perbankan agar tumbuh sehat dan mampu menjaga *sustainability* bisnis. Greuning dan Iqbal menyebutkan risiko yang menjadi penting diperhatikan salah satu diantaranya adalah risiko keuangan.

⁸² Pasal 2 dan 4 POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPRS

⁸³ Pasal 47 POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

⁸⁴ Pasal 11 PBI Nomor 11/11/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum Konvensional

Pengawasan risiko dalam pengelolaan perbankan sebagaimana dalam *credit rating* menurut Salem adalah “*Credit ratings and supervisory risk assessments such as the Basel Accord and CAMELS (Capital adequacy-Asset quality-Management ability-Earnings level-Liquidity Sensitivity to market*

⁸⁷Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Model Bisnis Perbankan Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2012), 62

risks)".⁸⁸ BPRS dalam pengawasan risiko menggunakan aturan tersebut guna memastikan lembaga tersebut sehat atau sebaliknya. BPRS senantiasa memastikan kondisi permodalan berupa *Capital Adequacy Ratio* (CAR), kondisi asset dalam kualitas lancar, kualitas manajemen, profitabilitas yang didapat, likuiditas aman untuk operasional dan pembayaran jangka pendek dan panjang, dan senantiasa memikirkan sensitifitas resiko pasar. Pengelolaan risiko memiliki jangkauan yang berbeda. Menurut Salem, risiko pasar memerlukan perhatian jangka pendek. Hal ini disebabkan karena bank syariah berhadapan dengan persaingan baik dengan bank konvensional maupun sesama bank syariah, sedangkan risiko operasional maupun pembiayaan, bisa dilakukan pengawasan jangka waktu yang lebih lama, misalnya adalah bulanan, triwulanan maupun tahunan.

E. Pembiayaan pada BPRS

Pembiayaan pada BPRS merupakan ruh dalam keberlangsungan bisnis BPRS. Pembiayaan disalurkan pada kebutuhan produktif maupun konsumtif masyarakat. Namun demikian segmentasi pasar pada BPRS dihadapkan persaingan dengan pada lembaga yang lebih besar yaitu bank syariah dan bank konvensional. Sedangkan secara mikro segmentasi pembiayaan BPRS bersaing dengan koperasi syariah, BMT, maupun lembaga keuangan mikro lainnya. Bahkan tidak sedikit lembaga zakat yang menyediakan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat tidak mampu namun masih memiliki usaha bisnis.

⁸⁸Rania Abdelfattah Salem, *Risk Management for Islamic Banks* (Edinburgh University: Edinburgh University Press, 2013), 66.

elektronik (*electronic money*) dan kegiatan lain yang dilakukan oleh lembaga penerbit. Selain itu BPRS juga dapat memberikan jasa yang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan masyarakat. BPRS dapat memberikan BPRS di bank umum syariah maupun unit usaha syariah. BPRS dapat memberikan *safe deposit box* sehingga dengan ini BPRS dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi. BPRS dapat menjual produk asuransi syariah kepada nasabah yang membutuhkan. BPRS dapat menerima titipan dalam rangka pelayanan jasa pemeliharaan rumah, ran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak.⁹⁰ BPRS dapat memberikan dana pada BPRS antara lain pembiayaan dengan berbagai akad (misalnya *mudharabah*, *musharākah*, *musharākah mutanaqisah*), *ijarah*, *ijarah mutahiya bit tamlik*, multijasa), p

ran dana pada BPRS antara lain pembiayaan dan
ubah, musharākah, musharākah mutanaqisah).
arah, ijarah mutahiya bit tamlik, multijasa), p

⁹¹ Ibid.,

guntingkan. Penyaluran dana bagi BPRS merupakan jawaban atas
 bah penyimpanan dana. BPRS harus bisa memastikan dana yang
 ntu memberikan keuntungan dan kembali ke bank dalam waktu y
 yaluran pembiayaan akan diputuskan atau diberikan apabila suda
 isis kelayakan pembiayaan. Pedoman siklus penguatan dan pengam
 urut Choudhry⁹² adalah: 1) Mengenal nasabah, 2) Keamanan pe
 gan *collateral*. 3) Pembatasan peminjaman *sub prime*. Aset yang tida
 agunan tidak mencukupi maka harus tunduk pada aturan. Jenis aset
 g pertama mengalami kegagalan ketika ekonomi mengalami penurun
 Bank syariah harus memastikan bahwa dana yang disalurkan

guntingkan. Penyaluran dana bagi BPRS merupakan jawaban atas
 bah penyimpanan dana. BPRS harus bisa memastikan dana yang
 ntu memberikan keuntungan dan kembali ke bank dalam waktu y
 yaluran pembiayaan akan diputuskan atau diberikan apabila suda
 isis kelayakan pembiayaan. Pedoman siklus penguatan dan pengam
 urut Choudhry⁹² adalah: 1) Mengenal nasabah, 2) Keamanan pe
 gan *collateral*. 3) Pembatasan peminjaman *sub prime*. Aset yang tida
 agunan tidak mencukupi maka harus tunduk pada aturan. Jenis aset
 g pertama mengalami kegagalan ketika ekonomi mengalami penurun
 Bank syariah harus memastikan bahwa dana yang disalurkan

guntingkan. Penyaluran dana bagi BPRS merupakan jawaban atas
bah penyimpanan dana. BPRS harus bisa memastikan dana yang
npu memberikan keuntungan dan kembali ke bank dalam waktu y
yaluran pembiayaan akan diputuskan atau diberikan apabila suda
isis kelayakan pembiayaan. Pedoman siklus penguatan dan pengam
urut Choudhry⁹² adalah: 1) Mengenal nasabah, 2) Keamanan pe
gan *collateral*. 3) Pembatasan peminjaman *sub prime*. Aset yang tida
agungan tidak mencukupi maka harus tunduk pada aturan. Jenis aset
g pertama mengalami kegagalan ketika ekonomi mengalami penurunan
Bank syariah harus memastikan bahwa dana yang disalurkan

guntingkan. Penyaluran dana bagi BPRS merupakan jawaban atas
bah penyimpanan dana. BPRS harus bisa memastikan dana yang
mpu memberikan keuntungan dan kembali ke bank dalam waktu y
yaluran pembiayaan akan diputuskan atau diberikan apabila suda
isis kelayakan pembiayaan. Pedoman siklus penguatan dan pengam
urut Choudhry⁹² adalah: 1) Mengenal nasabah, 2) Keamanan pe
gan *collateral*. 3) Pembatasan peminjaman *sub prime*. Aset yang tida
agungan tidak mencukupi maka harus tunduk pada aturan. Jenis aset
g pertama mengalami kegagalan ketika ekonomi mengalami penurunan
Bank syariah harus memastikan bahwa dana yang disalurkan

guntingkan. Penyaluran dana bagi BPRS merupakan jawaban atas
bah penyimpanan dana. BPRS harus bisa memastikan dana yang
mpu memberikan keuntungan dan kembali ke bank dalam waktu y
yaluran pembiayaan akan diputuskan atau diberikan apabila suda
isis kelayakan pembiayaan. Pedoman siklus penguatan dan pengam
urut Choudhry⁹² adalah: 1) Mengenal nasabah, 2) Keamanan pe
gan *collateral*. 3) Pembatasan peminjaman *sub prime*. Aset yang tida
agungan tidak mencukupi maka harus tunduk pada aturan. Jenis aset
g pertama mengalami kegagalan ketika ekonomi mengalami penurunan
Bank syariah harus memastikan bahwa dana yang disalurkan

guntingkan. Penyaluran dana bagi BPRS merupakan jawaban atas
 bah penyimpanan dana. BPRS harus bisa memastikan dana yang
 ntu memberikan keuntungan dan kembali ke bank dalam waktu y
 yaluran pembiayaan akan diputuskan atau diberikan apabila suda
 isis kelayakan pembiayaan. Pedoman siklus penguatan dan pengam
 urut Choudhry⁹² adalah: 1) Mengenal nasabah, 2) Keamanan pe
 gan *collateral*. 3) Pembatasan peminjaman *sub prime*. Aset yang tida
 agunan tidak mencukupi maka harus tunduk pada aturan. Jenis aset
 g pertama mengalami kegagalan ketika ekonomi mengalami penurunan
 Bank syariah harus memastikan bahwa dana yang disalurkan

Capacity pada analisa pembiayaan merupakan kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha sehingga usaha agar memperoleh keuntungan. Keuntungan besar yang diperoleh nasabah memberikan peluang nasabah akan dengan mudah memutuskan untuk melakukan pembiayaan ulang kepada bank syariah. Bank syariah pun nyaman bertransaksi dengan nasabah tersebut. Bank tanpa mengeluarkan biaya promosi untuk mendapatkan nasabah, karena nasabahnya

[illegible]

Kafālah menurut istilah adalah mempersatukan tanggungjawab dengan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak baik berkaitan dengan jiwa, materi, maupun pekerjaan. *Kafālah* dalam definisi lain adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Sedang *rahn* menurut bahasa adalah menahan. *Rahn*/gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas barang

⁹⁶Ibid., 297 - 317.

Aturan lebih spesifik dalam mengamankan pembiayaan yaitu prinsip kehati-hatian pada pemberian pembiayaan. Prinsip kehati-hatian pada pembiayaan BPRS mengacu pada kehati-hatian dalam perkreditan di BPR. Prinsip kehati-hatian pada pemberian pembiayaan mencakup, “kebijakan dalam pemberian kredit, penilaian kualitas kredit, dan profesionalisme serta integritas pejabat di bidang perkreditan”⁹⁷.

⁹⁷ Bab II, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor.14/ 26 /DKBU Tanggal 19 September 2012Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi BankPerkreditan Rakyat

⁹⁸ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

⁹⁸ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Perwujudan *Islamic prudential banking* pada pemberian pembiayaan dengan adanya kehati-hatian pemberian pembiayaan perspektif syariah, dan diturunkan menjadi SOP pembiayaan perspektif syariah. Sebagai contoh adalah dalam awal akad maka proses penandatanganan akad betul memperhatikan prinsip ‘*antaraḍīn-minkum* (suka sama suka). Muncul baik secara verbal yang mencerminkan keadilan dalam berakad. Ada proses tawar menawar, margin dan nisbah bagi hasil yang mencerminkan keadilan bagi nasabah dan bank syariah. contoh lain dalam hal pembiayaan *murabahāh*, maka sejatinya proses jual beli terjadi dalam pembiayaan *murabahāh*. Bank syariah dipastikan ada peran langsung dalam proses jual beli yang sedang berlangsung. Minimal dalam proses pembiayaan, bank syariah menjalin kerjasama dengan toko, penyedia jasa perdagangan.

⁹⁹Marin Marinov, ed., *Marketing in the Emerging Markets of Islamic Countries* (Basingstoke [England] ; New York: Palgrave Macmillan, 2007), 2.

Pemasaran bank syariah lebih spesifik menekankan pada pemasaran yang dilakukan secara mutlak tidak menyimpang dari syariah, dan maksimalisasi nilai menjadi prioritas, bukan hanya semata-mata untuk memaksimalkan profitabilitas.¹⁰⁰ Dalam hal harga, Islam melarang menaikkan harga tanpa meningkatnya kualitas atau kuantitas produk. Islam melarang penipuan. Produsen dan pengecer wajib memperkenalkan kepada pelanggan atas kualitas produk. Promosi yang dilakukan dengan menggunakan kepribadian wanita, gambar sensual, dan klaim berlebihan dilarang oleh Islam. Etika pemasaran Islami menetapkan tujuan utamanya untuk menciptakan nilai dan meningkatnya layanan kepada pelanggan.¹⁰¹ Pemasaran terhadap bank syariah sedemikian rupa sehingga memberikan kualitas layanan maupun produk yang dikeluarkan bank syariah secara detail, baik menyangkut harga, angsuran, etika layanan sehingga memunculkan keadilan bagi bank syariah maupun kepada nasabah. Etika bisnis yang mengandung unsur moralitas menurut Bowie adalah menyangkut kesetiaan, kejujuran dan juga meningkatkan kehormatan.¹⁰²

¹⁰⁰Ibid., 3.
¹⁰¹Ibid., 4.
¹⁰²Norman Bowie, *Business Ethics in the 21st Century*, vol. 39, Issues in Business Ethics (Dordrecht: Springer Netherlands, 2013), 5, accessed November 11, 2019, <http://link.springer.com/10.1007/978-94-007-6223-7>.

¹⁰²Norman Bowie, *Business Ethics in the 21st Century*, vol. 39, Issues in Business Ethics (Dordrecht: Springer Netherlands, 2013), 5, accessed November 11, 2019, <http://link.springer.com/10.1007/978-94-007-6223-7>.

Pembiayaan yang disalurkan dengan memperhatikan unsur syariah pada setiap analisa kelayakan pembiayaan, akan berdampak pada kesadaran nasabah melakukan pembiayaan. Dengan demikian maka pembayaran angsuran dan keuntungan tepat waktu serta semangat usaha nasabah meningkat. Hal demikian aktif pada BPRS akan sesuai harapan. Aktiva BPRS terdiri dari aktiva produktif dan aktiva non produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana BPRS untuk mendapatkan penghasilan, antara lain dalam bentuk pembiayaan (baik dalam bentuk skim jual beli maupun bagi hasil) dan penempatan pada bank lain sesuai prinsip syariah. Sedangkan pembiayaan aktiva non produktif adalah aktiva non produktif yang memiliki potensi kerugian, yaitu dalam bentuk agunan yang diambil alih.¹⁰³ Kualitas aktiva produktif pada pembiayaan digolongkan menjadi kualitas lancar, kurang lancar, diragukan dan macet yang didasarkan pada ketepatan dan atau kemampuan membayar nasabah.¹⁰⁴ Kualitas aktiva inilah yang harus dikelola oleh BPRS sehingga pembiayaan yang disalurkan tidak mengalami masalah sehingga berdampak pada peningkatan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*).

¹⁰⁴ Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva BPRS

Syarat agunan yang bisa digunakan sebagai pengurang PPAP memiliki kategori sebagai berikut:

- a), 100% dari nilai tertanggung untuk fasilitas ditanggung pemerintah Indonesia, b) 100% untuk agunan tunai berupa uang kertas asing, emas, tabungan dan atau deposito yang diblokir pada BPRS bersangkutan disertai surat kuasa pencairan. c) 80% dari nilai tertanggung untuk fasilitas yang ditanggung pemerintah daerah. d) 80% nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah serta bukti kepemilikan sertifikat milik atau sertifikat hak guna bangunan yang diikat dengan hak tanggungan. e) 70% dari nilai hasil penilaian untuk agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan kurang dari 12 bulan f) 60% dari nilai

[illegible]

Selain memperhatikan risiko kesehatan bank, pembiayaan dilakukan dalam rangka untuk menjaga efisiensi. Menjaga efisiensi dengan memastikan jangka waktu pembiayaan yang tepat. Untuk menempatkan risiko dalam daftar jatuh tempo yang relevan menurut Choudhry¹¹¹, memilih salah satu dari dua pendekatan, yaitu: 1) durasi aktual dari aset; 2) Durasi likuiditas.

¹¹¹Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah....*

berjalan optimal. Seperti halnya dalam *financing*, Mathur¹¹² bahwa pembiayaan akan dijamin lancar apabila tidak terjadi *a-symmetric information* antara nasabah dengan bank. Kehati-hatian atas hal ini adalah peran manajemen dalam mengelola informasi agar kedua belah pihak terbuka, sehingga kepastian bisnis bisa diterima baik oleh nasabah maupun bank. Hal yang dibutuhkan oleh bank dan nasabah dalam layanan jasa adalah kepercayaan (*trust*).

Pemenuhan kehati-hatian dalam perbankan syariah berhubungan dengan pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kepatuhan ini menurut Ashraf, Robson dan Sekhon¹¹³ mengandung unsur kepercayaan baik terhadap seseorang maupun institusi dan keyakinan mempengaruhi keputusan memilih bank syariah di Pakistan. Kepercayaan baik terhadap seseorang terkait dengan hubungan interpersonal, sedang kepercayaan terhadap institusi menyangkut hubungannya dengan bank. Kepercayaan dan keyakinan bagian dari satu kesatuan dalam penegakan prinsip universal Islam. Pemenuhan kehati-hatian dalam kepatuhan terhadap prinsip syariah menurut Mamadolimova, Ambiah dan Lukose¹¹⁴ dengan menerapkan model transaksi yang sesuai dengan akad. Pelaksanaan *contract* sesuai dengan Fatwa DPS dan aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

¹¹²Mathur, “Prudential Practices and Financial Stability.”...

¹¹³ Ashraf, Robson, and Sekhon, “Consumer Trust and Confidence in the Compliance of Islamic Banks.”...

¹¹⁴ Mamadolimova, Ambiah, and Lukose, “Modeling Islamic Finance Knowledge for Contract Compliance in Islamic Banking.”...

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) akan berada pada pengawasan intensif apabila memiliki ciri dan karakteristik seperti *Pertama*, rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) lebih besar sama dengan 4% dan kurang dari 8%, kedua, *Cash ratio* selama enam bulan terakhir lebih besar sama dengan 3 dan kurang dari 4 persen, *Ketiga*, tingkat kesehatan bank masuk kategori kurang sehat secara berturut-turut sampai dengan 3 bulan.¹¹⁷ Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) per 1 Januari 2020 harus terpenuhi sebesar 12 persen dari Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR).¹¹⁸

¹¹⁵Ullah, Harwood, and Jamali, “‘Fatwa Repositioning.’”...

¹¹⁷ POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

118 Pasal 2 POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Semangat kehati-hatian yang dilakukan oleh perbankan diharapkan mampu menghubungkan antara bank dengan *stakeholders*. Sebagaimana dalam *Signaling theory*¹²⁰ diharapkan bahwa *prudential banking* dan kepatuhan terhadap prinsip syariah mampu menggambarkan (memberi sinyal) kepada nasabah maupun pemegang saham. Selain itu juga para *stakeholders* BPRS memiliki pemahaman yang sejalur dan menjadi evaluasi bagi karyawan untuk menindaklanjuti atas sinyal informasi yang ada.

Kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan aman selain dilakukan pada setiap analisa pembiayaan, juga terkait penyebaran portofolio pembiayaan. Hal ini difungsikan untuk memecah risiko agar pembiayaan tidak terpusat pada beberapa orang. Penyebaran portofolio pembiayaan diatur dalam batas maksimum penyaluran dana pada BPRS. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) merupakan persentase maksimum realisasi penyaluran dana yang diperkenankan terhadap modal BPRS. Penyaluran dana yang dimaksud adalah “pemberian pembiayaan dan penempatan dana antar bank”.¹²¹ Upaya pengelolaan risiko dilakukan baik pada penyaluran dana ke masyarakat maupun alokasi dana yang disalurkan antar sesama lembaga perbankan. Penempatan dana antar bank adalah

¹²¹ Pasal 1 PBI Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Waktu Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Kehati-hatian dalam penyaluran dana diwujudkan dalam aturan batas maksimum penyaluran dana. Penyaluran dana kepada pihak terkait bank ditetapkan paling tinggi 10 persen dari modal BPRS¹²². Pihak terkait bank adalah perorangan atau perusahaan / badan yang mempunyai hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan BPRS. Diantaranya adalah

Batasan di atas dapat dimaknai bahwa BPRS harus memperhatikan pengajuan pembiayaan yang berasal dari internal karyawan, dan atau perusahaan yang dimiliki internal BPRS. Lembaga harus mengatur agar ada kesempatan yang sama untuk bisa mengakses 10 persen dari modal BPRS jika internal bank memanfaatkan pembiayaan.

¹²³ Pasal 7 PBI Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Waktu Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pembiayaan yang mengalami permasalahan diperlukan solusi yang harus dilakukan oleh BPRS antara lain dengan “penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restucturing*)”.¹²⁶ Variasi permasalahan pada setiap pembiayaan dan potensi yang terjadi pada nasabah menyebabkan solusi yang berbeda. Solusi yang ditawarkan terkait dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) merupakan “perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *muḍārabah* atau *musharākah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar”.¹²⁷ Perubahan penjadwalan dapat dimaknai terkait dengan waktu, yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah membayar. Jika

¹²⁶ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPBS tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPBS Tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

[illegible]

Permasalahan yang terjadi pada pembiayaan yang dialami nasabah ada kalanya karena faktor kemampuan nasabah. Jika kemampuan nasabah menjadi kendala, Bank Indonesia memberikan solusi berupa persyaratan kembali (*reconditioning*). Persyaratan kembali yang dimaksud adalah “perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank”.¹²⁸ Persyaratan kembali pada pembiayaan bermasalah adalah perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan *muḍārabah* atau *musharākah*, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* atau *musharākah*, dan atau pemberian potongan. Pada pembiayaan jual beli yang berlaku adalah perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran karena perubahan jangka waktu, perubahan jangka waktu, pemberian potongan atas margin yang harus dibayar kepada bank syariah.

¹²⁸ Ibid.,,

membayar, maka akad diganti dengan bagi hasil. Akad bagi hasil tidak diperuntukkan pada pembiayaan jangka pendek (kurang dari satu tahun). Pembiayaan ini tidak memiliki keharusan untuk membayar pokok pembiayaan secara berangsur, sehingga pokok pembiayaan dapat dibayar selesai masa pembiayaan. Selain itu juga akad bagi hasil dapat dilakukan dengan jangka waktu panjang, sehingga pokok pembiayaan akan rendah. Kondisi ini memungkinkan nasabah memenuhi kewajibannya dalam membayar kepada BPRS. Namun demikian perlu dipertimbangkan risiko yang akan terjadi pada saat pokok pembiayaan berada di akhir masa pembiayaan. Potensi kemampuan mengembalikan menjadi dasar dalam mengenali pembiayaan tersebut.

Ketiga strategi penanganan pembiayaan di atas, dimungkinkan pembiayaan bisa kembali dengan baik. Potensi pengembalian tersebut disebabkan karena adanya niat baik dari nasabah untuk mengembalikan. Jika nasabah tidak memiliki potensi pengembalian karena ketidakmampuan nasabah, maka strategi yang dilakukan adalah melakukan komunikasi agar nasabah mau menjual jaminan sehingga bisa digunakan untuk menutup pembiayaan yang masih kurang. Namun jika nasabah tidak berpotensi mengembalikan karena ketidakmampuan maupun ketidakmauan nasabah dalam waktu yang ditentukan, maka strategi *write off* dilakukan dengan memindah pembiayaan nasabah dari neraca *on balance sheet* ke dalam neraca *off balance sheet* dengan harapan tidak adanya kemampuan mengembalikan tersebut tidak memberikan dampak negatif terhadap rasio keuangan lembaga.

**PELAKSANAAN *ISLAMIC PRUDENTIAL BANKING* PADA
PEMBIAYAAN DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**

A. Karakteristik Informan

Komisaris dibutuhkan dalam penelitian ini dengan tujuan bahwa komisaris merupakan bagian dari pemilik modal yang dikelola oleh BPRS, sehingga diharapkan mengetahui harapan dan sinergitas dalam mendukung terlaksananya bangunan *Islamic prudential banking*. Begitu juga direksi, direksi

Informan berikutnya adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS diharapkan dengan pemahaman syariah dan pengawasan yang dilakukan, berhasil diketahui sejauh mana keterkaitan DPS dalam upaya mewujudkan bahwa syariah menjadi garda depan dalam operasional bagi manajemen BPRS. Sedangkan *Account Officer* (AO) yang berfungsi sebagai tangan kanan direksi dalam mendekati para nasabah pembiayaan, maka prinsip syariah menjadi sarana yang harus disampaikan kepada nasabah, sehingga makna syariah betul dirasakan oleh nasabah.

1. Karakteristik Informan pada BPRS Karya Mugi Sentosa (KMS) Surabaya

[illegible]

Tabel 3.1 Karakteristik Informan Penelitian pada BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya

No	Nama	Jabatan	Usia	Alamat Rumah	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Diklat yg pernah diikuti	Pekerjaan lain-lain di luar jabatannya di BPRS
1	Soeparno Widjihadjo	Komisaris	69	Gayungsari Timur I B Blok MGG 11 Surabaya	S-1	12 tahun	Sertifikasi Komisaris	
2	Didik Supardana	Direksi	55	Aspol Ketintang D/ 13 Surabaya	S-1	12 tahun	Sertifikasi Direksi	
3	Sadullah Syarofi	DPS	41	Dsn Karangnongko RT 5 RW 2 Mojokerto	S-2	8 tahun	Sertifikasi DPS	Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya
4	M. Aly Fahmi	BM Surabaya	31	Dsn Tanjungwidoro RT 6 RW 3 Gresik	S-1	7 tahun	Pembiayaan Bermasalah	

Proses penggalan data kepada informan berawal sejak pra penelitian. Pada awal pra penelitian, penulis mengirimkan surat permohonan pra penelitian, dan beberapa waktu kemudian diberikan kesempatan untuk wawancara dengan direksi. Waktu tak berselang lama, bapak direksi memberi waktu bertemu untuk wawancara. Pada kesempatan yang sama bisa langsung wawancara dengan AO. Sementara dengan komisariss dan DPS dijadwalkan pada hari yang lain sesuai jadwal kehadiran di kantor.

Penelitian pada BPRS Jabal Nur Surabaya yang beralamatkan di Jl Gayungsari Barat Surabaya penulis lakukan berawal dengan mengirimkan surat izin pra penelitian. Beberapa waktu yang tidak lama, penulis diberi kesempatan wawancara dengan direksi (Ibu Pram Puji Rahayu) dan diberikan izin untuk selanjutnya melakukan penelitian. Penelitian disertasi penulis lakukan pada tanggal 04 Januari di BPRS Jabal Nur Surabaya. Pada saat itu wawancara dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan *account officer*. Pertama kali wawancara penulis lakukan dengan dewan direksi, selebihnya Dewan Komisaris hadir kurang lebih 30 menit dan bersambung dengan *Account Officer* (AO). Sedangkan dengan DPS dilakukan wawancara langsung di kampus UINSA Surabaya. Berikut karakteristik informan pada BPRS Jabal Nur antara lain:

Tabel 3.2 Karakteristik Informan Penelitian pada BPRS Jabal Nur Surabaya

No	Nama	Jabatan	Usia	Alamat Rumah	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Diklat yg pernah diikuti	Pekerjaan lain-lain di luar jabatannya di BPRS
1	Mochamad Kodjib	Komisaris	66 Thn	Desa Keboharan RT/RW 04/01 Kec Krian Kab Sidoarjo	S1 Ekonomi Manajemen	7 Tahun		-
2	Agus Mulyana	Direksi	44 Thn	Kejapanan RT/RW 001/013 Kejapanan Gempol Pasuruan	S1 Ekonomi Akuntansi	2 Tahun	- Penyegaran Sertifikasi Kualifikasi Direksi BPRS - Upgrading Direksi ke 4 Kompartemen BPRS DPW Jatim - Workshop Sertifikasi dan Capacity Building DPS serta Rapat Kerja Asosiasi Dewan Pengawas Syariah (ADPASI) Regional 3 Jatim - Evaluasi Kinerja BPRS Tahun 2018	-
3	Prof. Ahmad Zahro	DPS	64 Thn	Jalan Jatisari Besar 71 C Pepelegi, Waru Sidoarjo	Pasca Sarjana	1 Tahun		Dosen Pasca Sarjana UINSA, Imam Besar Masjid Al Akbar
4	Ariyanto Wahyu Nugroho	AO	45 Thn	Wisma Gunung Anyar Jl. Wiguna Tengah X/6 Surabaya	S1 Hukum	3 Tahun		-

Sumber: Dari BPRS Jabal Nur Surabaya

Penggalan data pada BPRS Bakti Makmur diawali dengan memastikan bahwa ada izin diperkenankan untuk melakukan penelitian. Saat itu saya menghubungi ibu Dwi Emi Subekti, yang sama-sama 1 grup dalam pusat kajian ekonomi dan bisnis Islam, akhirnya peneliti *add* beliau, sehingga kami berteman. Berkat pertemanan itu, dengan mudah peneliti menyampaikan tujuan saya untuk penelitian. Meski di awal pertemuan, peneliti tidak langsung bertemu beliau, karena kesibukan beliau, namun bertemu dengan bapak Jaenuri atas rekomendasi beliau. Pada penelitian yang sesungguhnya setelah proposal diujikan, peneliti mengajukan izin kepada ibu Dwi Emi Subekti untuk dibantu proses penelitian, akhirnya peneliti dijadwalkan ketemu beliau dan alhamdulillah dalam satu sesi rapat beliau. Karakteristik informan pada BPRS Bakti Makmur Indah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Karakteristik Informan Penelitian BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo

No	Nama	Jabatan	Usia	Alamat Rumah	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Diklat yg pernah diikuti	Pekerjaan lain-lain di luar jabatannya di BPRS
1	Habiburrochman	Komisaris	45	Jl. Karang Menjangan 2/24 Surabaya	Fak. Ekonomi Univ. Airlangga Sarjana (S2)	3 (tiga) th	- Service Excellence in Syariah Banking - Workshop “Bagaimana Mengelola Internal Audit Departemen & Mencegah serta Mendeteksi Kecurangan dan kejahatan dengan computer - Perbankan Syariah “Smart Course Training - Pelatihan Asset Liability Management (ALMA) Bank Syariah - Pelatihan Pembiayaan Syariah - Uji Sertifikasi Ahli Pengadaan barang dan jasa - Ujian Sertifikasi Akuntansi Publik - TOT Pengelolaan Keuangan Desa	- Dosen Akuntansi Univ. Airlangga - KAP Erfan & Rahmawan

Lanjutan Tabel 3.3

No	Nama	Jabatan	Usia	Alamat Rumah	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Diklat yg pernah diikuti	Pekerjaan lain-lain di luar jabatannya di BPRS
2	Dwi Emi Subekti	Direksi	49	Perum Kedungturi Permai K-23 Taman, Sidoarjo	Fak Kehutanan IPB	3 (tiga) tahun	- Analisa Kredit Usaha Kecil - Pelatihan Senior Officer BPRS se Indonesia - Manajemen Operasional untuk Komisaris & Direksi BPRS se wil KBI Sby - Pelatihan Mudharabah AO Bank Syariah - Pelatihan Produk <i>murabahah</i> BPRS wil Indonesia Timur - Pelatihan Persiapan Implementasi Manajemen risiko bagi BPR - Seminar Pengelolaan & Pengendalian risiko Operasional Bank Syariah secara Efektif & Efisien - Fundamental Leadership Program - Workshop on Islamic Good Corporate Governance - Sertifikasi Direski - Pelatihan Analisa Kredit BPR	-

Lanjutan Tabel 3.3

No	Nama	Jabatan	Usia	Alamat Rumah	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Diklat yg pernah diikuti	Pekerjaan lain-lain di luar jabatannya di BPRS
3	Roem Rowi	DPS	72	Jl. Wisma Pagesangan VII/7 Surabaya	Fak. Ushuluddin UI Madinah dan Univ Al Azhar Cairo	19 (Sembilan belas) tahun	- Pelatihan DPS_BPRS - Ijtima Samawi BPD Syariah - Sertifikasi DPS	- Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya
4	Tomy Tri Widodo	AO	35	Tropodo RT 05 RW 03, Tropodo, Krian, Sidoarjo	Sarjana (S1) Fak. Ekonomi Univ. Muhammadiyah Sidoarjo	7(tujuh) tahun	- Analisa Pembiayaan Bank Syariah - Dasar-Dasar Perbankan Syariah - Selling Skill & Negotiation Skill - Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah - Akad- akad Bank Syariah - Service Excellence	-

Sumber: Data dari BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo

Penelitian disertasi pada BPRS Unawi Barokah Sidoarjo berawal dari pra penelitian dengan mengirimkan surat permohonan pra penelitian yang diterima oleh ibu Lilik (staf bagian legal). Hasil pra penelitian dipersilahkan untuk dikirim via email, dan dijawab dengan email pula dengan memberikan kepastian bahwa penulis diizinkan untuk melakukan penelitian disertasi. Setelah proposal diujikan, saya kembali hadir untuk memasukkan surat izin penelitian yang sesungguhnya dan diterima oleh ibu Lilik yang sama. Waktu tak berselang lama, diberi kesempatan untuk bertemu untuk wawancara. Wawancara penulis lakukan dengan AO, dewan komisaris, DPS dan direksi. Selama penelitian, penulis diperlakukan dan disambut dengan ramah, diberi makan siang, *snack* dan minum layaknya tamu lembaga. Data-data yang penulis harapkan diberikan dalam bentuk soft copy oleh bapak calon direksi. Berikut karakteristik informan pada BPRS Unawi Barokah Sidoarjo:

Tabel 3.4 Karakteristik Informan BPRS Unawi Barokah Sidoarjo

No	Nama	Jabatan	Usia	Alamat Rumah	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Diklat yg pernah diikuti	Pekerjaan lain-lain di luar jabatannya di BPRS
1	Bambang Tjatur Utomo	Komisaris	67	Ruko Wadung Asri Permai B-7, Jl. Raya Wadungasri No. 46-48, Wadungasri, Waru, Sidoarjo.	S2	9 Tahun		Tidak ada
2	Masrifai	Direktur Utama	39	Ruko Wadung Asri Permai B-7, Jl. Raya Wadungasri No. 46-48, Wadungasri, Waru, Sidoarjo.	S1	1 Tahun		Tidak ada
3	Muslichudiin	DPS	60	Ruko Wadung Asri Permai B-7, Jl. Raya Wadungasri No. 46-48, Wadungasri, Waru, Sidoarjo.	S1	9 Tahun		Tidak ada
4	Adi Nugraha	AO / Direktur	31	Ruko Wadung Asri Permai B-7, Jl. Raya Wadungasri No. 46-48, Wadungasri, Waru, Sidoarjo.	S1	1 Tahun		Tidak ada

Sumber: Data dari BPRS Unawi Barokah Sidoarjo

Penelitian disertasi pada BPRS Mandiri Sukses beralamatkan di Ruko Andalusia Gresik. Awal pra penelitian, penulis mendapatkan nomor telepon dari sesama kolega di IAIN Tulungagung (Rokhmad Subagyo, M.E.I.). Setelah berkomunikasi dengan direksi (bapak Samsun Ma'arif), alhamdulillah peneliti dijadwalkan untuk bertemu, disambut baik.

[illegible]

Tabel 3.5 Karakteristik Informan pada BPRS Mitra Mandiri Sukses Gresik

No	Nama	Jabatan	Usia	Alamat Rumah	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Diklat yg pernah diikuti	Pekerjaan lain-lain di luar jabatannya di BPRS
1	Moch Edy Prayitno	Komisaris		Cipinang Muara IIIHH/ 13 Rt 004 / Rw 008 Ds Cipinang muara jatinegara jakarta Timur	SE,MBA, MH	5 Tahun	Sertifikasi Komisaris	Komisaris Anak Perusahaan Pagadaian / POJ Komisaris Utama BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo
2	Samsun Ma'arif	Direksi	38	Perum Citra Puri Permata No B25 Rt 06 / Rw 03 Kertosari Babadan - Ponorogo	Sarjana Ekonomi	5 Tahun	-Sertifikasi Direksi - PDBS - Leadership - ManRisk - Tata Kelola GCG - Pemasaran	Training Skills marketing
3	Prof. Dr. Raditya Sukmana, S.E, M.A.	DPS		Surabaya	S3 / Doktor Profesor	6 Tahun	Sertifikasi DPS	Dosen Dan Akademisi Aggota DPS Asbisindo
4	Nur Sungkowo Sungkowo	AO		Ds Sukolilo Kecamatan Sukodadi Lamongan	Sarjana Pendidikan	4 Tahun	-Pemasaran -Aanalisa Pembiayaan - PDBS	-

Sumber: BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik

Penggalan data pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik penulis awali saat pra penelitian yang memastikan bahwa ada izin dari lembaga untuk peneliti melakukan penelitian. Pertama kali peneliti hadir di Gresik untuk mengirimkan surat pra penelitian, dan dijadwalkan pada hari yang lain. Pada penelitian yang sesungguhnya setelah proposal diujikan, penulis dijadwalkan ketemu beliau dan *alhamdulillah* bisa wawancara dengan *account officer*, dan ibu Rismarini selaku direksi, didampingi oleh ibu Ragil selaku divisi manajemen risiko dan kepatuhan. Sedangkan dengan Dewan Komisaris, peneliti dijadwalkan wawancara di kediaman pribadi bapak M. Ali Muchid di Cerme Gresik. Sedangkan dengan DPS, peneliti melakukan wawancara di Kampus Unair Surabaya.

Karakteristik informan pada BPRS Amanah Sejahtera antara lain informan yang masuk dalam usia produktif sebagaimana BPS yaitu usia di atas 20 tahun sd 50 tahun sebanyak 2 orang, dan di atas batas usia produktif terdiri dua orang. Jika dilihat dari lokasi tempat tinggal, yang satu wilayah dengan BPRS yaitu di Gresik ada 3 orang, dan Surabaya 1 orang. Jika dilihat dari sisi pendidikan, diploma ada 1 orang, sarjana 2 orang, dan Pasca Sarjana 1 orang. Jika dilihat dari pengalaman pelatihan, semua memiliki pelatihan di bidangnya. Sedangkan dari sisi rangkap pekerjaan, ada satu orang yang memiliki rangkap pekerjaan. Adapun karakteristik informan pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik sebagai berikut:

Tabel 3.6 Karakteristik Informan Penelitian pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik

No	Nama	Jabatan	Usia	Alamat Rumah	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Diklat yg pernah diikuti	Pekerjaan lain-lain di luar jabatannya di BPRS
1	M. Ali Muchid	Komisaris	58 th	Cerme – Gresik	Sarjana	21 tahun	Sertifikasi Dewan Komisaris	Tidak ada
2	Rismarini	Direksi	47 th	Jl. Kapten Dulasim – Sidomoro – Kebomas -	Diploma	19 tahun	Berbagai pelatihan yang di adakan OJK, Asbisindo dan lembaga swasta	Tidak ada
3	Suherman Rasyidi	DPS	70 th	Jl. Wonorungkut Utara – Surabaya	Pascasarjana	5 tahun	Berbagai pelatihan yang diadakan oleh berbagai universitas di dalam maupun luar negeri dan oleh Bank Indonesia	Dosen di Unair Surabaya, Dosen luar biasa di beberapa universitas dalam maupun luar negeri
4	Mustafa Ridha	AO	36 th	Jl. Optima – Komplek Permata Optima – PPS, Kab Gresik	Sarjana	Setengah tahun (Menjadi Manajer), sebelumnya 3 tahun menjadi Kepala Cabang	Berbagai pelatihan yang diadakan Bank Mu'amalat, OJK, dan lembaga pelatihan swasta	Tidak ada

Sumber: Data dari BPRS Amanah Sejahtera Gresik

B. Pembiayaan Bermasalah dan Upaya Penyediaan Alokasi PPAP

Pembiayaan bermasalah menjadi bagian dari dinamika atas setiap pengelolaan portofolio aset pada bank syariah. Pilihan terhadap pengelolaan aset menjadi portofolio bisnis yang menguntungkan dan memiliki risiko menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Melihat operasional bank syariah dalam pengelolaan pembiayaan pada pemanfaatan aset yang dimiliki, maka penting untuk melihat kondisi lebih mendalam pelaksanaan pembiayaan, pembiayaan yang mengalami permasalahan, hingga alokasi PPAP sebagai bagian dampak yang harus dipersiapkan oleh BPRS adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan pada BPRS

Pembiayaan pada BPRS pada umumnya adalah pembiayaan dengan prinsip *murabahah* dan sebagian yang lain adalah *muḍārabah*, *musharākah*, multijasa dan *qard*. Data Pembiayaan pada BPRS antara lain:

Tabel 3.7 Aktiva Produktif pada BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya (dalam ribuan)

Akad	Maret 2017	Juni 2017	September 2017	Desember 2017	Maret 2018	Juni 2018
<i>murabahah</i>	19.365.967	23.913.881	26.161.637	26.536.576	29.050.886	33.416.512
<i>qard</i>	16.154.477	15.242.798	13.249.936	8.548.943	7.672.140	6.792.918
Multijasa	1.208.381	1.516.053	1.737.615	1.759.460	1.451.990	1.973.352
<i>muḍarabah</i>	263.798	254.798	244.798	244.798	244.798	244.798
<i>Musharakah</i>	94.000	94.000	94.000	44.500	444.500	844.500
Penempatan pada Bank lain	11.360.364	3.137.224	5.474.256	9.653.005	9.833.231	4.282.540
Jumlah	48.446.987	44.158.754	46.962.242	46.787.282	48.697.545	47.554.620

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi diakses dari <http://ojk.go.id>

Pembiayaan pada BPRS Karya Mugi Sentosa menunjukkan adanya diversifikasi produk pembiayaan ke berbagai prinsip akad sebagaimana fatwa

Kondisi pembiayaan pada BPRS yang lain tentu memiliki keunikan yang berbeda, seperti halnya pada BPRS Jabal Nur.

Akad	Maret 2017	Juni 2017	September 2017	Desember 2017	Maret 2018	Juni 2018
<i>murabahah</i>	175.95.742	16.172.595	15.776.784	17.085.365	18.674.391	20.471.429
<i>qard</i>	62.933	62.933	62.525	86.525	374.525	446.525
Multijasa	45.658	43.863	42.384	61.267	59.444	223.680
<i>muḍārabah</i>						
<i>Musharakah</i>	5.740.402	4.682.402	3.337.702	3.473.702	2.773.627	2.768.402
Penempatan pada Bank lain	3.074.487	3.751.327	3.163.748	2.708.362	4.744.052	793.241
Jumlah	26.519.222	24.713.120	22.383.143	23.415.221	26.626.039	24.703.277

Pembiayaan pada BPRS Jabal Nur Tebu Ireng jika dilihat dari sebaran pembiayaan cukup bervariasi dari akad yang digunakan. Pembiayaan terendah sepanjang Maret 2017 hingga Juni 2018 adalah pembiayaan *qard* yaitu rata-rata sebesar 79,3 juta rupiah (0,32 persen) dari total pembiayaan. Sejumlah akad yang tidak digunakan adalah pembiayaan dengan skim *muḍārabah*. Pembiayaan *murabahah* menjadi produk utama karena produk ini yang mudah untuk diterima nasabah dan memiliki kepastian bagi BPRS yaitu rata-rata sebesar 71,3 persen. Seiring berjalannya waktu, penempatan dana pada lembaga lain semakin berkurang. Hal ini karena dibutuhkan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah lainnya. Hal itu dapat dilihat dari peningkatan pembiayaan pada skim *murabahah*. Selain pembiayaan *murabahah*, terdapat

Pembiayaan terhadap kontraktor memiliki nominal yang relatif besar. Namun demikian risiko bisnis yang dihadapi juga besar. Direksi memiliki keyakinan bahwa mendanai kontraktor adalah salah satu upaya untuk mendapatkan laba. Sebagaimana paparan Subekti “pembiayaan kami lebih

⁶ Tomy, Account Officer Kantor Cabang Krian BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*, 16 Januari 2019

Pilihan segmentasi tersebut bagian dari upaya untuk memecah portofolio asset BPRS. Keberadaan BPRS secara geografis terbentang lokasi yang cukup jauh. Jika BPRS Bakti Makmur Mandiri kantor pusatnya berada di Krian Sidoarjo, sedangkan BPRS Unawi Barokah berada di Wadungasri. Berikut data pembiayaan yang dikelola BPRS Unawi Barokah:

Akad	Maret 2017	Juni 2017	September 2017	Desember 2017	Maret 2018	Juni 2018
<i>murabaḥāh</i>	1.418.434	1.513.211	1.257.980	1.011.451	961.256	997.938
<i>qarḍ</i>						
Multijasa						
<i>muḍārabah</i>						
<i>Musharākah</i>						
Penempatan pada Bank lain	1.913.805	1.370.875	1.490.387	1.877.785	2.006.506	1.702.959
Jumlah	3.332.239	2.884.086	2.748.367	2.889.236	2.967.762	2.700.897

Potret pengelolaan pembiayaan pada BPRS Unawi Barokah berbeda dengan pembiayaan pada BPRS Bakti Makmur Mandiri. Pembiayaan pada BPRS Unawi Barokah sepanjang Maret 2017 sampai dengan Juni 2018

[illegible]

BPRS Unawi Barokah mengalami perombakan struktur. Direktur utama mengundurkan diri, dan akan digantikan oleh calon direktur utama baru. Calon direktur utama tersebut sudah lulus *fit and proper test* di Otoritas Jasa Keuangan dan tinggal menunggu surat keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk status legal. Selain direksi yang baru, adanya pengangkatan direktur operasional, yaitu yang semula manajer marketing, sekarang naik menjadi direktur operasional. Jabatan itu juga dalam proses pengajuan di OJK.

Strategi yang dipergunakan BPRS Unowi Barokah saat pembiayaan *murabahah* sudah maksimal, mengingat jumlah AO terbatas, maka yang dilakukan untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas dilakukan dengan

[illegible]

Tabel 3.12 Aktiva Produktif BPRS Amanah Sejahtera Gresik (dalam ribuan)

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi diakses dari <http://ojk.go.id>

[illegible]

Kesalahan dalam pemberian pembiayaan tersebut terjadi dapat disimpulkan karena faktor *Account officer* yang tidak jeli dalam melihat calon nasabah. Hal itu terjadi juga karena faktor AO dalam menyampaikan kepada nasabah. Sebagaimana paparan Mulyana “cara-cara nyari (mencari) nasabah, cara survai sudah tidak syariah. Saya masuk disini 2017, sekarang sudah tidak ada. Dalam hal cari nasabah tidak mengindahkan apakah pekerjaan yang dilakukan, sesuai syariah tidak, diabaikan. Persyaratan yang dilakukan tidak syariah ditabrak saja. Cara survainya, AO tidak valid, nerima imbalan”.¹¹

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam pemberian pembiayaan semata-mata karena faktor nasabah berharap segera dapat nasabah, atau keengganan

¹¹Ibid.,

nasabah menyampaikan alur sesungguhnya pembiayaan. Hal itu disampaikan

AO bahwa potensi itu terjadi karena tuntutan. Sebagaimana paparan berikut:

Sifatnya pengecekan-pengecekan tidak dilakukan. Buru target. Sebenarnya NPF tidak datang dari luar, kalau dari dalam sendiri tahu ini bakal macet, tidak dicairkan. Karena memburu faktor target, keperluan pribadi. Akhirnya dicairkan. Target perusahaan, pimpinan sebelumnya. Selain itu juga karena usahanya mengalami kemunduran, debitur tidak ditemukan, lari, agunan tidak ditemukan, BPKP mobil, mobil tidak ada...¹²

Data di atas diakui oleh salah satu nasabah pembiayaan yang mengalami kemacetan pembiayaan, bahwa menurut salah satu nasabah, “Saya mengajukan pembiayaan pada saat saya jadi karyawan, sekitar tahun 2014, terus hamil, dan keluar dari kerja. Pembiayaan digunakan untuk membangun rumah dan berakhir sekitar tahun 2021. Selama ini pembayaran lancar”.¹³ Menurut Penuturan Rahayu, nasabah tersebut tidak membayar sama sekali.¹⁴ Dari data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada ketelitian meskipun nasabah adalah seorang karyawan, maka potensi pembayaran dan kemampuan membayar perlu dilihat. Sehingga pada saat nasabah tersebut keluar dari pekerjaan, tidak ada kemampuan membayar, dan terlihat nasabah terbukti tidak jujur sehingga mengatakan pembayaran angsuran lancar.

Pembiayaan bermasalah dapat dipastikan terjadi karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Hal itu sebagaimana paparan berikut “faktor

¹² Hariyanto Wahyu Wibowo, Account Officer BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*, 04 Januari 2019

¹³ N1, Nasabah Pembiayaan BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara* , 17 Oktober 2019

¹⁴ Pram Puji Rahayu, Direktur Operasional BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara* , 17 Oktober 2019

Karya Mugi Sentosa Surabaya

Upaya lain dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan mengingatkan setiap waktu. Supardana menyampaikan bahwa “*prepare*-nya rata-rata satu atau dua bulan sebelumnya. Saya tidak mau satu

²³ N1, Nasabah BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, 21 Oktober 2019

Proses mengingatkan ditujukan agar nasabah memprioritaskan membayar kewajibannya kepada BPRS. Begitu juga bagi petugas dari BPRS agar siaga dengan mengantisipasi agar pada waktu jatuh tempo, nasabah akan tepat waktu membayar. Hal ini mengantisipasi kelalaian nasabah dalam menunaikan kewajibannya. Selain mengingatkan berbasis data, direksi juga menyampaikan bahwa: “teman-teman sudah diawasi sama teman-teman yang lainnya, kolektibilitas diatas 3 bulan kan kolektibilitiy 2 (kurang lancar). Jangan sampai masuk 4 bulan”.²⁵ Langkah ini dimaksudkan agar terjadi koreksi antar karyawan, karyawan yang memiliki data, menyampaikan dan ditindaklanjuti oleh yang berwenang untuk menyampaikan kepada nasabah. Menurut Syarofi, upaya selalu mengingatkan kepada AO terus harus berjalan, meskipun dalam masalah yang dianggap ringan, misalnya tanda tangan jaminan yang melibatkan orang lain, tanda tangan bukti penyediaan barang yang melibatkan *supplier*.²⁶ Permasalahan ini akan memicu munculnya kelalaian yang lain dalam pembiayaan.

²⁶Sadullah Syarofi, DPS BPRS Karya Mugi Sentosa, *Wawancara*, 10 Januari 2019

Ini kita biasanya rata-rata di *rescheduling*. Kalau *Rescheduling* disini, kita bisa melihatnya begini, yang dulu angsuran 1 juta, kondisi bisa macet/diragukan/ (Kol 2, 3 dan4). Tergantung Kejelian bank, AO dan bagaimana siklus nasabah. Kalau siklus nasabah sedikit tersendat, mumpung dia orangnya kooperatif, kita lihat kedepannya ada permasalahan gak kira-kira. Anggap nasabah masih yakin maka kita tinggal awasi, jika ada masalah kita beri solusi karena kita sebagai mitra. Jangan sampai menjadi beban, Kalau sampai menjadi beban, pasti menanyakan begini, pak dulu kita setahunnya 2 juta, saya ada kendala ini ini, profitabilitas turun, ada permasalahan yang tidak diketahui. Biasanya kita kasih *win win solution*, pak bisa gak di bayar sesuai kemampuan, dengan jangka waktu yang sama, kita bicarakan. Dengan catatan ada surat permohonan. Jadi kita tidak sepihak. Itu biasanya nasabah yang kooperatif, yang dia berfikir akibat masalah ini nasabah tidak jelek pada SLIK (BI *Cheking* itu). Akhirnya dia mau begitu, kita duduk bersama kita jelaskan, terkait posisi-posisi itu, meskipun terkait margin kita berkurang. Mestinya 2 juta dapat sekian karena di ropel kan (bayar dalam satu waktu), maka margin menjadi turun...²⁷.

Ada *benchmark*, usahakan kurang 7 persen Ngapunte (mohon maaf) tahun kemarin 5,98 persen, kami berterimakasih, kami *surprise* kepada teman-teman, apa yang anda minta, kita berikan, *win win solution*. Jadi tidak saja ditekan, tapi kita berikan sesuatu/*reward*. Ada komisaris di tim *loan* di atas 200 juta. Selain itu monitoring *month to month*, tapi *day to day*, komisaris bisa datang sewaktu waktu. Human *approach*, diskusi dengan direksi, ada apa hari ini, semua berawal dari wawancara, jika

[illegible]

Keberhasilan pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP menunjukkan adanya fluktuasi. Sepanjang Maret 2017 sampai dengan Juni 2018, NPF pada BPRS Karya Mugi Sentosa adalah PPAP wajib dibentuk sebesar 1 milyar rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 1,4 milyar rupiah pada Maret 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 1,4 milyar rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 1,4 milyar rupiah pada Juni 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 600 juta rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 1,4 milyar rupiah pada September 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 1,2 milyar rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 2,4 milyar rupiah pada Desember 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 2,4 milyar rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 2,5 milyar rupiah pada Maret 2018 dan PPAP wajib dibentuk sebesar 2,4 milyar rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 2,4 milyar rupiah pada Juni 2018. Sebagian waktu yang

[illegible]

NPF merupakan situasi yang sulit dihindarkan pada bisnis perbankan dan juga pada BPRS. Namun demikian upaya dan strategi secara periodik dilakukan. Sebagaimana paparan berikut: “pada kemampuan bayar, kondisi, *capital* (5C) yang paling utama kapasitas mengembalikan pembiayaan. Karakter juga penting, yang utama karakter. *Interview*, info lingkungan, SID bisa menggambarkan, ibadah”.²⁹ Jika upaya preventif ini dilakukan, harapannya pembiayaan akan aman dan tepat sasaran serta mampu memberikan keuntungan. Namun demikian saat pembiayaan benar-benar bermasalah maka tentu membutuhkan upaya agar pembiayaan yang bermasalah bisa kembali. Hal yang dilakukan menurut Widjihardjo antara lain “Setelah cair, kita pantau 2 minggu setelah jatuh tempo, jangan sampai masuk kolektibilitas tidak lancar. Kita intensif agar tidak mencapai 2 bulan, 2 bulan ke 3 bulan. Yang melakukan pantauan adalah AO. Dari *des col* (bagian penagihan) juga ada yang mengingatkan”.³⁰

Peran serta *des-col* (penagihan) terlibat untuk setiap saat mengingatkan nasabah agar tepat waktu membayar, sehingga tidak terjadi NPF, kemudian PPAP dapat diminimalisir. Jika upaya yang dilakukan ini masih memberikan

²⁹ Hariyanto Wahyu Wibowo, Account Officer (AO) BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*, 04 Januari 2019

[illegible]

³¹ Agus Mulyana, Direksi BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*, 04 Januari 2019

³²N2, Nasabah BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*,17 Oktober 2019

³³Ibid.,,

Dengan akuisisi, maka Jabal Nur akan melebur dengan nama Lantabur sebagai kantor Cabang di Surabaya tepatnya di Gayung Sari. Harapannya, lembaga ini bisa kembali mudah untuk melaksanakan fungsi intermediasi baik kepada nasabah *funding*, maupun *financing*.

[illegible]

³⁷Ibid.,,

NPF menjadi perhatian BPRS dalam upaya mengendalikan pembiayaan agar berjalan normal dan baik. Pembiayaan bermasalah berdampak pada terhambatnya putaran keuangan dari satu nasabah ke nasabah lain dan NPF mengakibatkan BPRS memiliki kewajiban mencadangkan PPAP. Akibat dari hal tersebut sesuai kemampuan lembaga, BPRS selalu mengantisipasi dan berupaya agar pembiayaan bermasalah dapat berkurang.

³⁸ Tomy Tri Widodo, *Account Officer* BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo Wawancara, 16 Januari 2019

⁴⁰ Dwi Emi Subekti, Direksi BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo *Wawancara*, 16 Januari 2019

Tidak cukup demikian, komisaris sebagai pengawas BPRS juga memastikan bahwa AO memiliki pemahaman mengenai bisnis calon nasabah. Sebagaimana paparan komisaris bahwa “AO harus benar-benar faham tentang prospek bisnis yang harus dibiayai. Dan Secara prinsip syariah, kami juga mendukung pembayaran sesuai dengan kemampuan, tetap harus lunas, cara pembayaran sesuai *cas flow*. Kita beri kelonggaran besarnya angsuran”.⁴²

Dengan aturan dari internal BPRS yang demikian, maka diharapkan NPF terhindarkan dan alokasi PPAP dapat ditekan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan apa yang sudah diupayakan secara preventif tersebut, NPF tidak bisa dihindarkan. Jika kondisinya demikian maka diperlukan tindakan agar NPF bisa diselesaikan.

Upaya yang dilakukan BPRS apabila pembiayaan mengalami masalah adalah dengan melakukan penagihan. Penagihan dilakukan oleh *account officer*

⁴² Habiburrochman, Dewan Komisaris BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo *Wawancara*, 16 Januari 2019

Wis pokok balekno (yang penting kembalikan), harusnya kan syariah bukan bicara pokok margin. Hasilnya kalau sesuai kesepakatan harga jual. Tetapi sekarang kita sudah tidak bisa melakukan, yang penting kita sudah membantu nasabah kita sudah melakukan restrukturisasi berkali-kali tapi tetap dia tidak bisa kembali ya sudah sambil dia menjual asset itu kita lakukan seperti itu...⁴⁴

Dalam hitungan bisnis, yang penting modal yang dikeluarkan bisa kembali. Keuntungan bisa digali dari pembiayaan lain dengan mitigasi pembiayaan lebih jeli lagi.

Keberhasilan pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP menunjukkan adanya fluktuasi. Sepanjang Maret 2017 sampai dengan Juni 2018, NPF pada BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo adalah PPAP wajib dibentuk sebesar 2,8 milyar rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 2,6 milyar rupiah pada Maret 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 3,2 milyar rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 2,6 milyar rupiah pada Juni 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 3,1 milyar rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 2,5 milyar rupiah pada September 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 2,4 milyar rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 2,2 milyar

⁴⁴ Dwi Emi Subekti, Direksi BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*, 16 Januari 2019

Strategi pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP adalah sebagaimana yang disampaikan oleh BPRS Unowi Barokah bahwa “Ketika saya masuk, NPF kami relatif tinggi, keuntungan kami negatif, maka hal yang saya lakukan adalah mengelola NPF yang sudah ada agar berkurang. Saya maksimalkan, bahkan saya turun tangan sendiri untuk penagihan. Alhamdulillah sebagian bisa dibayar lunas. NPF kami menurun”.⁴⁵

Keterlibatan direksi dalam turun ke lapangan menangani pembiayaan bermasalah menjadi pintu untuk dana pembiayaan itu kembali ke bank. Strategi teknis yang dilakukan direksi antara lain “akad nya pakai doa, paginya pakai doa, pulang nya pakai doa apapun kegiatan pasti ada yang namanya bismillah itu kalau di syariah. Akhirnya teman-teman saya ajak kerja tim. Teman-teman

[illegible]

itu begini, kalau dirumahnya tidak ada orang itu langsung pulang. Kalau saya tidak, saya tunggu sampai ada".⁴⁶ Dalam hal ini peneliti tidak berhasil mengkonfirmasi data kepada nasabah pembiayaan macet, karena tidak diizinkan oleh direksi, dan ketika dikonfirmasi untuk ikut bersama bagian penagihan saat ke lapangan, tidak mendapatkan tanggapan dari direksi.

Menjadikan kegiatan spiritual doa sebagai bagian untuk mengembalikan pembiayaan riil dilakukan. Kekuatan doa dan kerjasama mampu mempermudah baik dalam hal proses bertemunya bank dengan nasabah, maupun meluluhkan hati nasabah untuk melaksanakan tanggungjawabnya membayar.

Pembiayaan bermasalah juga disebabkan karena faktor internal, sehingga pada akhir 2018 dilakukan perombakan besar-besaran, berupa direksi mundur dan digantikan oleh Masrifat'i. Penggantian direksi sudah dimulai dengan tes yang dilakukan oleh OJK, dan menunggu hasil tersebut untuk selebihnya bisa bertindak. Selain itu adanya pengangkatan Adi Nugraha sebagai direksi operasional dengan harapan akan meningkatkan capaian operasional BPRS.⁴⁷ DPS senantiasa memesankan kepada karyawan untuk amanah. Tiap juma'at pagi kami istighasah, dan memberikan petuah-petuah.⁴⁸ Langkah totalitas dipilih sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang

⁴⁶Ibid.,,

⁴⁷ Bambang Tjatur Utomo, Dewan Komisaris BPRS Unawi Barokah, *Wawancara*, 25 Januari 2019

⁴⁸Muslichudin, DPS BPRS Unawi Barokah, *Wawancara*, 25 Januari 2019

Keberhasilan pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP menunjukkan adanya fluktuasi. Sepanjang Maret 2017 sampai dengan Juni 2018, NPF pada BPRS Unawi Barokah Sidoarjo adalah PPAP wajib dibentuk sebesar 21 juta rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 22 juta rupiah pada Maret 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 22 juta rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 23 juta rupiah pada Juni 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 20 juta rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 21 juta rupiah pada September 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 21 juta rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 22 juta rupiah pada Desember 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 33 juta rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 33 juta rupiah pada Maret 2018 dan PPAP wajib dibentuk sebesar 18 juta rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 27 juta rupiah pada Juni 2018. Sebagian waktu yang mengalami penurunan kewajiban pembentukan PPAP merupakan keberhasilan dari pengelolaan NPF bagi lembaga yaitu bulan September 2017 dan Juni 2018.

Sasaran pembiayaan pada BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik memiliki tingkat fokus yang berbeda. Menurut Prayitno, BPRS Mitra Mandiri Gresik mulai fokus pembiayaan di Pasar, sebagaimana paparan beliau:

Pasar sebagai segmen pembiayaan yang dipilih BPRS guna menghindari NPF dan meminimalisir PPAP. Cicilan harian nasabah pasar tidak terasa berat, karena tiap hari dapat uang. Kondisi ini diakui oleh Nasabah bahwa pembayaran angsuran pernah minta di stop untuk tidak membayar selama 2 bulan, saat jelang lebaran dan setelah lebaran karena pendapatan bengkel turun dan kebutuhan untuk memberi tunjangan hari raya kepada karyawan.⁵⁰ Kondisi pembayaran ini yang menurut nasabah memberikan kemudahan dan pengertian BPRS saat kondisi nasabah mengalami kesulitan pembayaran.

. Hal itu dipertegas oleh Sungkowo, bahwa

Marketing *funding* kita berada di pasar, marketing *lending* tinggal *maintenance* marketing *funding*. Jadi untuk marketing *funding* kita tumpangi dengan *lending*. “sekalian gih” Sama-sama ke pasar, lebih efektif. “satu-satu nya nasabah tahu” inggih. Nasabah ini butuh pembiayaan, nasabah ini butuh nabung, tidak menutup kemungkinan

⁵⁰N1, Nasabah BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, *Wawancara*, 06 Nopember 2019

bicara. Hukum, melalui mekanisme apa, sengketa syariah, somasi pengadilan agama...⁵⁵

Tahapan tahapan sebagaimana paparan di atas di lakukan secara maraton, sesuai administrasi baik dari sisi legalitas hukum maupun penekanan pada jalur hukum dilakukan secara berkesinambungan sehingga pada saat harus menyangkut kasus hukum, proses-proses administratif dan persuasif sudah dilakukan. Sehingga perjalanan menempuh hukum berjalan lancar.

Keberhasilan pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP menunjukkan adanya fluktuasi. Sepanjang Maret 2017 sampai dengan Juni 2018, NPF pada BPRS Mitra Mandiri Sukses adalah PPAP wajib dibentuk sebesar 656 juta rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 667 juta rupiah pada Maret 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 332 juta rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 357 juta rupiah pada Juni 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 618 juta rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 670 juta rupiah pada September 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 303 juta rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 331 juta rupiah pada Desember 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 344 juta rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 374 juta rupiah pada Maret 2018 dan PPAP wajib dibentuk sebesar 352 juta rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 386 juta rupiah pada Juni 2018. Sebagian waktu yang mengalami penurunan kewajiban pembentukan PPAP merupakan keberhasilan dari pengelolaan NPF bagi lembaga yaitu pada bulan Juni 2017 dan Desember 2017.

⁵⁵ Samsun Maarif, Direksi BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, *Wawancara*, 26 Januari 2019

Amanah Sejahtera Gresik

Profitabilitas menjadi prioritas kedua setelah tujuan utama BPRS mengentaskan rentenir tercapai. Kenapa demikian, karena nasabah yang berurusan dengan rentenir jumlah pembiayaan tidak terlalu besar, nah ketika BPRS mau ambil peran, maka keuntungan pada sektor ini relatif kecil dibandingkan pada pembiayaan yang tujuannya bisnis seperti perusahaan maupun kontraktor.

Kebetulan pemegang sahamnya tidak mempermasalahkan laba sekian, hingga kemarin kita jatuh setelah dikoreksi OJK begini-begini, malah kita harus tambah modal dan lain sebagainya alhamdulillah mereka juga komitmen. Mereka tidak matok (batas) kamu harus untung sekian. Pokoknya kita ada untung sedikit, mereka selalu tanyanya, karyawannya dapat berapa, rasanya ininya (perhatian) ke karyawan itu besar...⁵⁷

⁵⁷ Rismarini, Direksi BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*, 06 Maret 2019

Prioritas pesaham sebagaimana hal tersebut adalah tidak semata-mata mengejar keuntungan, dan lebih mengedepankan lembaga memberikan hak nya karyawan. Menurut Muchid bahwa:

Setiap RUPS tidak ada seorang pun yang mikir untung berapa, deviden dibagi berapa, gak pernah ada. Yo wis (ya sudah) direktur oleh e ngatur (ngelola), supaya maju. Sudah. Pesaham itu senengnya disitu. Komisaris dengan direktur piye carane (gimana caranya), bank berkembang, masyarakat e senang. Lah itu yang menjadi kebanggaan kita disitu. Pesahamnya senang, direkturnya senang, lihat karyawan senang, saya ikut senang. Kalau karyawan sedih, saya bingung. Karyawan tidak ada, honor, gaji di bawah UMR tidak ada. Maka kalau gak untung tidak apa-apa...⁵⁸

Upah Minimum Regional (UMR) menjadi patokan BPRS dalam memberikan gaji kepada karyawan di atas UMR yang ditetapkan. Hal ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, masyarakat terdekat BPRS adalah karyawannya. Kondisi ini digunakan direksi untuk menyadarkan karyawan agar bekerja maksimal, lancar dan tidak mengalami permasalahan baik *financing* maupun *funding*. Rismarini menyampaikan kepada karyawan “Saya pesan ke teman-teman, kalau lihat BPRS lain itu tidak ada yang seperti itu, kita seperti ini, di tempat lain itu tidak ada, kalau disini itu rasanya pasrah, kelola-en bank ini sesuai visi misi pesaham itu”.⁵⁹ Pesan tersebut sebagai motivasi karyawan agar bekerja maksimal. Meskipun sudah demikian tentu bukan berarti tanpa ada permasalahan.

⁵⁸ M. Ali Muchid, Dewan Komisaris BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*, 08 Maret 2019

⁵⁹ Rismarini, Direksi BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*, 06 Maret 2019

Banyak menggali informasi ke nasabah. Jadi benar, kita harus cepat prosesnya, bagaimanapun kita harus memenuhi waktu yang diminta nasabah kita, kita akan proses setelah data lengkap. Selain kita meminta AO untuk analisa, kita melakukan pemanggilan nasabah. Ada tahapannya mbak, dengan plafon sekian, *ngadep* (menghadap) kepala cabang, plafon sekian *ngadep* (menghadap) manajer marketing, plafon sekian *ngadep* (menghadap) direksi. “kalau yang *ngadep* (menghadap) ibu ukuran berapa bu?” kalau ga salah di atas 100 juta. Di bawah itu di atasi kepala cabang, di atas itu manajer marketing. Tapi juga ada di bawah 100 juta, orang nya itu angel (sulit), takutnya sama direksi, nanti bisa diajukan ke direksi. Biar semuanya gak ke direksi...⁶³

Proses menghadap direksi merupakan bagian dari kebijakan bank agar nasabah memiliki rasa tanggung jawab atas pembiayaan yang dilakukan, ada proses komunikasi dan juga memberi masukan kepada bank melalui hasil pertemuan calon nasabah tertentu dengan direksi. Selain itu untuk memastikan pembiayaan aman, BPRS juga menggunakan (Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) serta Sistem Informasi Debitur (SID). Hal itu semakin melengkapi analisa yang dilakukan oleh BPRS. Jika pembiayaan sudah dilakukan sesuai tahapan sebagaimana kebijakan BPRS, namun tetap mengalami permasalahan, menurut Ridla dilakukan upaya penyadaran kepada nasabah, agar mau menjual asset yang dimiliki guna menutupi pembiayaan tersebut.⁶⁴

⁶³Ibid.,

⁶⁴Mustafa Ridla. AO BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*, 06 Maret 2019

Komisaris dalam hal ini juga berkontribusi dalam upaya pengelolaan pembiayaan bermasalah dengan meminta data NPF kepada manajemen. Data diminta langsung dari auditor internal. Selain komisaris juga terlibat dalam diskusi, memberi masukan terhadap kondisi nasabah tertentu sepanjang komisaris mengetahui.⁶⁵

Usaha yang sudah sedemikian, pembiayaan bermasalah tetap melenggang pada BPRS. Strategi yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi nasabah. Menurut Rismarini, mayoritas menggunakan strategi *restruct* (restrukturisasi) antara lain:

Restruct (restrukturisasi) kita sesuaikan dengan kemampuan, dan kebanyakan kita lakukan *restruct* mbak. Kita lihat, berapa kemampuan nasabah untuk membayar ke bank, jadi dia perpanjang waktunya. kalau hanya perpanjangan waktunya saja *rescheduling*. Misal angsuran 500 ribu, dia masih mampu 500 ribu tapi, tidak bisa mengejar yang telat-telat, minta mundur setahun, atau 6 bulan itu, itu *rescheduling*. Kalau *Restruct*, angsuran diperkecil, waktunya diperpanjang, sesuai kemampuan nasabah...⁶⁶

Usaha BPRS di atas diakui oleh nasabah bahwa dalam menyesuaikan dengan kemampuan bisnis komputer yang sedang mengalami penurunan, nasabah meminta kepada BPRS untuk *rescheduling* dengan cara memperpanjang masa pembiayaan, sehingga angsuran semakin kecil.⁶⁷ Restrukturisasi pembiayaan merupakan jawaban untuk mencari solusi atas terjadinya NPF dan menekan PPAP. Teknik ini memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan dengan persuasif sesuai

⁶⁵ M. Ali Muchid, Dewan Komisaris BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*, 08 Maret 2019

⁶⁶ Rismarini, Direksi BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*, 06 Maret 2019

⁶⁷N1, Nasabah BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*, 28 Oktober 2019

Menurut Ridla, BPRS pernah menyelesaikan NPF agar PPAP berkurang dengan melakukan strategi “proses mengeksekusi jaminan itu ada, kita sadarkan orangnya untuk menjualnya asset nya, kalau tidak, kita bisa bantu melalui lelang. Kita siap bantu menjual asset yang tidak diagunkan, maupun yang diagunkan, tetap kita akan bantu pasarkan, kita bantu untuk menjualkan. Kalau dia sudah gak bisa, apa coba kita lelang pak ke balai lelang”.⁶⁸ Upaya pendekatan terhadap nasabah, membuat nasabah menyadari itu dilakukan. Upaya pendekatan persuasif tersebut merupakan bagian dari ciri khas BPRS Amanah Sejahtera sehingga membantu nasabah melaksanakan kewajibannya kepada bank.

Keberhasilan pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP menunjukkan adanya fluktuasi. Sepanjang Maret 2017 sampai dengan Juni 2018, NPF pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik adalah PPAP wajib dibentuk sebesar 2 milyar rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 2 milyar rupiah pada Maret 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 1,8 milyar rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 1,8 milyar rupiah pada Juni 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 1,8 milyar rupiah, sedangkan, PPAP yang

[illegible]

Penerapan *Prudential Banking* pembiayaan merupakan wujud pengelolaan dana yang disalurkan kepada nasabah dengan rasa tanggungjawab dan amanah sehingga pembiayaan aman dan sesuai cita-cita perusahaan. Implementasi *prudential banking* pada BPRS Karya Mugi Sentosa (KMS), bahwa “pembiayaan dijalankan berdasarkan aturan, ketentuan baik internal maupun eksternal. Misalkan saja terkait Kartu Tanda Penduduk, KTP ini memiliki kekuatan hukum, maka diperlukan”.⁶⁹ Aturan internal diantaranya yang harus diikuti adalah kebijakan pembiayaan dan standard operasional prosedur (SOP) pembiayaan. Sedangkan aturan eksternal adalah undang-undang, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maupun Surat Edaran yang dikeluarkan baik dari Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aturan internal berkaitan dengan Pembiayaan pada BPRS KMS berupa kebijakan pembiayaan yang dibuat tahun 2006. Isi dari kebijakan pembiayaan tersebut antara lain mengenai kebijakan umum pembiayaan, prinsip-prinsip

[illegible]

Implementasi *prudential banking* pada pembiayaan muncul di dalam SOP dengan senantiasa memastikan pembiayaan dianalisa dengan menggunakan 5 C (*character, capacity, collateral, capital, condition of economic*) secara keseluruhan.⁷⁴ Pelaksanaan atas hal tersebut dalam pembiayaan muncul pada *checklist* pengajuan pembiayaan. Diantara yang ada di dalam *checklist* pembiayaan antara lain “terkait dengan jaminan, legalitas jaminan, nota analisa seperti apa, komite, ada catatannya, data nasabah, usahanya di-*ceklist*?”⁷⁵ Analisis kemampuan membayar pada menjadi prioritas pada pemberian pembiayaan. Menurut Fahmi, “pendapatan yang digunakan untuk angsuran sebesar 30 persen”.⁷⁶ Batasan tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dalam analisa pembiayaan, sehingga dimungkinkan dari alokasi pendapatan masih bisa untuk membiayai kebutuhan keluarga, dan angsuran kepada BPRS.

⁷⁶M. Aly Fahmi, Account Officer BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, 08 Januari 2019

Ada Divisi legal dan administrasi. Kelihatan dicekliskan. Jika ada kurang, di *To Be Obtained* (TBO), jadi tagihan. kemarin bulan Desember awal, karena itu satu legalitas kekuatan hukum, kita buat surat TBO yang belum selesai, harus dipenuhi. Itu kita kirim kepada seluruh cabang. jika tidak terpenuhi, audit melihat, tinggal tulis. Mereka takut. Kalu satu dua maklum, lek akeh yo diseneni (marah)...⁷⁸

Pengawasan terhadap *prudential banking* dijalankan fungsinya oleh dewan komisaris dan DPS. Menurut Widjiharjo selaku dewan komisaris

Pelaksanaan *prudential banking* dan syariah pada BPRS Karya Mugi Sentosa dalam keberhasilan mengelola NPF mengalami fluktuasi. Sepanjang Maret 2017 sampai dengan Juni 2018, NPF pada BPRS Karya Mugi Sentosa adalah 10,93 persen pada Maret 2017; 10,25 persen pada Juni 2017; 9,24 persen pada September 2017; 13,97 persen pada Desember 2017; 14,14 persen pada Maret 2018 dan 11,71 persen pada Juni 2018. Data ini menunjukkan adanya perlu ditingkatkan dalam penerapan *islamic prudential banking* pada pembiayaan.

Penerapan *prudential banking* pada pembiayaan di BPRS Jabal Nur Surabaya dijalankan dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Menurut Mulyana pembiayaan dijalankan “dalam hal operasional ikut kodifikasi produk dan fatwa saja, apa yang boleh apa yang tidak kita jalankan. Dari sisi cara

[illegible]

Peran dewan komisaris dalam pembiayaan adalah menjalankan perannya dalam pengawasan secara maksimal sesuai aturan yang ditetapkan oleh OJK. Menurut Kodjib peran komisaris antara lain “komisaris itu tugasnya hanya memberi saran. Jadi kalau kita melakukan rapat dengan direksi kitawanti-wanti (berpesan) bahwa program direksi itu sesuai. Apakah ini sudah dilaksanakan apa belum. Kita kan tugasnya hanya memberi masukan, mengawasi”.⁸⁶

Perspektif di atas memastikan bahwa tanggungjawab *prudential banking* pembiayaan itu ada pada ranah manajerial yaitu direksi dan jajarannya

⁸⁶ Mochamad Kodjib, Dewan Komisaris BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*, 04 Januari 2019

Mengharapkan 5C, monitoring, pembinaan, pengawasan itu jalan, tapi kalau pelakunya sendiri itu profesionalismenya tidak jalan itu tidak bisa, makanya proses pembinaan pekerjaanya. Makanya ini proses acuan dari pemberian pembiayaan harus sesuai dengan SDM yang memadai yaitu dengan pembinaan, pendidikan yang cukup dan juga gaji yang diberikan memadai...⁸⁸

[illegible]

Menurut saya, bagaimana komisaris bisa memberikan usulan, pengawasan, tetapi untuk pelaksanaan tata kerja, komisaris sama sekali tidak boleh terlibat dalam proses operasional. Itu setiap ada pertemuan dengan OJK, selalu dikeluhkan komisaris. Proses yang diketahui komisaris, itu kejadian penyimpangan. Tapi munculnya setelah realisasi. Pada prosesnya masalahnya ketahuan setelah terjadi. Masukkan hal-hal tertentu yang tidak sesuai, tidak sesuai harapan, tapi OJK sendiri memberikan tata kerja sendiri...

Fungsi Dewan Komisaris memberikan pengawasan terhadap operasional BPRS yang dijalankan oleh direksi dan tim operasional. Mekanisme pengawasan penting disepakati bersama agar tujuan dari perusahaan tercapai dan berjalan sesuai harapan pemegang saham, tujuan perusahaan dan memberikan keadilan bagi nasabah. Jika aturan dari regulasi yang harus dirubah, maka sejatinya pada dewan komisaris terdiri dari pemegang saham dan independen. Dewan Komisaris Independen memiliki kewenangan pengawasan yang dilakukan tidak tergantung pada uang sendiri melainkan pada tanggungjawab pengawasan sesuai tujuan perusahaan. Menurut Sucipto, peran komisaris sesungguhnya bisa dikomunikasikan dengan direksi. Pembiayaan nominal tertentu bisa diperankan untuk mengetahui dan memerankan pengawasan dengan prinsip kehati-hatian.⁹¹

⁹¹ Adi Sucipto, Pengawas BPRS pada OJK Regional 4 Jawa Timur, *Wawancara*, 19 Maret 2019

SOP Pembiayaan tertanggal 11 Juli 2016. Diantara SOP terdiri dari *flow chart* dan penjelasan pada kolom sebelahnya. *Flow chart* pembiayaan terdiri dari mulai, permohonan, pemeriksaan, penginputan data nasabah, pencetakan SPK, penandatanganan SPK, penarikan pembiayaan pada system CBS, realisasi/pencairan pembiayaan dan pengarsipan akad pembiayaan dan jaminan.⁹⁶ Artinya SOP dibuat beberapa tahun yang sudah lewat. Dan SOP tersimpan di kantor BPRS. Namun demikian setiap karyawan baru mendapatkan penjelasan mengenai SOP yang harus dikerjakan. SOP

⁹⁶ Standart Operating Prosedure Prospect Hingga Pencairan Pembiayaan Baik Di Kantor Bank Maupun Dronping, BMI / LEND/ 01 – 09 Tertanggal 11 Juli 2016

Tingkat kehati-hatian dalam pembiayaan menjadi tantangan yang besar jika pembiayaan yang disalurkan memiliki ragam. Masing-masing pembiayaan memiliki karakter *prudential* yang berbeda. *Prudential banking* pada BPRS Unawi Barokah menurut Masrifai dilaksanakan dengan menerapkan analisis pembiayaan yang memuat “Prinsip *prudential* di BPRS harus menerapkan 5C. Yang penting menguasai *caracter, collateral, kapasitas, capital condition*. Kehati-hatian dalam pembiayaan dilaksanakan mulai proses data masuk dan klarifikasi & menggali informasi mengenai *income* & klarifikasi ke tetangga tentang karakter nasabah”.¹⁰⁰ Analisa pembiayaan sebagaimana pada SOP memiliki alur A/O menjadwalkan dan melakukan kunjungan ke nasabah, menyusun berita acara survey dari temuan fakta di lapangan, menyusun analisis pembiayaan dan jaminan atas proses inisiasi dan solitasi (kunjungan)

¹⁰⁰ Masrifai, Direksi (Plt) BPRS Unawi Barokah, *Wawancara*, 04 Mei 2019

Kehati-hatian selain pada awal pembiayaan, pencairan, juga terjadi pada proses pembiayaan berjalan, pembayaran angsuran, hingga selesai masa waktu

¹⁰³ Adi Nugraha, AO BPRS Unawi Barokah, *Wawancara*, 25 Januari 2019

¹⁰⁴Ibid.,

¹⁰⁵SOP Permohonan Pembiayaan Nomor Dokumen: BPRS/PM/04-03/00 Tertanggal 2 Agustus 2010, 3

¹⁰⁶ Masrifai, Direksi, BPRS Unawi Barokah, *Wawancara*, 03 September 2019

SOP pembiayaan berikutnya adalah SOP tentang permohonan pembiayaan nasabah kepada bank dengan alur sebagai berikut, AO melakukan wawancara awal kebutuhan dan penggunaan dana nasabah, jika memenuhi kriteria BPRS, maka dilanjutkan penerimaan berkas, pemeriksaan berkas dan

¹⁰⁹Ibid.,

Pelaksanaan kehati-hatian pembiayaan antara lain ketika pembiayaan mengalami permasalahan, secara administratif nasabah diberi surat peringatan (SP). Menurut Masrifai bahwa: “SP satu itu satu minggu, namanya kalau udah jatuh tempo , dilanjutkan SP 2. Tapi kita jangan obral yang namanya SP. Apa lagi kalau zaman milenial. Nasabah sekarang itu kalau nggak didatangi”.¹¹¹ Surat peringatan (SP) merupakan prosedur yang harus dilaksanakan sebagai tahapan legal dalam menjamin pembiayaan kembali lunas. Namun demikian sikap persuasif dengan mendatangi nasabah tetap menjadi prioritas agar dana bisa terbayarkan kembali ke bank syariah.

SOP Pembiayaan menunjukkan bahwa yang bertalian dengan pembiayaan antara lain, AO, kepala marketing, komite pembiayaan. Hal penting dalam menjaga kredibilitas pelaksanaan pembiayaan, pelaksana pembiayaan diikat dalam poin integritas lembaga.¹¹² Poin integritas memastikan setiap karyawan bekerja berdasarkan tugas dan SOP yang tersedia. Pelaksanaan atas pakta integritas yang telah disepakati harus menjadikan evaluasi pada setiap bulannya. Hal ini memberikan tindak lanjut apabila dalam pelaksanaan pakta integritas ada yang belum tepat atau belum sampai pada sasaran.

¹¹¹ Masrifai, Direksi (Plt) BPRS Unawi Barokah, *Wawancara*, 25 Januari 2019

¹¹² Adi Nugraha, AO BPRS Unawi Barokah, *Wawancara*, 25 Januari 2019

Disiplin proses tidak bisa dijalankan dengan baik. Berarti apa *integrity*. Contoh nasabah ini sebenarnya tidak layak, dilayak-layakkan. Ini sebenarnya tidak sesuai semuanya, direkayasa. Ini sebenarnya tidak *clear* di *clear*-kan, karena apa, disana ujung-ujungnya imbalan dan sebagainya. Sudah berapa AO kita keluarkan, ada 6 kalau gak salah. Main ada yang 200 juta, ada yang 400 juta, ada yang 250 juta, semua bermain disana...¹¹⁵

SOP pembiayaan pada BPRS Mitra Mandiri Sejahtera terdiri dari definisi produk dari skim akad yang digunakan, aspek syariah dari qur'an dan hadis maupun rukun *muṣārahah*, ketentuan skim akad, aspek tehnik, aspek administrasi dan lain-lain terkait cara pelunasan dan lelang.¹¹⁸ SOP ini berupaya memenuhi akad syariah dalam operasional pembiayaan.

Pembiayaan yang sudah mengalami *maintenance* dan SOP yang berdampingan dengan syariah, tentu tidak semua langsung baik. Adakalanya masih mengalami permasalahan. Upaya-upaya kehati-hatian yang dilakukan diantaranya dengan memastikan Surat Peringatan (SP) yang dikeluarkan.¹¹⁹ Jika surat peringatan tidak berjalan seiring, dan proses hukum jalan, maka akan tetap menunggu proses, dimana lembaga mengeluarkan surat peringatan sehingga permasalahan mulai dikerjakan. Kelemahan dalam melaksanakan fungsi surat peringatan pada BPRS Mandiri Mitra Sukses antara lain:.

Ini *Phase 1* (kualitas aktiva lancar) saja melangkah P2, kadang kala berkaitan dengan SP masih ada kelemahhah. Kurang tertib mengkomunikasikan, kurang baik, itu ada seperti itu. Cuma ternyata jika

¹¹⁹ Samsun Maarif, Direksi BPRS Mandiri Mitra Sukses, Gresik, *Wawancara*, 26 Pebruari 2019

nasabah itu peduli dengan kondisinya, kena SP, bank sudah memberikan SP, luar biasa (reputasi). Tapi kalau sudah karakternya jelek, waduh SP 1, SP 2, SP 3 nggak tedas (berdampak)...¹²⁰

Surat peringatan merupakan upaya lembaga menjalankan kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Surat peringatan yang diberikan kepada nasabah diharapkan memunculkan kesadaran dan tanggungjawab dalam menyelesaikan pembiayaan kepada bank. Yang ini yang disebut sistem disiplin *tool collection*.¹²¹ Kehati-hatian yang disandarkan pada kedisiplinan memberikan harapan bahwa pembiayaan akan kembali ke bank tepat waktu dan akan bermanfaat bagi bank untuk putaran pembiayaan berikutnya.

Kedisiplinan merupakan sarana bagi BPRS untuk memastikan secara teknis bahwa pembiayaan yang sudah disalurkan kepada nasabah akan dibayar oleh nasabah kepada BPRS tepat waktu. Semua tugas dijalankan oleh karyawan sesuai tupoksinya masing-masing. Prinsip yang harus dipegang adalah pembiayaan hanya akan terbilang aman jika sudah kembali ke bank. BPRS menjamin pembiayaan aman dengan mendokumentasikan pembiayaan dalam bentuk surat perjanjian prinsip, akad pembiayaan, perjanjian pengikatan jaminan, surat permohonan realisasi pembiayaan, dan tanda terima uang nasabah.¹²² Pengikatan jaminan misalnya berfungsi agar BPRS memiliki hak *preference* agar apabila terjadi pembiayaan bermasalah, tanggung jawab ke

¹²⁰Ibid.,

¹²¹Ibid.,

¹²² SOP Pembiayaan Musyarakah Jaminan Emas, Bank Mitra Syariah

marketing. Termasuk rencana margin atau bagi hasil yang akan kita jual, kemudian tentang panitia / komite pembiayaannya siapa-siapa, termasuk kalau bermasalah harus di restruk atau kita lelang, atau diselesaikan dengan apa, diatur dengan kebijakan marketing dan kebijakan legal...¹²⁴

Kebijakan marketing pembiayaan pada BPRS amanah sejahtera memuat antara lain produk dan aktivitas, batasan lokasi pembiayaan, plafon proses *account officer*, nomor registrasi pembiayaan, pejabat pelaksana survey, target marketing sesuai RKAP 2019, penentuan margin harga jual dan bagi hasil pembiayaan, administrasi pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, asuransi pembiayaan, batasan persetujuan pembiayaan, panitia pembiayaan, sistem layanan informasi keuangan, penilai independen, surat persetujuan pemberian pembiayaan, denda, ta'wid dan potongan pelunasan, pembinaan nasabah, pemantauan nasabah pembiayaan setelah pencairan, tabungan mengendap, ketentuan analisis pembiayaan, insentif marketing, perjanjian kerjasama / MoU, berita acara penyimpangan, laporan marketing, dan lain-lain. Kebijakan marketing ini ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama.¹²⁵

Kebijakan marketing setiap tahunnya dilakukan revisi dan pembahasan kembali, berharap bisa mendapatkan kesesuaian dengan kondisi riil nasabah dan persaingan bisnis. Penerapan SOP marketing yang dijalankan dalam rangka pembiayaan menurut Ridha dilaksanakan dalam rangka:

¹²⁴Ibid.,

¹²⁵Kebijakan Marketing Pembiayaan, 5/INT/2/1/2019 Bank Syariah Amanah Sejahtera, Memberi Pelayanan Terbaik dan Islami, 2019

Tujuan dari SOP adalah memberikan arahan bahwa pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan alur yang dibuat, persyaratan baik secara legal maupun ekonomi sehingga pembiayaan tersebut dijamin *prudent*.

Kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan terkait dengan nominal yang harus disalurkan. Nominal dalam pemberian pembiayaan di BPRS Amanah Sejahtera mengikuti batasan pemberian pembiayaan. Ridha menyampaikan bahwa “Kalau maksimal kita 2 M. Kita ngikut batas BMPK nya 2 Milyar untuk yang individu, terus kalau yang grup 3 milyar. Profesi nya

¹²⁶ Mustafa Ridha, *Manajer Marketing BPRS Amanah Sejahtera Gresik, Wawancara*, 06 Maret 2019

¹²⁷Ibid.,

Pelaksana atas kepatuhan pada BPRS Amanah sejahtera Gresik di bawah Manajemen Risiko dan Kepatuhan (MRK) dan internal audit.¹²⁹ Hal-hal yang terkait dengan kehati-hatian bermuara pada MRK dan internal audit, sehingga pada saat menemukan suatu masalah, tinggal dilihat sejauh mana kepatuhan dijalankan oleh MRK yang selama ini berjalan independen. Fungsi MRK adalah memberikan masukan terkait risiko yang terjadi, mau diikuti atau tidak keputusan sepenuhnya pada *loan committee*.

Selain itu pada proses pembiayaan, pembiayaan di putuskan oleh *loan committe*. Diantara *loan committe* adalah “Mulai manajer marketing, kabag operasi, manajer legal, sampai direksi. Soalnya ini berjenjang mbak. 50 juta ke atas manajer legal sebagai *loan committe*. Kalau di bawah itu cukup staf legalnya dari masing-masing kantor”.¹³⁰ Peran pengambil kebijakan dalam pembiayaan memiliki kewajiban dalam memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan aman. Pembiayaan kepada pihak terkait atas persetujuan pembiayaan sampai dengan dewan komisaris.¹³¹

¹³¹Kebijakan Marketing Pembiayaan, 5/INT/2/1/2019 Bank Syariah Amanah Sejahtera, Memberi Pelayanan Terbaik dan Islami, 2019, 6

[illegible]

memasukkan prinsip pembiayaan yaitu untuk memenuhi tujuan kemas
halal, baik, adil, dan rido Allah serta tidak boleh diberikan untuk tujuan
maisir, *gharar* dan *bathil*. Jenis-jenis pembiayaan yang ditulis yaitu
pembiayaan berdasarkan penggunaan berupa pembiayaan konsumsi
pembiayaan komersil. Namun belum menjelaskan tentang jenis pembiayaan
berdasarkan akad, syarat rukun. Poin yang tersedia adalah penetapan
ujrah dan nisbah bagi hasil.¹³² Syariah dalam hal ini berfungsi sebagai
agar nasabah menyadari fungsi amanah dalam pembiayaan sehingga N
diminimalisir dan PPAP dapat ditekan.

Penerapan syariah pada kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan
BPRS ini dilakukan dengan menjadikan standard operasional prosedur
bahan kajian DPS ketika terjadi permasalahan. Menurut Syarofi “DP

memasukkan prinsip pembiayaan yaitu untuk memenuhi tujuan kemas
halal, baik, adil, dan rido Allah serta tidak boleh diberikan untuk tujuan
maisir, *gharar* dan *bathil*. Jenis-jenis pembiayaan yang ditulis yaitu
pembiayaan berdasarkan penggunaan berupa pembiayaan konsumsional
pembiayaan komersil. Namun belum menjelaskan tentang jenis pembiayaan
berdasarkan akad, syarat rukun. Poin yang tersedia adalah penetapan
ujrah dan nisbah bagi hasil.¹³² Syariah dalam hal ini berfungsi sebagai
agar nasabah menyadari fungsi amanah dalam pembiayaan sehingga NAB
diminimalisir dan PPAP dapat ditekan.

Penerapan syariah pada kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan
BPRS ini dilakukan dengan menjadikan standard operasional prosedur
bahan kajian DPS ketika terjadi permasalahan. Menurut Syarofi “DPS

memasukkan prinsip pembiayaan yaitu untuk memenuhi tujuan kemas
halal, baik, adil, dan rido Allah serta tidak boleh diberikan untuk tujuan
maisir, *gharar* dan *bathil*. Jenis-jenis pembiayaan yang ditulis yaitu
pembiayaan berdasarkan penggunaan berupa pembiayaan konsumsi
pembiayaan komersil. Namun belum menjelaskan tentang jenis pembiayaan
berdasarkan akad, syarat rukun. Poin yang tersedia adalah penetapan
ujrah dan nisbah bagi hasil.¹³² Syariah dalam hal ini berfungsi sebagai
agar nasabah menyadari fungsi amanah dalam pembiayaan sehingga N
diminimalisir dan PPAP dapat ditekan.

Penerapan syariah pada kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan
BPRS ini dilakukan dengan menjadikan standard operasional prosedur
bahan kajian DPS ketika terjadi permasalahan. Menurut Syarofi “DP

memasukkan prinsip pembiayaan yaitu untuk memenuhi tujuan kemas
halal, baik, adil, dan rido Allah serta tidak boleh diberikan untuk tujuan
maisir, *gharar* dan *bathil*. Jenis-jenis pembiayaan yang ditulis yaitu
pembiayaan berdasarkan penggunaan berupa pembiayaan konsumsi
pembiayaan komersil. Namun belum menjelaskan tentang jenis pembiayaan
berdasarkan akad, syarat rukun. Poin yang tersedia adalah penetapan
ujrah dan nisbah bagi hasil.¹³² Syariah dalam hal ini berfungsi sebagai
agar nasabah menyadari fungsi amanah dalam pembiayaan sehingga N
diminimalisir dan PPAP dapat ditekan.

Penerapan syariah pada kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan
BPRS ini dilakukan dengan menjadikan standard operasional prosedur
bahan kajian DPS ketika terjadi permasalahan. Menurut Syarofi “DP

memasukkan prinsip pembiayaan yaitu untuk memenuhi tujuan kemas
halal, baik, adil, dan rido Allah serta tidak boleh diberikan untuk tujuan
maisir, *gharar* dan *bathil*. Jenis-jenis pembiayaan yang ditulis yaitu
pembiayaan berdasarkan penggunaan berupa pembiayaan konsumsi
pembiayaan komersil. Namun belum menjelaskan tentang jenis pembiayaan
berdasarkan akad, syarat rukun. Poin yang tersedia adalah penetapan
ujrah dan nisbah bagi hasil.¹³² Syariah dalam hal ini berfungsi sebagai
agar nasabah menyadari fungsi amanah dalam pembiayaan sehingga N
diminimalisir dan PPAP dapat ditekan.

Penerapan syariah pada kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan
BPRS ini dilakukan dengan menjadikan standard operasional prosedur
bahan kajian DPS ketika terjadi permasalahan. Menurut Syarofi “DP

sebelum transaksi terjadi. Jadi ada transaksi di bawah transaksi, ini syptom ini dan tidak terdeteksi fatwa...¹³⁸

Peran inilah yang terjadi secara preventif yang melibatkan syariah, dan tidak sekadar berbicara produk syariah. Produk syariahnya jelas sudah terpenuhi yaitu *murabahah*. Namun ternyata perilaku orangnya yang menyebabkan proses ini tidak syariah, karena terdapat suap agar pembiayaan dapat dicairkan. Dalam hal ini peran DPS tidak hanya memastikan produk yang dijalankan syariah, melainkan manajemen dijalankan secara syariah. maka dalam hal ini wujud terhadap hal ini adalah munculnya syariah ke dalam SOP-SOP yang ada. Terutama dalam hal ini adalah SOP pembiayaan, fatwa tentang manajemen syariah, marketing syariah. selain itu diperlukan standarisasi pengetahuan perbankan, perbankan syariah oleh OJK dan diturunkan ke dalam kurikulum-kurikulum pada perguruan tinggi.¹³⁹

SOP pembiayaan, marketing dan manajemen yang berperspektif syariah akan berjalan apabila ada yang menjamin pelaksanaannya. Menurut Supardana, bahwa

Yang menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam pembiayaan adalah bagian legal. Sedangkan yang menilai syariahnya adalah DPS, divisi kepatuhan syariah belum ada, manajemen risiko belum ada, pejabat eksekutif belum ada. Untuk mencari pejabat eksekutifnya pas pasan semua. KMS saja yang 70 orang kesulitan, dan tidak boleh merangkap operasional dll. Strategi itu bagus, tapi kapan bisa dilaksanakan, kita mendukung. Namun sambatnya BPRS, laporan dan laporan. Kapan *nyambut qawene* (kerjanya)...¹⁴⁰

¹³⁸Ibid.,

¹³⁹Ibid.,

¹⁴⁰Didik Supardana, Direksi BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, 10 Januari 2019

Islamic prudential banking pada pembiayaan dalam meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS Jabal Nur Surabaya merupakan impian direksi dalam mengelola lembaga BPRS berdasarkan prinsip syariah secara menyeluruh. Pelaksanaan *Islamic prudential banking* pada pembiayaan dipercayakan kepada AO dan dibawa ke *loan committe*.¹⁴² Artinya operasional syariah pada BPRS dijalankan atau tidak, maka *loan committe* yang menjadi pemutus pembiayaan. Berbeda dengan pendapat Zahra bahwa:

Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Implementasi dari hal ini, sesuai dengan perkembangan volume kegiatan dan asset bank. Jika bank belum besar dan kegiatannya belum banyak, maka fungsi tersebut dijabat oleh direktur sebagai penanggung jawab operasional. Tetapi jika bank sudah besar, maka sebaiknya diangkat pejabat yang khusus menangani kepatuhan, baik itu syariah maupun kepatuhan terhadap aspek-aspek lain; prosedur, hukum...¹⁴³.

¹⁴³ Ahmad Zahra, DPS BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*, 4 Januari 2019

Semangat untuk murni syariah itu menjiwai direksi untuk berbuat lebih besar, namun apalah daya, kesulitan dalam meng-creat produk baru sesuai syariah. Bahkan diakuinya bahwa“terkait dengan prinsip syariah saya pikir dari awal sampai akhir, pemegang saham satu visi dan misi, mestinya sesuai syariah. Kalau yang menjamin sesuai syariah, sampai saat ini masih pemeriksaan DPS sebulan sekali”.¹⁴⁷

Artinya kepatuhan syariah belum dimiliki. Sebagaimana menurut Zahra:

Peran DPS dalam mendukung terlaksananya kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan adalah dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan OJK, peran DPS sebagai penasehat dan pemberi saran serta pengawasan. DPS memberi saran kepada direksi dan manajemen jika diperlukan (ada permintaan) atau saat mengetahui ada hal yg semestinya dilakukan, tapi tidak dilakukan...¹⁴⁸

¹⁴⁷Ibid.,

¹⁴⁸ Ahmad Zahra, DPS BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*, 4 Januari 2019

Selama ini yang memastikan bahwa dari hulu dan hilir operasional BPRS dijalankan secara syariah menurut Subekti adalah “audit sendiri, DPS kita itu aktif setiap bulan rapat, divisi kita itu rapat mengunggah kasus, mereka pegang berkas juga itu sudah dilakukan sejak 2 tahun terakhir ini, apa lagi

[illegible]

terakhir juga ada sertifikasi DPS juga mensyaratkan seperti itu jadi tidak sekedar mereka faham, istilahnya terkait fatwa-fatwa saja tapi lebih ke operasional”.¹⁵³

Syariah dalam operasional menjadi penekanan pada peran DPS yang dibuktikan dalam portofolio DPS yang dilaporkan di OJK. Namun secara teknis, DPS tidak memastikan pembiayaan sampai ke operasional AO. Sebagaimana paparan Rowi bahwa “Sampai terbawah kita tidak mengawasi kesana. Misalnya itu milik harus menjadi milik bank dulu. DSN membolehkan dulu, bank membuat surat kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, seharusnya bank beli dulu, baru dijual kepada nasabah”.¹⁵⁴ Proses operasional berdasar syariah tidak berjalan maksimal.

Syariah yang bisa dirasakan oleh nasabah adalah memastikan kejujuran dan kemauan nasabah secara hakiki karena menghadirkan Allah pada setiap akad. Hal yang terjadi pada nasabah menyangkut tanggungjawab yang seharusnya dibayar rutin kepada bank syariah menjadi lalai, dan tidak menjadi prioritas dengan alasan usaha lesu. Sedangkan usaha secara riil berupa ekspor makanan ringan terus berjalan.¹⁵⁵ Selain hal tersebut, dalam konteks pembiayaan jual beli, maka akad wakalah diberikan bank kepada nasabah, dan nasabah melaksanakan tanggungjawab wakalah kepada bank.

¹⁵³Ibid.,

¹⁵⁴ Roem Rowi, DPS BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*, 22 Januari 2019

¹⁵⁵N1, Nasabah BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*, 10 Oktober 2019

Hal-hal yang memastikan kejujuran, di syariah muncul. Di SOP ada, saat akad dijelaskan kepada nasabah oleh bagian legal. Di tingkat komisaris akan kelihatan pada pembahasan, analisisnya. Terutama akan ditanya sumber pengembalian dari mana, cocok *murabahah* atau *musharakah*. Umumnya yang dibayar dari gaji adalah kebutuhan pribadi. Jika syirkah dianalisis dari bisnisnya. Pengembalian dari proyek, analisis proyeknya...¹⁵⁷

SOP pembiayaan pada BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, sebagai contoh pembiayaan *murabahah* – beli, memuat permulaan pembiayaan, CS/AO menerima berkas dari nasabah memastikan kebutuhan yang diperlukan dalam pembiayaan, pemeriksaan, analisa dan OTS untuk melihat (karakter nasabah, kapasitas keuangan dan usaha untuk mengukur repayment *capacity*, mengajukan pada *capital*, *capacity* dan *condition*), mensurvei agunan, keputusan

¹⁵⁷ Habiburrochman, Dewan Komisaris BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*,16 Januari 2019

Peran komisariss dalam menjaga kehati-hatian dalam pembiayaan berperspektif syariah adalah terkait dengan nominal pembiayaan tertentu yaitu di atas 500 juta, jadi tidak semua pembiayaan diawasi oleh komisariss. Usulan disampaikan oleh Rowi agar memastikan syariah ada maka perlu SDM yang khusus syariah “Mereka kerjanya hanya syariah saja. Biar itu tidak menambah biaya, orang yang sudah ada ditugaskan syariah. Harus dipastikan SDM”¹⁵⁹. Kepastian bahwa tenaga kerja yang ditugaskan menjaga agar syariah secara operasional harian terjaga, maka kompetensi operasional syariah harus diutamakan. Menyangkut operasional, bahwa yang aturan hanya menyangkut produk, sementara orang yang berakad tidak terdapat fatwa secara manajerial, maka menurut Rowi, perlu direkomendasikan kepada DSN agar menerbitkan fatwa menyangkut perilaku, sehingga yang dianggap salah tidak hanya bank saja.¹⁶⁰

Stadart Operating Procedure, Pembelian Bangunan Baru / Bekas, BMI/LEND/05
Roem Rowi, DPS BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*, 22 Januari 2019
Ibid.,

¹⁵⁹ Roem Rowi, DPS BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*, 22 Januari 2019

¹⁶⁰Ibid.,

bagi bank maupun nasabah antara lain menyangkut kualitas aktiva pada pembiayaan bagi hasil. Menurut Subekti bahwa:

Produk kita itu 40% *musharākah*, saat nasabah tidak membayar satu bulan, meskipun sebenarnya itu ada presentase RPBH, tetapi saya anggap, sekali tidak membayar kita dianggap kolektibilitas, kan menjadi tidak fer. Ketentuan OJK nya tidak mendukung syariah. Itu harusnya berkembang seperti itu, ya kasih tempo lah. Proyeksi itu sudah diturunkan buk, dari yang dulu 100% sekarang jadi 80%, harusnya sama dengan yang *murabahah* . kita kan sebenarnya produk kita pingin lebih banyak yang di syirkah...¹⁶¹

Hal itulah yang dirasakan manajemen dalam pengelolaan pembiayaan yang bersifat bagi hasil. Beban yang berdampak pada kolektibilitas jelek terus dihantui, sehingga BPRS pada akhirnya menghindari produk berbagi hasil. Dan disinilah bagian dari dukungan bahwa bagi hasil dalam pembiayaan bank syariah itu teoritis, tidak implementatif, zero atau tidak ada.

Keberatan itu juga diungkapkan oleh Komisaris bahwa regulasi yang memberatkan adalah menyangkut *musharākah*, antara lain:

Yang paling memberatkan itu karena kita banyak *musharākah*, ketika sudah tidak bisa membayar katakanlah itu telat satu hari sudah masuk kolektibilitas, padahal itulah yang memberatkan. Mestinya memang ada tenggang waktu karena nanti akibatnya ya pada hasil yang akan kita laporkan ke nasabah, karena kan kita itu bagi hasil, ketika sudah masuk kolektibilitas berarti harus ada cadangan yang harus dibentuk, nah itu juga akan mengurangi laba...¹⁶².

Keberatan ini memang bukan tanpa alasan, karena di satu sisi bank syariah berharap bisa menerapkan pembiayaan berbasis bagi hasil, namun

¹⁶¹ Dwi Emi Subekti, Direksi BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*, 16 Januari 2019

¹⁶² Habiburrochman, Dewan Komisaris BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*, 16 Januari 2019

4. *Islamic Prudential Banking* pada pembiayaan dalam Meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS Unawi Barokah Sidoarjo

¹⁶³ Adi Nugraha, AO BPRS Bakti Unawi Barokah Sidoarjo, *Wawancara*, 25 Januari 2019

sebagaimana dalam SOP pembiayaan, bahwa peran AO adalah memastikan pembiayaan sesuai kebutuhan nasabah.¹⁶⁴ Pada SOP belum menunjukkan syarat rukun pembiayaan sesuai akad maupun margin / bagi hasil.

Upaya mamastikan syariah dalam operasional BPRS, DPS memiliki peran yang krusial. Menurut Muslichudin, bahwa:

Saya usahakan tiap jumat, kadang sebelum jumat ke kantor. Itu jumat pagi, sholat dhuha bersama, istigosah, kultum. Pada kultum sering saya sampaikan, hanya *murabahah*. Laporannya bulanannya bagaimana bagi hasil, aman. Intinya untuk *murabahah* harga yang dibelikan usahakan sudah milik kita/bank. Kalau sepeda motor, televisi, itu langsung. Kadang-kadang yang bangunan, lain-lain masih belum dibelikan langsung...¹⁶⁵

DPS memerankan diri dalam upaya meningkatkan spiritualitas karyawan dengan harapan antara langka kerja dengan pesan syariahnya melekat pada jiwa karyawan. Munculnya motivasi, transparansi yang semata-mata untuk menggapai ridha Allah SWT. Upaya ini rupanya belum memberikan dampak signifikan untuk BPRS. Posisi kinerja BPRS pada September 2018, ROA negatif 4%, ROE negatif 79% dan NPF berada pada 8,24%.¹⁶⁶ Kinerja yang demikian di dorong oleh pengelolaan pembiayaan pada pembiayaan *murabahah*.

Kadar kesulitan untuk menjamin transaksi pembiayaan *murabahah* dengan *wakalah* sesungguhnya dirasa berat pada pembiayaan untuk barang bangunan. Barang bangunan memiliki jenis yang beragam, satuan yang

¹⁶⁴ Prosedur Mutu, Permohonan Pembiayaan, BPRS/PM/04-01/00 Tanggal 2 Agustus 2010

¹⁶⁵ Muslichuddin, DPS BPRS Bakti Unawi Barokah Sidoarjo, *Wawancara*, 25 Januari 2019

¹⁶⁶ Laporan Keuangan Publikasi OJK, Edisi September 2018, diakses melalui <http://ojk.ac.id>

Peran DPS secara teknis adalah: “Kalau sesuai aturan 3 *sample*, Kalau saya, saya buka semua. Terutama terkait tanda tangan, saksi, kadang kurang. Saksi tanda tangan, Kalau perempuan harus 2 saksi. Intinya meminimalisir hal-hal, jangan sampai dikatakan tidak syariah”.¹⁶⁸ Hal demikian menjadi upaya untuk memastikan bahwa syariah dalam produk bisa terlaksana. Fungsi syariah dalam rekrutmen karyawan hanya sebagai pelengkap. Menurut Muslichuddin bahwa “Untuk menanyai tentang riba. Syariah Itu hanya pelengkap. Setelah

¹⁶⁸Ibid.,

masjid itu di konvensional tidak bisa. Kalau di syariah itu adalah poin yang positif karena dekat dengan tempat ibadah".¹⁷³

Ukuran dengan dengan tempat ibadah mengindikasikan calon nasabah secara ibadah lebih kuat sehingga kesadaran dan amanah terbentuk, sehingga meminimalisir sikap tidak bertanggungjawab. Yang membedakan selain pada *collateral*, juga terkait karakter. Menurut Sukmana, untuk melihat karakter nasabah;

AO mendatangi calon yang akan dibiayai sengaja beberapa menit sebelum adzan. Target dia atau apa yang dia maksudkan dengan mendatangi sebelum adzan, itu adalah melihat sisi karakter dalam 5 C itu yaitu apakah saat adzan berkumandang, calonnya ini akan mengajak udin ke masjid atau enggak. Kalau mengajak ke masjid, probabilitas untuk dikasih pembiayaan lebih besar. Itu masalah karakter...¹⁷⁴

Kedatangan AO melihat secara riil bagaimana calon nasabah dalam menjalankan ibadahnya dengan memantau waktu sholat, tepat waktu atau tidak. Dengan calon nasabah tepat waktu sholat, menandakan kedisiplinan dalam hidup, sehingga diharapkan akan disiplin saat melaksanakan tanggungjawabnya membayar angsuran pada BPRS. Secara teknis operasional tentu direksi senantiasa berharap bahwa BPRS berjalan di bawah ril syariah.

Menurut Ma'arif yang menjamin bahwa syariah terlaksana adalah:

Kalau di kita itu sudah ada di filter mulai dari legal, supervisi di atasnya adalah manajer marketing, bahkan sampai pada divisi kepengurusan. Ini sebagai sistem kontrol, secara siklusnya demikian. “artinya ini sampai level syariahnya gih, tidak hanya risk nya saja” tidak. Kadang kalau ada kaidah-kaidah tertentu pasti, kita akan diskusikan dengan DPS, untuk

¹⁷³Sungkowo, Marketing ManajerBPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, *Wawancara*,26 Pebruari 2019

¹⁷⁴ Raditya Sukmana, DPS BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, *Wawancara*, 16 Maret 2019

Dorongan pelaksanaan *prudential banking* dan prinsip syariah oleh DPS terhadap pembiayaan dapat dilihat capaian pengelolaan NPF yaitu 7,74 persen pada Maret 2017; 4,93 persen pada Juni 2017; 5,32 persen pada September 2017; 4,41 persen pada Desember 2017; 7,28 persen pada Maret 2018 dan 5,62 persen pada Juni 2019. Capaian pengelolaan NPF yang mengalami penurunan merupakan keberhasilan lembaga dalam menerapkan *prudential banking* dan prinsip syariah dalam perjalanannya yaitu pada Juni, Desember 2017 dan Juni 2018.

[illegible]

ANALISIS *ISLAMIC PRUDENTIAL BANKING* PADA PEMBIAYAAN DALAM MEMINIMALISIR NPF DAN PPAP DI BPRS

Pengelolaan NPF dalam meminimalisir alokasi PPAP pada BPRS memiliki keunikan yang berbeda-beda. Keunikan tercermin dari kondisi ekonomi, potensi nasabah dan internal bank. Paparan data dan karakteristik informan pada bab tiga menjelaskan dalam analisis strategi pengelolaan pembiayaan bermasalah agar mampu meminimalisir NPF dan PPAP, antara lain sebagai berikut:

a. Pembiayaan Pada BPRS

Berdasarkan hasil penelitian baik secara primer maupun sekunder, menunjukkan bahwa pembiayaan pada BPRS memiliki ragam jenis pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rata-rata Aktiva Produktif pada 6 BPRS Maret 2017 - Juni 2018 (dalam ribu rupiah)

Akad	BPRS KMS		BPRS Jabal Nur		BPRS Bakti Makmur Indah	
	(ribuan)	%	(ribuan)	%	(ribuan)	%
<i>murabahah</i>	26.407.576,5	56,07	17.629.384,33	71,30	67.459.694,7	50,65
<i>Qard</i>	11.276.868,67	23,94	182.661	0,74	702.000	0,53
Multijsa	1.607.808,5	3,41	79.382,7	0,32	1.853.077,3	1,39
<i>Mudārabah</i>	249.631,3	0,53	0	0,00	0	0,00
<i>Musharākah</i>	269.250	0,57	3.796.039,5	15,35	49.540.762,3	37,20

Lanjutan tabel 4.1

Akad	BPRS KMS		BPRS Jabal Nur		BPRS Bakti Makmur Indah	
	(ribuan)	%	(ribuan)	%	(ribuan)	%
Penempatan pada bank lain	7.290.103,3	15,48	3.039.202,8	12,29%	13.986.982,2	10,50
Jumlah	47.101.238,3		24.726.670,3		133.191.516,5	

Akad	BPRS Unawi Barokah		BPRS Mandiri Mitra Sukses		BPRS Amanah Sejahtera	
	(ribuan)	%	(ribuan)	%	(ribuan)	%
<i>murabahāh</i>	1.193.378,3	40,86	40.518.482,2	60,75	47.366.315,7	53,43
<i>Qarḍ</i>			7.497.154,2	11,24	2.804.644,3	3,16
Multijasa					1.530.509	1,73
<i>Muḍārabah</i>					2.503.471,5	2,82
<i>Musharākah</i>			15.651.741,8	23,47	19.048.700,8	21,49
Penempatan pada bank lain	1.727.052,8	59,14	3.034.231,7	4,55	15.391.927,3	17,36
Jumlah	2.920.431,2		66.701.609,8		88.645.568,7	

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas pembiayaan pada BPRS tersebut adalah menggunakan akad pembiayaan *murabahāh*. Yakni rata-rata berkisar antara 40,86 % sd 71,30% sepanjang Maret 2017 sampai dengan Juni 2018. Pembiayaan *murabahāh* memiliki karakteristik yang bersifat *certainity* (memiliki kepastian) bahwa dalam status hutang, maka dana bank akan dipastikan kembali. Dalam hal dalam pengecualian apabila terjadi wan prestasi pada nasabah.

Pembiayaan dengan akad *qarḍ* memiliki ragam dalam pelaksanaannya, namun ada diantara BPRS tersebut yang tidak mengalokasikan pembiayaan *qarḍ* yaitu BPRS Unawi Barokah Sidoarjo. Jika dilihat dari semangat perusahaan, BPRS Unawi Barokah adalah untuk mencetak perusahaan menuju

Ruh adanya pembiayaan di bank syariah adalah pada pembiayaan yang bersifat bagi hasil, yaitu *muḍārabah* dan *musharākah*. Realitas menunjukkan bahwa pembiayaan dengan skim bagi hasil (*musharākah*) yang terbanyak dijalankan oleh BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, BPRS Mitra Mandiri

Pembiayaan bagi hasil memiliki tingkat risiko yang tinggi, baik risiko bagi bank maupun bagi nasabah. Risiko bagi bank jika nasabah tidak berhasil mendapatkan keuntungan sesuai proyeksi maka bank ikut menanggung pada keuntungan yang diperoleh. Selain itu bank akan terkena dampak pada ukuran kolektibilitas pada pembiayaan bagi hasil. Sebagaimana yang dikeluhkan hampir semua direksi bahwa pada saat proyeksi bagi hasil tidak berhasil didapat maka kolektibilitas akan langsung 4 (macet).¹ Sehingga kebijakan BPRS adalah untuk pembiayaan baru tidak mengalokasikan untuk pembiayaan bagi hasil.²

Menurut Sucipto, bahwa kolektibilitas pada pembiayaan bagi hasil (*muḍārabahdan musharākah*) berlaku akumulasi dalam setahun, bukan pada bulan bersangkutan semata antara lain:

Jadi yang di maksud dibawah 80% itu gak tercapai itu, atau nasabah gak bayar, kemudian langsung kol 4, sebenarnya enggak juga. Karena ketentuannya itu di PBI kualitas aktiva tahun 2011, yang dimaksud dengan perhitungan kolektibilitas *mushar'akah* itu secara akumulasi,

² Tomy Tri Widodo, Account Officer BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*, 16 Januari 2019

terdiri dari 2 kasubag, ada 2 staf, 1 kabag. Jika dalam pengawasan ditemukan kurang benar, sebaiknya begini...⁵

Ketika fungsi konsultatif dalam pengawasan OJK belum bisa dirasakan oleh BPRS, maka bisa jadi dalam seluruh tim pengawas sebaiknya ada yang berfungsi murni fungsi konsultatif sehingga tidak membuat BPRS malu atau takut bertanya.

Upaya BPRS dalam mengembangkan pembiayaan, keterbatasan menciptakan produk baru, hal yang dilakukan diantaranya adalah melakukan sindikasi pembiayaan seperti yang dilakukan oleh BPRS Jabal Nur. Menurut Mulyana, Sindikasi diambil sebagai upaya untuk menjual produk diantara keterbatasan SDM dalam mengcreat produk baru.⁶ Namun demikian hal yang sering terjadi dan yang dilakukan berujung tidak sesuai prosedur.

Menurut Sucipto, dalam rencana bisnis bank sudah masuk, namun dalam pelaksanaannya tidak diberitahukan kepada OJK maksimal 7 hari kerja, dan herannya itu terjadi pada beberapa BPRS yang melakukan sindikasi, akhirnya dikenakan sanksi berupa denda sebesar lima juta rupiah.⁷ Konfirmasi dari Mulyana, bahwa produk yang dijalankan bukan termasuk produk baru, karena pembiayaan dilakukan pada umumnya. Namun demikian dana yang digunakan untuk pembiayaan berasal dari beberapa BPRS. Namun oleh OJK

⁵ Adi Sucipto, Kasubag Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas BPRS pada OJK Regional 4 Jawa Timur. *Wawancara*.04 April 2019

⁶ Agus Mulyana, Direksi BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*, 04 Januari 2019

7 Adi Sucipto, Kasubaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas BPRS pada OJK Regional 4 Jawa Timur. *Wawancara*.04 April 2019

b. Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS

Pembiayaan bermasalah pada BPRS di 3 kabupaten sebagaimana tabel 3.7 menunjukkan kecenderungan NPF kembali membaik pada Desember

⁹ Adi Sucipto, Kasubag Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas BPRS pada OJK Regional 4 Jawa Timur, *Wawancara*, 04 April 2019

Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BPRS antara lain karena adanya keterlambatan pembayaran pembiayaan lebih dari 3 bulan dan tidak tertagih, SOP tidak bebas di bawa kemana-mana (tidak mudah diakses), SOP hanya berlaku bagi AO dan tidak terbuka untuk nasabah, AO mengejar target pembiayaan tersalurkan sehingga data dimanipulasi, AO membuat bukti pembiayaan fiktif, nasabah tidak mengelola usaha secara profesional, dan adanya perubahan karakter nasabah. Menurut Ismail, NPF terjadi karena nasabah dan bank terdapat *asimmetric information*. *Asimmetric information* itu ada dua hal yaitu *adverse selection*, dan *moral hazard*.¹² Menurut Ryandono, ada sebagian nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah disebabkan kondisi bisnis dan ekonomi nasabah.¹³

NPF pada BPRS berakibat adanya kewajiban pembentukan PPAP sebagaimana ketentuan OJK. Ketentuan PPAP berkaitan erat dengan kualitas

¹³ Muhammad Nafik Hadi Ryandono, Expert di bidang Ekonomi Islam, *Wawancara*, 08 Juli 2019

aktiva pada BPRS antara lain “ketentuannya di kualitas aktiva, untuk kolektibilitas lancar PPAP dibentuk 0,5%, untuk kolektibilitas 2 (kurang lancar) itu dibentuk 10%, untuk kolektibilitas 3 (diragukan) dibentuk 50%, untuk kolektibilitas 4 100%”.¹⁴ Persentase yang dimaksud adalah persentase dari jumlah pembiayaan pada kualitas aktiva yang dimaksud.

Realitas pemenuhan PPAP pada 6 BPRS sudah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan antara PPAP yang wajib dibentuk dan yang telah dibentuk. PPAP pada 5 BPRS yang telah dibentuk melebihi 100 persen PPAP yang wajib dibentuk sebagai bentuk *prudential banking* dalam pengelolaan pembiayaan. PPAP yang dibentuk sebesar 103 persen hingga 125persen. Meskipun sejatinya dengan PPAP yang dibentuk tinggi akan mengurangi laba BPRS. Sedangkan BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo membentuk PPAP rata-rata sebesar 2,4 milyar rupiah dari kewajiban yang harus dibentuk sebesar 2,9 milyar rupiah atau sebesar 84,5 persen sepanjang Maret 2017 hingga Juni 2018. Menurut Subekti bahwa:

Harapan bulan depannya bisa terbayar sehingga keluar dari kolektibilitas, selain itu juga mempertimbangkan laba saat itu, dimana perolehan laba kita yang masih cukup minim, dan jika kami melakukan pembukuan PPAP maka bisa-bisa laba kita bisa minus, yang terjadi di posisi laporan publikasi bulan Maret 2018, laba kita saat itu minus karena ada koreksi pembukuan PPAP sebagai hasil tindak lanjut temuan OJK...¹⁵

¹⁴ Adi Sucipto, Kasubag Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas BPRS pada OJK Regional 4 Jawa Timur. *Wawancara*.04 April 2019

¹⁵ Dwi Emi Subekti, Direksi BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, Short Massage System Melalui Whatsap Online pada 19 Mei 2019

Dampak dari pemenuhan PPAP adalah mengurangi laba yang dihasilkan. Pemenuhan PPAP pada BPRS Jabal Nur, BPRS Amanah Sejahtera sesuai dengan kewajiban yang harus dibentuk.¹⁶ Pemenuhan PPAP dan kerugian yang terjadi juga diakibatkan koreksi laporan keuangan yang dilakukan oleh OJK maka pembebanan biaya bagi BPRS menumpuk pada bulan koreksi.¹⁷ Yang menjadi pertanyaan, kenapa terjadi koreksi laporan keuangan sehingga menghasilkan dampak pada kondisi kesehatan lembaga yang begitu tragis. Jika pengawasan yang dilakukan OJK secara berkala dan menemukan simpul-simpul masalah pada poin laporan keuangan, tentu tidak menjadi beban yang menumpuk bagi BPRS, dan segera ditindaklanjuti oleh BPRS. Artinya kejutan akibat koreksi dan PPAP sebagai dampak pembiayaan bermasalah, menjadi beban bagi BPRS karena berdampak pada keuntungan, dan kesehatan BPRS.

¹⁷ Agus Mulyana, Direksi BPRS Jabal Nur dan Rismarini, Direksi BPRS Amanah Sejahtera

Dari sisi nasabahnya, pertama, melihat reputasi nasabah. Perjalanan nasabah selama berhubungan dengan nasabah jika berjalan baik, maka peluang pembiayaan bermasalah kecil. Kedua, dengan monitoring. Monitoring itu bisa dilakukan dengan dua hal yaitu monitoring terhadap dana yang disalurkan apakah penggunaannya sesuai akad atau monitoring terhadap usaha nasabah. Oleh karenanya diperlukan silaturahmi dengan nasabah bukan hanya sebelum pembiayaan, tetapi setelah terjadi pembiayaan. Sedangkan dari sisi bank-nya, dilakukan dengan meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan mendeteksi nasabah...¹⁸

Sedangkan hal yang bersifat korektif yang dilakukan BPRS antara lain penagihan secara terus menerus, melakukan *rescheduling* dan *reconditioning* hingga pemberlakuan lelang jaminan untuk menyelesaikan tanggungan

[illegible]

a. Pembiayaan Pada BPRS

Menurut Naf'an, pembiayaan *murabahah* “memberikan keuntungan yang telah disepakati di awal, tetap dan berkelanjutan, tidak mensyaratkan banyak upaya untuk melakukan pengawasan dan risiko gagal bayar yang relatif lebih kecil dibanding akad bagi hasil”.²³ Dari makna tersebut, bahwa pembiayaan *murabahah* tidak mensyaratkan banyak pengawasan, sehingga memberikan dampak efisiensi bagi bank. Bank berfikir untuk memprospek nasabah berikutnya dan seterusnya sehingga secara kuantitatif jumlah nasabah terus meningkat dan jumlah nominal pembiayaan juga bertambah.

²³Naf'an, *Pembiayaan Musharakah & Mudarabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)138.

Ruh adanya pembiayaan di bank syariah adalah pada pembiayaan yang bersifat bagi hasil, yaitu *muḍārabah* dan *musharākah*. Realitas menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad bagi hasil yang terbanyak dijalankan oleh BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, BPRS Amanah Sejahtera Gresik, BPRS Jabal Nur Surabaya, BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya dan terakhir adalah BPRS Bakti Mandiri Mitra Sukses Gresik. Sedangkan yang tidak mengalokasikan pembiayaan bagi hasil adalah BPRS Unawi Barokah Sidoarjo. Pembiayaan bagi hasil memberikan keuntungan besar bagi BPRS jika nasabah mendapatkan keuntungan yang besar pula. Itulah letak keadilan dalam ekonomi Islam.

²⁸Mohammad Saleh et al., “Profit And Loss Sharing System and Profitability of Islamic Rural Bank in East Jawa Indonesia”, *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, Vol. 5, No. 9 (2018), 4986–4991.

Munculnya kategori kolektibilitas pada pembiayaan bagi hasil tersebut bisa dipahami dan diimplementasikan dengan benar, maka diperlukan

³⁰ Tomy Tri Widodo, Account Officer BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*, 16 Januari 2019

b. Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS

³⁴M. Kabir Hassan and Issouf Soumaré, “Guarantees and Profit-Sharing Contracts in Project Financing”, *Journal of Business Ethics*, 130, no. 1 (August 2015): 231–249.

[illegible]

dalam membayar, maka menurut Ryandono, perlu menerapkan sebagaimana dalam al-qur'an (Al-Baqarah ayat 283) yaitu memberikan penangguhan. Strategi yang ditawarkan untuk mengantisipasi NPF adalah biaya *fixed* (margin), adanya agunan dan pemberian tangguhan.

Namun demikian menurut Alandejani pembiayaan dengan keuntungan fixed memberikan dampak terhadap NPF lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan profit and loss sharing.⁴⁰ Hal itu nampak pada penelitian ini, bahwa dominasi pembiayaan adalah pada pembiayaan dengan akan *murabahah*, dan NPF yang terjadi mayoritas di atas *benchmark* OJK. Maka jika berharap NPF akan menurun, akad pembiayaan perlu di geser pada pembiayaan berbasis *profit and loss sharing* baik *muḍārabah* maupun *musharakah*. NPF akan berpotensi turun jika dilakukan diversifikasi akad yang digunakan dari akad *murabahah*, menuju berbagai akad yang lain baik bagi hasil, ijarah baik *ijarah* biasa maupun *ijarah mutahiyah bittamlik*. Akad yang bervariasi memberikan peluang kepada nasabah memilih akad yang sesuai.

NPF pada BPRS maupun perbankan menurut Amin et al⁴¹, Nikolaidou⁴² disebabkan oleh variabel makroekonomi. Menurut Amin dalam jangka panjang NPF dipengaruhi oleh variabel makroekonomi yang berdampak pada

⁴⁰Maha Alandejani and Mehmet Asutay, “Nonperforming Loans in the GCC Banking Sectors: Does the Islamic Finance Matter?”, *Research in International Business and Finance*, Vol. 42 (December 2017), 832–854.

⁴¹Rukhul Amin, Haqiqi Rafsanjani, and Abdul Mujib, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non-Performing Financing: Studi Kasus pada Bank dan BPR Syariah di Indonesia", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2017).

⁴²Eftychia Nikolaidou and Sofoklis D. Vogiazas, “Credit Risk Determinants for the Bulgarian Banking System”, *International Advances in Economic Research*, Vol 20 (2014), 87–102.

kemampuan membayar, dan besaran tingkat pengembalian serta total pembiayaan berpengaruh terhadap gagal bayar. Menurut Nikolaidou variabel makroekonomi yang mempengaruhi NPL di Bulgaria antara lain adanya kegiatan konstruksi, pengangguran dan pinjaman domestik.

c. Pemenuhan PPAP Pada BPRS

Pembiayaan bermasalah di BPRS berakibat pada kewajiban pembentukan PPAP sebagaimana ketentuan OJK. Ketentuan PPAP berkaitan erat dengan kualitas aktiva pada BPRS antara lain “ketentuannya di kualitas aktiva, untuk lancar PPAP dibentuk 0,5%, untuk kol 2 (kurang lancar) itu dibentuk 10%, untuk kol 3 (diragukan) dibentuk 50%, untuk kol 4 100%”.⁴³ Persentase yang dimaksud adalah persentase dari jumlah pembiayaan pada kualitas aktiva yang dimaksud.

Realitas pemenuhan PPAP pada 6 BPRS, terdapat 5 BPRS yang sudah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan antara PPAP yang wajib dibentuk dan yang telah dibentuk. PPAP pada 5 BPRS yang telah dibentuk melebihi PPAP yang wajib dibentuk sebagai bagian penerapan *prudential banking* dalam pengelolaan pembiayaan. Meskipun sejatinya dengan PPAP yang dibentuk tinggi akan mengurangi laba BPRS. Penyebab pembentukan PPAP pada bank syariah menurut Iman karena risiko kredit dan ukuran perusahaan.⁴⁴

⁴³ Adi Sucipto, Kasubag Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas BPRS pada OJK Regional 4 Jawa Timur, *Wawancara*, 04 April 2019

⁴⁴Amalia Nurul Iman and Adityawarman, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 4, No. 3 (2015), 1–8.

Jika pada 5 BPRS mengalokasikan PPAP dengan melebihi kewajiban, berbeda dengan BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo membentuk PPAP sebesar rata-rata 85 persen, Menurut Subekti NPF yang sedang berlangsung memiliki keyakinan akan tertagih, dan membaik pada bulan berikutnya. Strategi ini betul-betul dibutuhkan oleh BPRS Bakti Makmur guna memaksimalkan kinerja. Keyakinan bahwa PPAP yang dibentuk akan mengurangi laba, maka pilihan strategi yang pahit pun diambil.⁴⁵ Alokasi PPAP di bawah kewajiban yang harus dibentuk pada BPRS Bakti Makmur Indah memberikan peningkatan kinerja ke arah lebih baik. Langkah ini masih *save* di dalam pengawasan OJK, sehingga tidak dikenakan sanksi atas PPAP yang bentuk.

Strategi alokasi PPAP di bawah kewajiban yang harus dibentuk dilakukan dalam rangka untuk mengelola dana produktif. Pengeolaan dana produktif diharapkan bisa menyelamatkan usaha BPRS dengan senantiasa mendapatkan keuntungan dan kinerja BPRS akan terjaga dengan baik. Kondisi ini menjadi dilema dalam hal pemenuhan kewajiban, namun demikian

[illegible]

Pembiayaan bermasalah dan rasio total pembiayaan sebesar 95% menurut Pop et al. memberikan signifikansi yang besar dalam memberikan dampak pada pengelolaan kinerja dan konsentrasi kepemilikan saham.⁴⁶ Oleh karenanya diperlukan likuiditas yang besar sehingga bisa mengantisipasi sensitifitas NPF dalam operasional BPRS.PPAP yang tidak dicadangkan secara utuh sesuai kewajiban, jika merujuk pada Pop adalah sebagai usaha untuk meningkatkan likuiditas BPRS. Koreksi yang dilakukan oleh OJK menjadi pendorong BPRS tidak mengalokasikan PPAP yang cukup.

NPF pada BPRS terjadi karenaketerlambatan pembiayaan lebih dari 3 bulan dan tidak tertagih, SOP tidak bebas di bawa kemana-mana, SOP hanya berlaku bagi AO dan tidak terbuka untuk nasabah, AO mengejar target pembiayaan tersalurkan sehingga data-data persyaratan pembiayaan, kelayakan pemberian pembiayaan dimanipulasi, AO membuat bukti pembiayaan fiktif, tidak ada peran syariah dalam menjaga kerja dan kinerja karyawan, nasabah tidak mengelola usaha secara profesional, dan adanya perubahan karakter nasabah yang semula bertanggung jawab, rutin membayar angsuran menjadi tidak mau membayar.NPF terjadi karena faktor internal BPRS maupun karena faktor nasabah.

[illegible]

Monitoring yang dimaksud menurut Ikatan Bankir Indonesia dapat dilakukan dengan kunjungan berkala, pemenuhan *covenant* (laporan penjualan berkala, laporan *inventory*, laporan tagihan), penilaian jaminan berkala, monitoring pembayaran kredit, serta penanganan pembiayaan bermasalah.⁴⁸ Hal yang dilakukan BPRS dalam upaya pengelolaan pembiayaan bermasalah adalah strategipreventif dan korektif. Hal preventif yang dilakukan oleh BPRS yang bersifat preventif antara lain adalah melakukan analisis 5C, memastikan pembiayaan bebas *side streaming*, bebas dari kebijakan gratifikasi dari nasabah, peningkatan kompetensi SDM AO dan melakukan review aturan yang menjadi potensi pembiayaan bermasalah serta tidak segan mengeluarkan karyawan bila dijumpai menerima gratifikasi dari nasabah.

Upaya preventif dalam menghindari risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah*, bank bisa meminta uang muka kepada nasabah.

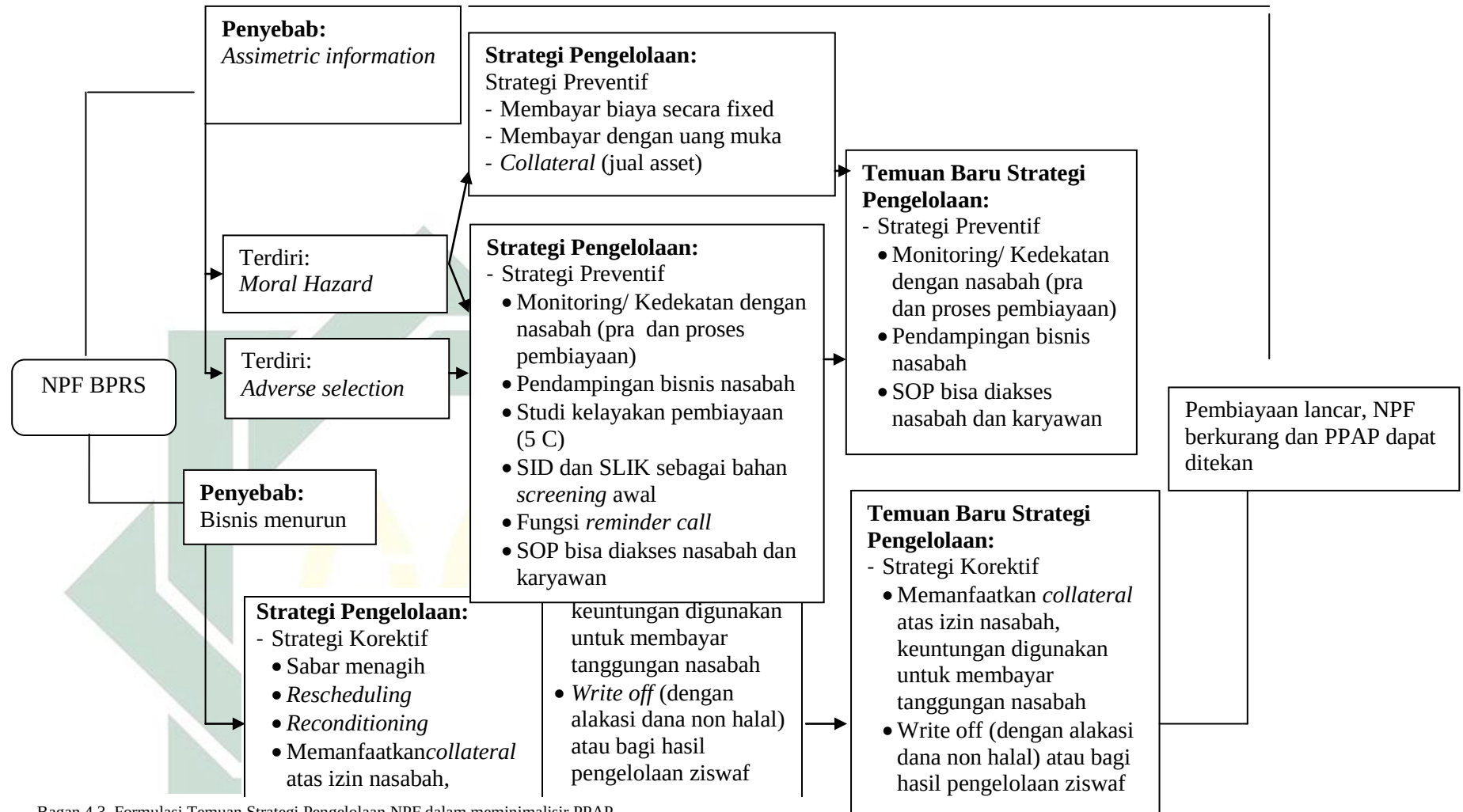
⁴⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Supervisi Audit Intern Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), 27–28.

Strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah menurut Mazzu dilakukan dengan *on balance sheet strategy* dan *off balance sheet strategy*.⁵⁶ *On balance sheet strategy* dilakukan dengan restrukturisasi, sabar dalam menagih, likuidasi maupun penyitaan jaminan. Sedangkan *off balance sheet strategy* mengatur portolio pembiayaan agar risiko terpencar dan memindahkan pembiayaan bermasalah dari neraca, menghilangkan kepemilikan pembiayaan kepada eksternal. Konsep restrukturisasi aman digunakan bagi BPRS yang memiliki tingkat likuiditas yang cukup serta asset yang memadai.

⁵⁶Sebastiano Mazzù and Francesco Muriana, “A Strategic Approach to Non-Performing Loans Treatment in Banking: Options and Rules for Decision-Making”, *International Research Journal of Finance and Economics*, No. 166 (2018), 34–53.

⁵⁷Muhammad Nafik Hadi Ryandono, Expert di bidang Ekonomi Islam, *Wawancara*, 08 Juli 2019

FORMULASI TEMUAN STRATEGI PENGELOLAAN NPF DALAM MEMINIMALISIR PPAP



Bagan 4.3. Formulasi Temuan Strategi Pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP
Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian

Proposisi minor pada fokus pertama penelitian ini adalah “apabila pembiayaan bermasalah dikelola secara preventif dan korektif, maka pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir dan alokasi penyisihan penghapusan aktiva produktif dapat ditekan”.

Islamic Prudential Banking pada pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan menjadikan syariah sebagai bisnis yang memiliki nilai jual. Mengingat jika bank konvensional mampu menarik keuntungan rendah kepada nasabah karena ukuran perusahaan besar, maka bank syariah untuk mengikuti dengan meminta keuntungan rendah pada pembiayaan menjadi mustahil. Hal itu disebabkan karena operasional BPRS betul-betul ditekankan pada pengelolaan pembiayaan dengan baik. Potensi penerapan *Islamic prudential banking* pada pembiayaan sungguh terbuka lebar, maka berikut disajikan paparan data dan pembahasannya antara lain:

1. Hasil Penelitian

a. Penelitian Penerapan *Prudential Banking* pada Pembiayaan di BPRS

Penerapan *prudential banking* pada pembiayaan di BPRS dijalankan berdasarkan aturan internal berupa kebijakan pembiayaan, SOP Pembiayaan, analisa pembiayaan dan integritas pelaksana pembiayaan. Kebijakan pembiayaan dan SOP pembiayaan memiliki corak dan ragam yang berbeda di masing-masing BPRS. SOP pembiayaan diberikan kepada AO saat pendidikan awal, kontrak kerja, dan ada sebagian BPRS menjadikan SOP dibahas pada saat *meeting* di kantor. Namun demikian, mayoritas SOP tidak diberikan kepada AO agar setiap saat bisa dibaca dan dijadikan pegangan. Hanya BPRS Amanah Sejahtera yang SOP nya dimasukkan dalam *website* BPRS dan pada BPRS Mitra Mandiri Sukses dibuatkannya buku saku terkait dengan pembiayaan.

Permasalahan yang timbul pada BPRS Karya Mugi Sentosa muncul berawal dari SOP yang dimiliki. Oleh karenanya semua pihak dalam BPRS harus memahami dan menjadikan SOP sebagai dasar operasional. Menurut Ismail jika fungsi SOP itu adalah layanan, maka SOP itu harus diketahui oleh orang luar, pemangku kepentingan. Dalam hal ini jika SOP pembiayaan, maka calon nasabah harus mengetahui prosedur layanan pembiayaan, bagaimana jika nasabah mau melakukan pembiayaan, bagaimana prosedurnya. Jadi kalau

itu perlu dipertimbangkan.⁶⁰ Hal yang bisa menjembatani kepentingan BPRS, DPS dan OJK terkait adanya kebijakan dan SOP pembiayaan yang adaptif terhadap permasalahan, maka BPRS, DPS bekerjasama dengan senantiasa melibatkan OJK sebagai fungsi konsultatif, sehingga menghasilkan SOP sesuai lokalitas masing-masing BPRS.

BPRS Bakti Makmur Indah, memastikan karakter nasabah baik, pada nasabah pasar adalah bahwa nasabah telah menabung bertahun-tahun di pasar. Selain itu tidak memperkenalkan pembiayaan dari nasabah yang berasal dari luar kota dan melalui sistem informasi Debitur (SID) atau SLIK. Namun demikian pada BPRS Unawi Barokah belum memiliki SLIK. Secara umum bahwa *prudential banking* pada pembiayaan *murabahah* dipastikan dengan bukti kuitansi pembelian barang jika dalam bentuk *wakalah*. Namun demikian pernah ditemukan bahwa kuitansi tidak langsung bisa diterima seketika, sehingga tertunda diterima BPRS. Bahkan di BPRS Bakti Makmur Indah pernah ditemukan kasus bahwa AO membuat kuitansi pada nasabah, dan akhirnya ketika pembiayaan bermasalah karena nasabah meninggal, ahli waris tidak merasa menerima barang yang dimaksud. Begitu juga terjadi pada BPRS Mandiri Mitra Sukses, disiplin proses pembiayaan tidak dijalankan oleh AO karena telah menerima *fee* dari nasabah. Begitu juga pada BPRS KMS, ada AO yang menerima 5% dari pembiayaan. AO yang demikian sudah di dikeluarkan dari BPRS.

⁶⁰Munawar Ismail, Expert di bidang Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, *Wawancara*, 11 April 2019 di Hotel Seraton Surabaya

Aturan *prudential banking* bagi BPRS sebagaimana aturan POJK⁶¹ maka secara lengkap dan terintegrasi, pengelolaan operasional BPRS didasarkan pada tata kelola BPRS yang baik. *Prudential banking* pada pembiayaan di BPRS Surabaya, Sidoarjo dan Gresik dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Dalam

[illegible]

Prudential banking pada pembiayaan memastikan bahwa pembiayaan dijalankan secara hati-hati sehingga bisnis tidak mengalami permasalahan, meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS. Bisnis BPRS diharapkan berjalan aman, NPF pada taraf yang wajar, dan *perform* lembaga dalam kategori sehat.

Islamic prudential banking pada pembiayaan dalam upaya memastikan bahwa syariah dijadikan acuan di dalam setiap kehati-hatian yang dilaksanakan, baik menyangkut aturan OJK, fatwa DSN serta sesuai dengan aturan syariah dalam bermuamalah, menjamin terlaksananya operasional pembiayaan BPRS berdasar prinsip syariah sehingga mampu meminimalisir NPF dan PPAP pada BPRS.

[illegible]

pembiayaan yaitu kebijakan pembiayaan BPRS Jabal Nur Surabaya, BPRS Mitra Mandiri Sejahtera, sedangkan pada BPRS Karya Mugi Sentosa kebijakan pembiayaan bersifat umum, memasukkan syariah sebagai prinsip, namun secara mendetail produk tidak dituangkan Kebijakan pembiayaan pada BPRS amanah sejahtera setiap tahunnya dilakukan review, namun belum memasukkan syariah secara mendalam di dalam kebijakan pembiayaan, syarat rukun pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan.

Upaya memaksimalkan syariah sebagai landasan operasional dilakukan pada sebagian kecil BPRS dengan melibatkan DPS secara aktif dalam mengkaji setiap permasalahan, DPS berbicara SOP, peran marketing, tentang penggajian berdasarkan insentif, teknik komunikasi karyawan dengan nasabah yang sesuai syariah sehingga sering kali hasil kajian tersebut mengeluarkan opini yang harus ditindaklanjuti oleh direksi. Hal ini terjadi pada BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya (KMS). Hal ini terbukti membawa NPF BPRS KMS terus membaik, keuntungan dapat diperoleh. Sementara pada BPRS yang lain fungsi DPS semata-mata menjalankan aturan dalam pengawasan yang dilaksanakan secara sampling, minimal 3 sampling transaksi pembiayaan, dan pemberian saran serta opini jika diminta oleh manajerial. Sedangkan opini secara umum diberikan hanya pada produk baru, sehingga jika tidak ada produk baru, opini nyaris tidak ada. Sementara pada BPRS KMS opini tidak hanya menyangkut produk baru, melainkan setiap operasional yang

Islamic prudential banking pada pembiayaan di BPRS menyalurkan pembiayaan dengan memperhatikan pendekatan dalam *Character, Collateral, Capacity, Capital and Condition of economic* (5C). 5C yang diterapkan BPRS dan berbeda dalam konteks syariah dengan konven adalah mayoritas BPRS memastikan bahwa produk yang didanai, adalah produk yang halal, menerapkan akad kerjasama langsung kepada pembelian barang sejenis misal motor, mobil, rumah dll, kerjasama langsung dengan pihak dealer dan supplier. Sedangkan untuk pembiayaan kebutuhan seperti toko kelontong nasabah pasar, bahan bangunan, dimana jenis barang beragam belum dilakukan kerjasama dengan supplier. Artinya pembiayaan dilakukan dengan akad *wakālah*.

[illegible]

Akad pembiayaan *murabahah* ditemukan di BPRS Mandiri Mitra Sukses hanya membunyikan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana sejumlah nominal uang, dan menentukan margin pembiayaan. Hal ini dapat dipahami bahwa pembiayaan sebatas penyaluran dana. Akad pembiayaan *murabahah* seharusnya dipastikan bahwa bank melakukan penyaluran dana seharga nominal barang (nama barang) yang dijual kepada nasabah sebagai pembiayaan, dan selanjutnya bank berkewajiban memberikan margin atas pembiayaan jual beli barang (nama barang) senilai (nilai nominal) rupiah. Definisi pembiayaan yang dilangsungkan belum tersedia pada akad tersebut. Akad pembiayaan pada BPRS amanah sejahtera sudah memasukkan syarat

Syariah pada dasarnya tidak hanya pada produk melainkan pada orang yang melaksanakan akad. Yang demikian belum ada fatwa DSN yang dijadikan pegangan. Menurut DPS KMS bahwa diperlukan fatwa manajemen syariah, marketing syariah, karena orang yang berakad harus syariah dulu, sehingga produk pembiayaan akan berjalan sesuai syariah. Menurut DPS Bakti Makmur indah diperlukan fatwa DSN terkait perilaku di dalam bertransaksi di dalam bank syariah dengan harapan setiap orang bertransaksi mengikuti fatwa,

⁶³ Adi Sucipto, Pengawas BPRS, OJK Wilayah 4 Surabaya, *Wawancara*, 4 April 2019

Kajian terhadap semua SOP berbasis syariah, template akad sesuai syariah, menurut Ismail bahwa DSN perlu merubah aturan tentang DPS, karena selama ini bebannya bagi BPRS sudah pasti, tapi kemanfaatannya belum maksimal.⁶⁵ Menurut Sucipto, DPS harus kreatif sehingga bisa berperan lebih banyak agar syariah bisa diterapkan dalam operasional BPRS.⁶⁶

Yang menjamin syariah terlaksana dalam pembiayaan pada BPRS mayoritas melekat pada bagian operasional. Pada BPRS KMS, kepastian atas syariah menjadi tugas bagian legal. Memastikan tanda tangan dan kelengkapan sesuai dengan syariah atau belum. Mayoritas BPRS belum memiliki direktur kepatuhan, sebagian kecil yang dimiliki adalah divisi manajemen risiko dan kepatuhan (MRK) yaitu di BPRS Amanah Sejahtera. MRK berfungsi memastikan pemenuhan syariah pada setiap transaksi pembiayaan. Namun

⁶⁵Ibid.,

⁶⁶ Adi Sucipto, Pengawas BPRS, OJK Wilayah 4 Surabaya, *Wawancara*, 4 April 2019

Kepastian Syariah pada BPRS Jabal Nur dipercayakan pada AO dan *loan comitte* serta diawasi oleh DPS. Sementara fungsi DPS hanya memastikan akad pada produk baru yang akan diluncurkan, sedang akad pada produk yang sudah jalan, di evaluasi syariahnya secara sampling 3 berkas serta memberi saran jika diminta. Artinya jika tidak diminta, saranpun tidak akan tersampaikan.

[illegible]

wakalah dalam bangunan. Menurut Komisaris BPRS Bakti Makmur, Syariah akan muncul pada pembahasan saat rapat dengan komisaris. Kondisi yang beragam ini, jaminan syariah terlaksana bervariasi, dan karenanya diperlukan adanya pejabat yang bertanggung jawab memantau operasional BPRS dijalankan sesuai prinsip syariah.

Usulan adanya petugas sendiri yang menangani syariah pada operasional BPRS, baik berupa direktur kepatuhan syariah maupun divisi syariah, petugas yang ditugaskan menangani khusus syariah yang bersifat independen dalam melaksanakan syariah secara operasional muncul dari DPS Jabal Nur, DPS Bakti Makmur Indah, DPS Mandiri Mitra Sukses. Hal ini akan semakin menjamin bahwa syariah akan diterapkan pada operasional BPRS. Menurut Sucipto, bahwa aturan kepatuhan pada dasarnya sudah tersedia dalam POJK tentang manajemen risiko dan kepatuhan, namun pada pelaksanaannya diserahkan pada BPRS masing-masing atas kemampuan yang dimiliki. OJK tidak bisa memaksa BPRS terkait hal demikian.⁶⁷

Penerapan produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sulit diimplementasikan dan dikeluhkan semua BPRS di tempat penelitian adalah terkait dengan aturan kolektibilitas pembiayaan *muḍārabah* dan *musharākah*, ketika nasabah terlambat membayar angsuran, langsung kolektibilitas 4. Menurut Sucipto, tidak juga harus dipahami demikian, karena kolektibilitas itu berlaku:

⁶⁷ Adi Sucipto, Pengawas BPRS, OJK Wilayah 4 Surabaya, *Wawancara*, 4 April 2019

Pembiayaan *muḍarabah* dan *musharakah* tidak harus angsurannya disepakati secara bulanan, katakanlah dalam 1 tahun ngangsurnya tiap 3 bulan, boleh. Angsuran ini bisa pokok bisa bagi hasil. Bisa misal pokoknya di taruh di akhir, tiap bulan bagi hasil. petani, yang hasilnya dari panen, sesuaikan dengan panennya. Kalau tiap 4 bulan sekali, kita tetapkan di akadnya 4 bulan sekali. Mungkin pokoknya di tiap 4 bulan itu monggo, atau diakhir jangka waktu monggo. Tetapi kalau toko bangunan, itu hasilnya bisa bulanan. Janganlah bagi hasilnya ditetapkan 6 bulan sekali. Ini kan *loss* banget, longgar banget dari sisi banknya. Cuma dari sisi prinsip kehati-hatiannya, *prudential banking*-nya ada risiko likuiditas. Coba kalau pembiayaannya model pelunasannya semua di belakang, *cash flow* nya gimana ini. Kalau ada nasabah narik tabungan, duitnya belum balik. Masih disana semua, belum lagi kalau bendol buri iku, nanti dari mana, risiko tinggi. Dari mana duitnya nasabah itu...⁶⁹

⁶⁸Ibid.,[illegible]

a. Pembahasan Hasil Penelitian Penerapan *Prudential Banking* Pada Pembiayaan di BPRS

Pembiayaan dijalankan berdasarkan aturan eksternal berupa regulasi yang dikeluarkan OJK dan Bank Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, aturan internal BPRS berupa kebijakan dan SOP Pembiayaan. Kebijakan pembiayaan pada BPRS sebagaimana dalam pedoman kredit BPR BPRS belum memiliki aturan pedoman pembiayaan maka, pedoman pembiayaan pada BPRS mengikuti BPR, setidaknya memuat:

Kebijakan pemberian kredit yang sehat (prosedur dan kewenangan perkreditan, prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi, pengawasan kredit, kredit yang perlu mendapat perhatian khusus, prosedur penanganan kredit bermasalah, dan penyelesaian agunan yang dikuasai BPR), kebijakan penilaian agunan, kebijakan pemberian kredit pada pihak terkait, kebijakan kredit pada sektor ekonomi risiko tinggi...⁷⁰

Pada aturan BPRS perlu memasukkan syariah dalam kebijakan pembiayaan berupa produk pembiayaan yang memastikan syarat rukun terpenuhi, termasuk di dalamnya kepastian barang atau usaha yang di danai adalah halal, memastikan keuntungan baik itu margin, bagi hasil, ujah ataupun bonus.

[illegible]

Kebijakan dan SOP pembiayaan ini diberikan AO saat pendidikan awal, kontrak kerja hingga sebagian BPRS dibahas saat ada meeting di kantor. Namun Mayoritas SOP tidak diberikan kepada AO agar setiap saat bisa dibaca dan dijadikan pegangan. Hanya BPRS Amanah Sejahtera yang SOP nya dimasukkan dalam web BPRS. BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik membuat buku saku mengenai pembiayaan yang dibawa AO untuk ke lapangan. Sementara yang dialami BPRS Karya Mugi Sentosa, bahwa permasalahan pembiayaan itu muncul berawal dari SOP yang dimiliki.

Menurut Ismail jika fungsi SOP itu adalah layanan, maka SOP itu harus diketahui oleh orang luar, pemangku kepentingan. Dalam hal ini jika SOP pembiayaan, maka calon nasabah harus mengetahui prosedur layanan pembiayaan, bagaimana jika nasabah mau melakukan pembiayaan, bagaimana prosedurnya. Jadi kalau punya dan tidak ditunjukkan ya repot.⁷¹ Menurut Ilin peningkatan kemampuan dalam operasional perbankan seperti integrasi aturan eksternal (Undang-Undang, POJK, PBI maupun aturan internal berupa SOP akan mengidentifikasi peningkatan ketahanan operasional perbankan.⁷² Semangat menguatkan operasional pembiayaan melalui SOP, merupakan bagian menjadikan pembiayaan berjalan aman.⁷³ Kekurangan dalam operasional pembiayaan akan terevaluasi dari perjalanan SOP yang dijalankan

⁷¹ Munawar Ismail, Expert di bidang Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, *Wawancara*, 11 April 2019 di Hotel Seraton Surabaya

⁷²Thomas Ilin, "The Functional Integration of Operations Management in Banks," *The IUP Journal of Operations Management*, Vol. 14, No. 2 (2015), 34–58.

⁷³D'Hulster and Montes-Negret, *Micro-Prudential Supervision:...*

[illegible]

terkait dengan pembiayaan. Internal audit keluar disebabkan gaji yang terbatas (kecil). Pada BPRS Mandiri Mitra Sukses, kepastian *prudential banking* dilaksanakan system *cross correction* yaitu mulai AO, *manager marketing*, tim analis dan tim legal. *Cecklist* pembiayaan belum memunculkan sikap syariah dalam operasional BPRS baik dalam hal penyampaian lisan, mengajak kepada nasabah untuk menyadari akad pembiayaan yang dilakukan, proses lainnya.

Aturan *prudential banking* bagi BPRS sebagaimana aturan POJK⁸². *Prudential banking* pada pembiayaan di BPRS Surabaya, Sidoarjo dan Gresik disalurkan dengan memenuhi ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Dalam rangka *prudential banking*, pencairan pembiayaan dilakukan di kantor BPRS, dan jika nasabah berhalangan maka dipersyaratkan surat kuasa pencairan. Hal yang tidak ditemui ditempat lain adalah adanya SOP Marketing yang setiap awal tahun dibuat oleh BPRS Amanah Sejahtera.

Pelaksanaan profesionalisme dan integritas pejabat pembiayaan dilaksanakan dengan memo internal yang memastikan karyawan menjalankan tugas tanpa menerima fee/imbalan dari nasabah yaitu BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, menggunakan komitmen integritas (BPRS Unawi Barokah) dan menggunakan kode etik bankir (BPRS Jabal Nur). Sebagaimana dalam pedoman kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan setidaknya

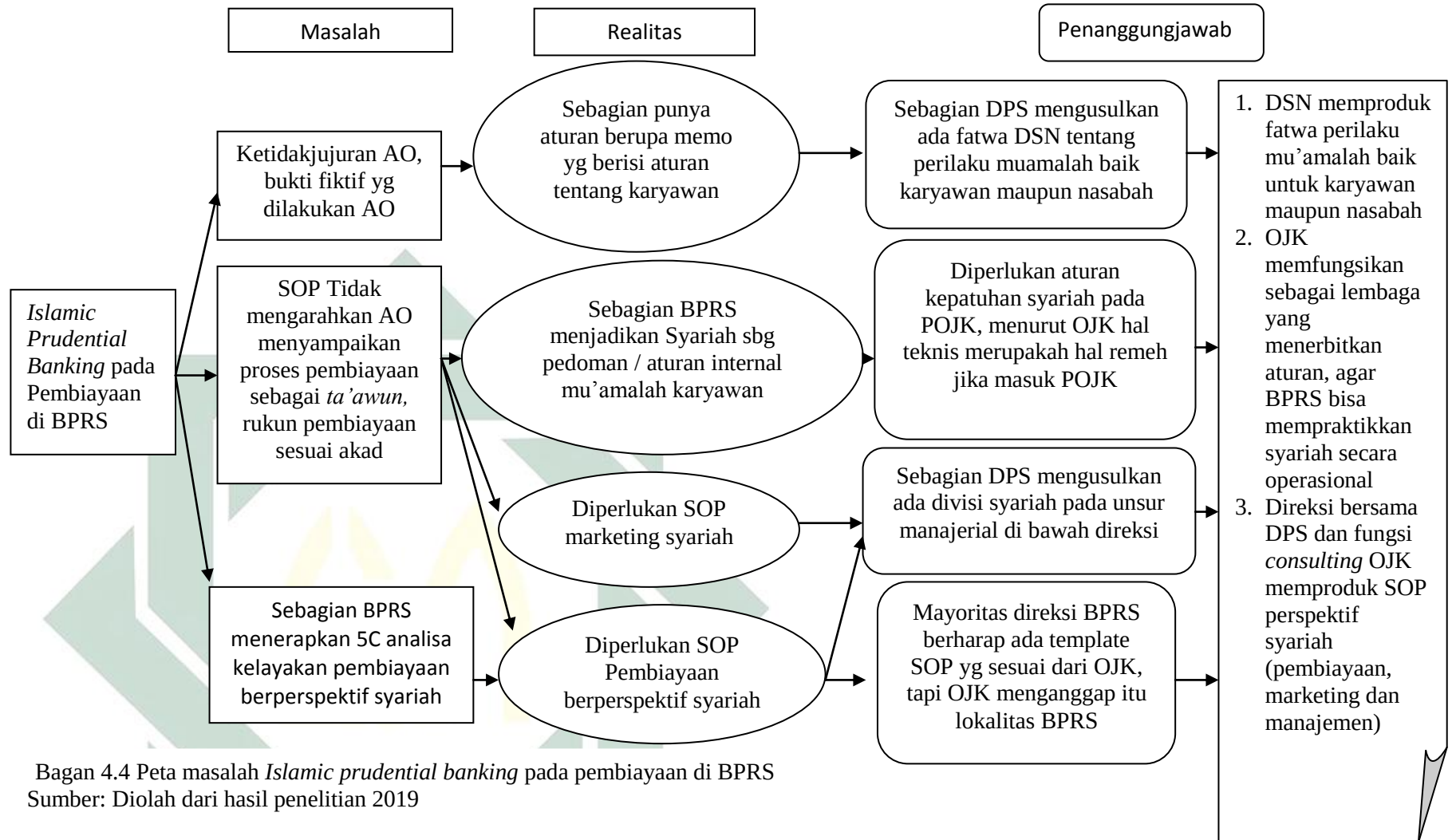
⁸² POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola BPRS dimana tata kelola yang baik diwujudkan dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Komisaris, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung DPS, Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite, Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan BPRS, Penanganan Benturan Kepentingan, Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Ekstern, Penerapan Manajemen Risiko Termasuk System Pengendalian Intern, Batas Maksimum Penyaluran Dana, Rencana Bisnis BPRS, Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,

Islamic prudential banking memastikan bahwa syariah dijadikan acuan di dalam setiap kehati-hatian yang dilaksanakan, baik menyangkut aturan OJK, fatwa DSN. Aturan internal menerjemahkan aturan OJK, BI dan DSN, termuat dalam kebijakan dan SOP pembiayaan serta akad pembiayaan. Kebijakan pembiayaan perlu memasukkan unsur halal yaitu syarat rukun pembiayaan pada prosedur dan kewenangan perkreditan bersifat umum.⁸³ Pembiayaan pada BPRS memiliki karakteristik sebagaimana dalam skim akad sehingga mampu menjawab persaingan bisnis dari risiko yang dihadapi.⁸⁴

⁸³ Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, lampiran SE BI Nomor 14/26/DKBU Tanggal 19 September 2012

[illegible]

PETA MASALAH ISLAMIC PRUDENTIAL BANKING PADA PEMBIAYAAN DI BPRS



Bagan 4.4 Peta masalah *Islamic prudential banking* pada pembiayaan di BPRS
 Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2019

⁹¹Lahsasna, *Shari Ah Non-Compliance Risk Management and Legal Documentations in Islamic Finance*, 86–99.

yang sesuai syariah sehingga sering kali hasil kajian tersebut mengeluarkan opini yang harus ditindaklanjuti oleh direksi. Hal ini hanya terjadi pada BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya (KMS). Sementara pada BPRS yang lain fungsi DPS semata-mata menjalankan aturan dalam pengawasan yang dilaksanakan secara sampling, minimal 3 sampling transaksi pembiayaan, dan pemberian saran serta opini jika diminta oleh manajerial. Sedangkan opini secara umum diberikan hanya pada produk baru, sehingga jika tidak ada produk baru, opini nyaris tidak ada. Sementara pada BPRS KMS opini tidak hanya menyangkut produk baru, melainkan setiap operasional yang menyangkut syariah baik itu terkait SDM, penggajian karyawan, hingga teknik komunikasi karyawan menjadi opini yang dikeluarkan DPS.

Islamic prudential banking pada pembiayaan di BPRS Surabaya, Sidoarjo dan Gresik menyalurkan pembiayaan dengan memperhatikan pendekatan dalam *Character, Collateral, Capacity, Capital and Condition of economic* (5C). Lima C (5C) yang diterapkan pada BPRS tersebut berbeda antara syariah dengan konven adalah mayoritas BPRS memastikan bahwa produk yang didanai, adalah produk yang halal, menerapkan akad kerjasama langsung kepada pembelian barang sejenis misal motor, mobil, rumah dll, kerjasama langsung dengan pihak dealer dan supplier. Sedangkan untuk pembiayaan kebutuhan seperti toko kelontong nasabah pasar, bahan bangunan, dimana jenis barang beragam belum dilakukan kerjasama dengan supplier.

Islamic prudential banking juga dipastikan dalam bentuk akad pada produk pembiayaan BPRS dengan mendasarkan fatwa Dewan Syariah

Terkait akad pembiayaan *murabahah*, ditemukan di BPRS Mandiri Mitra Sukses hanya membunyikan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana sejumlah nominal uang, dan menentukan margin pembiayaan. Hal ini dapat dipahami bahwa pembiayaan sebatas penyaluran dana, padahal seharusnya jika itu pembiayaan *murabahah*, maka dipastikan bahwa bank melakukan penyaluran dana seharga nominal barang (nama barang) yang dijual kepada nasabah sebagai pembiayaan, dan selanjutnya nasabah berkewajiban memberikan margin atas pembiayaan jual beli barang (nama barang) senilai (nilai nominal) rupiah sesuai kesepakatan bank dengan nasabah.

[illegible]

Menurut Ismail⁹⁷, Williams⁹⁸ jika BPRS membutuhkan peran pemerintah yaitu OJK dan DPS untuk menjembatani agar template SOP yang sesuai syariah⁹⁹ yang memiliki kemampuan syariah, maka peran ini akan memberikan solusi atas kesulitan yang dihadapi oleh BPRS. Selbihnya masing-masing BPRS akan menyesuaikan template SOP maupun akad sesuai dengan lokalitas masing-masing. Yang pasti secara legal, bahwa kedua alat ini tidak mengandung kesalahan hukum di kemudian hari jika BPRS bersangkutan dengan tuntutan nasabah hingga sampai pengadilan. Hal ini menurut Acharya¹⁰⁰ bagian dari strategi pemerintah dalam mengamankan uang nasabah, menjembatani masyarakat yang berharap syariah terpenuhi di dalam transaksi

¹⁰⁰ Acharya, "Adapting Micro Prudential Regulation for Emerging Markets." ...

Menurut DPS Bakti Makmur indah diperlukan fatwa DSN terkait perilaku di dalam bertransaksi di dalam bank syariah dengan harapan setiap orang bertransaksi mengikuti fatwa, dan mengikuti kaidah produk sesuai fatwa DSN agar syariah bisa diterapkan secara menyeluruh. Menurut Ismail hal ini penting sebagai acuan bagi lembaga di bawahnya untuk dijadikan dasar acuan dalam menuangkan dalam POJK maupun SOP bagi setiap lembaga.¹⁰³ Ide yang

¹⁰³Ibid.,

Jaminan syariah terlaksana dalam pembiayaan pada BPRS mayoritas melekat pada bagian operasional. Pada BPRS KMS, kepastian atas syariah menjadi tugas bagian legal. Memastikan tanda tangan dan kelengkapan sesuai dengan syariah atau belum. Mayoritas BPRS belum memiliki direktur kepatuhan dalam BPRS, sebagian kecil yang ada adalah divisi manajemen risiko dan kepatuhan (MRK) yaitu di BPRS Amanah Sejahtera. MRK berfungsi memastikan pemenuhan syariah pada setiap transaksi pembiayaan. namun demikian fungsi MRK ini hanya memberikan pendapat, tidak

¹⁰⁵ Adi Sucipto, Pengawas BPRS, OJK Wilayah 4 Surabaya, *Wawancara*, 4 April 2019

¹⁰⁶ POJK No 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

[illegible]

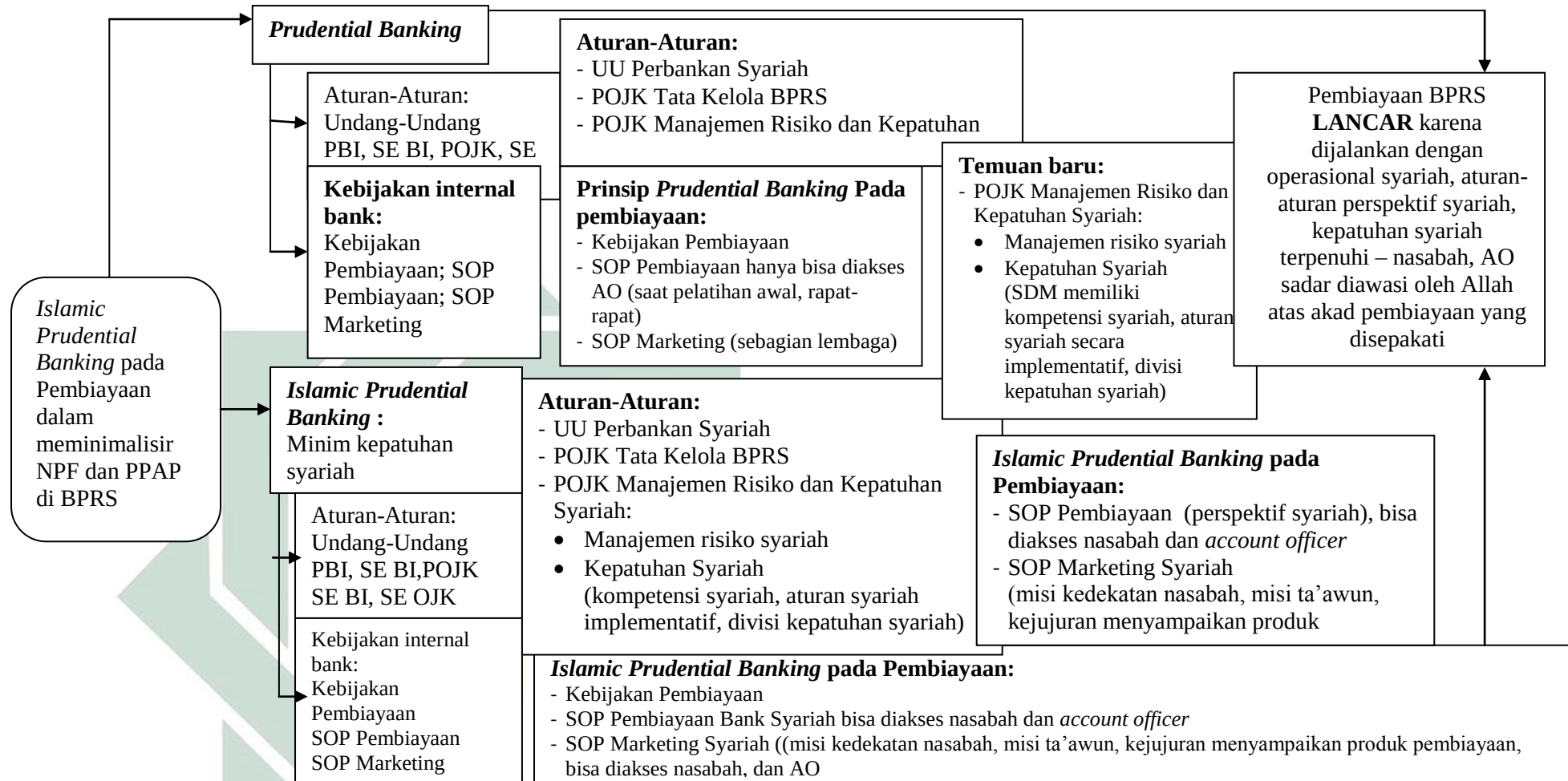
bahwa syariah harus menjadi prinsip dan tertuang secara teknis pada aturan yang lebih operasional.

Menurut DPS Bakti Makmur Indah, DPS tidak memastikan secara operasional sampai ke AO apakah praktik pembiayaan sesuai syariah atau tidak, tidak memastikan apakah dalam praktiknya yang jalan *wakālah* dulu kemudian akad pembiayaan. Begitu juga menurut DPS Unawi Barokah, DPS Mandiri Mitra Sukses, bahwa untuk pembiayaan seperti bahan bangunan, tidak langsung dibelikan, kwitansi tidak langsung diminta, dan terkadang diminta tetapi tidak langsung diberikan sehingga lupa, itu yang sulit dalam *murabahah wakālah* dalam bangunan. Menurut Komisaris BPRS Bakti Makmur, Syariah akan muncul pada pembahasan saat rapat dengan komisaris. Kondisi yang beragam ini, jaminan syariah terlaksana bervariasi, dan karenanya diperlukan adanya pejabat yang bertanggungjawab memantau operasional BPRS dijalankan sesuai prinsip syariah.

Usulan adanya petugas sendiri yang menangani syariah pada operasional BPRS, baik berupa direktur kepatuhan atau direktur kepatuhan syariah maupun petugas yang ditugaskan menangani khusus syariah yang bersifat independen dalam melaksanakan syariah secara operasional muncul dari DPS Jabal Nur, DPS Bakti Makmur Indah, DPS Mandiri Mitra Sukses. Hal ini akan semakin menjamin bahwa syariah akan betul-betul diterapkan pada operasional BPRS. Menurut Sucipto, bahwa aturan kepatuhan pada dasarnya sudah tersedia dalam POJK tentang manajemen risiko dan kepatuhan,

namun pada pelaksanaanya diserahkan pada BPRS masing-masing atas kemampuan yang dimiliki. OJK tidak bisa memaksa BPRS terkait hal demikian.¹⁰⁸

FORMULASI TEMUAN ISLAMIC PRUDENTIAL BANKING PADA PEMBIAYAAN



Bagan 4.6 Formulasi temuan Bangunan *Islamic Prudential Banking* pada Pembiayaan dalam Meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS
Sumber: diolah dari hasil penelitian 2019

Proposisi Minor fokus kedua dalam penelitian ini adalah “bila *Islamic prudential banking* dimiliki oleh BPRS, maka kondisi perbankan syariah akan semakin baik, NPF dan PPAP dapat diminimalisir”.

Berdasarkan proposisi minor kedua fokus di atas maka dapat dimunculkan proposisi mayor sebagai berikut; “bila *Islamic prudential banking* pada pembiayaan di BPRS dimiliki dan diterapkan secara operasional oleh BPRS, maka berguna untuk meminimalisir NPF dan PPAP”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seluruh proses penelitian mulai dari paparan data, hasil penelitian dan pembahasan, *Islamic prudential banking* pada pembiayaan dalam meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS dapat disimpulkan:

1. Strategi pengelolaan NPF untuk meminimisir PPAP dilakukan secara preventif dan korektif. Secara preventif dilakukan dengan memastikan setiap aturan diterapkan, dan diperbarui setiap saat jika memberi celah pembiayaan bermasalah, studi analisa pembiayaan 5 C ditekankan, peningkatan kapasitas bagi AO, peningkatan kesejahteraan bagi AO, evaluasi bagi perjalanan AO dan memanfaatkan peran teknologi untuk memperlancar AO bertemu nasabah. Secara korektif, pentingnya monitoring dan menjalin kedekatan dengan nasabah pasca pencairan dilaksanakan, penagihan terus menerus jika pembiayaan sudah bermasalah, melakukan *rescheduling*, *reconditioning* bagi pembiayaan bermasalah serta melakukan lelang jaminan jika sudah mencapai klimaknya. NPF yang berkepanjangan dilakukan *Write Off* sebagai solusi untuk membebaskan lembaga dari status pembiayaan bermasalah dan bagian niat ibadah bank untuk membebaskan nasabah dari status *qharīm*.

2. *Islamic prudential banking* pada pembiayaan dalam meminimalisir NPF dan PPAP antara lain dilakukan dengan mendasarkan pembiayaan pada aturan eksternal berupa regulasi yang dikeluarkan OJK dan Bank Indonesia dengan memastikan syariah sebagai dasar, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, aturan internal berupa kebijakan pembiayaan dan SOP Pembiayaan perspektif syariah. SOP pada dasarnya sebagai pengarah terhadap layanan, maka SOP pembiayaan harus bisa diakses baik oleh nasabah, AO maupun pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan dan SOP pembiayaan dalam perspektif syariah dijalankan dengan memastikan unsur halal, produk syariah sesuai syarat dan rukun pada skema pembiayaan, pemahaman dan kompetensi SDM terhadap syariah,

B. Implikasi Teoritik

Temuan dalam disertasi ini menambah proposisi baru yaitu bila *Islamic prudential banking* pada pembiayaan dimiliki dan diterapkan oleh BPRS, maka akan dapat meminimalisir NPF dan PPAP. Diantara muatan *Islamic prudential banking* pada pembiayaan antara lain; SOP pembiayaan dalam perspektif syariah, analisa pembiayaan 5 C berbasis syariah, harapan terbentuknya aturan fungsi kepatuhan syariah yang membahas syariah secara spesifik syariah, dituangkannya divisi syariah sehingga mudah untuk diimplementasikan dan ditindaklanjuti oleh BPRS, harapan munculnya SOP marketing syariah, SOP manajemen syariah. Terwujudnya direktur kepatuhan/satuan kerja kepatuhan yang faham terhadap syariah, adanya divisi syariah yang benar-benar memastikan secara teknis seluruh pembiayaan (input, proses dan *output*) adalah

Upaya memastikan syariah terlaksana pada pembiayaan di BPRS, tidak hanya memastikan produk, melainkan proses operasional dijalankan dalam perspektif syariah, maka beberapa rekomendasi berikut penulis ajukan:

- [illegible]

Penelitian ini hanya mampu menjawab 2 identifikasi masalah yaitu pembiayaan bermasalah, dan *islamic prudential banking* pada pembiayaan. Penelitian ini juga dibatasi pada 3 wilayah besar di Jawa Timur yang mewakili dari kota ekonomi dan penyangga perekonomian Jawa Timur. Oleh karenanya perlu dilakukan penelitian oleh peneliti selanjutnya terkait *Islamic prudential banking* dalam operasional bank syariah (*funding*) dan operasional secara umum, sehingga lebih menguatkan bahwa bank syariah penting memiliki *Islamic prudential banking* pada operasional secara keseluruhan.

Sevara. “Prudential Bank Solvency Framework and Stress Test for Transition in Uzbekistan”, *Research and Accounting*, Vol 6, No. 16, 2015.

Mulazeem. “The Internal Challenges Facing Islamic Banking”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance*, Vol 9, No. 2, 2016. Accessed December 2017. www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IMEFM-05-2016-0010

Al-Farooq V. “Adapting Micro Prudential Regulation to Islamic Banking”, In *Dealing with the Challenges of Macro Financial Markets*, edited by Otaviano Canuto and Swati G. Ghosh. n.d. Accessed December 2017. library.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-1-4648-0610-0

Al-Farooq V. “Toward Advancing Debates on Islamic Market Development”, *Journal of Islamic Marketing*, Vol 9, No. 1, 2018.

Al-Farooq V. and Syed Aun R. Rizvi, eds. *Islamic Banking Growth and Challenges*. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2017.

- Sevara. “Prudential Bank Solvency Framework and Stress Test for Transition in Uzbekistan”, *Research and Accounting*, Vol 6, No. 16, 2015.
- Mulazeem. “The Internal Challenges Facing Islamic Banking”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance*, Vol 9, No. 2, 2016. Accessed December 2017. www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IMEFM-05-2016-0010
- Al-Farooq V. “Adapting Micro Prudential Regulation to Islamic Banking”, In *Dealing with the Challenges of Macro Financial Markets*, edited by Otaviano Canuto and Swati G. Ghosh. n.d. Accessed December 2017. library.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-1-4648-0610-0
- Al-Farooq V. “Toward Advancing Debates on Islamic Market Development”, *Journal of Islamic Marketing*, Vol 9, No. 1, 2018.
- Al-Farooq V. and Syed Aun R. Rizvi, eds. *Islamic Banking Growth and Challenges*. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2017.

- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah : Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara*. 2006: Bank Indonesia, 2006.
- Ashraf, Samreen, Julie Robson, and Yasmin Sekhon. "Consumer Trust and Confidence in the Compliance of Islamic Banks", *Journal of Financial Services Marketing*, Vol 20, No. 2, June, 2015.
- Asih, Hayati Mukti, and Syifa Fitriani. "Penyusunan Standard Operating Prosedure Produksi Inovasi Ecobrik", *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, Vol 17, No. 2, December, 2018.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: Kalimedia, 2019.
- ‘Asqalānī(al), Ahmad b. ‘Alī b. Ḥajr. *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986.
- Atkinson, John. "Four Steps to Analyse Data from a Case Study Method." ACIS 2002 Proceedings, 2002.
- Banks, Erik. *Liquidity Risk: Managing Asset and Funding Risks*. Finance and capital markets. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Barus, Elida Elfi. "Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 2, No. 1, 2017.
- Bekker, et al., ed. *Monetary Stability Through International Cooperation*. Springer, 1994.
- Bidabad, Bijan, and Mahmoud Allahyarifard. "Assets and Liabilities Management in Islamic Banking", In *International Conference on Islamic Banking and Finance*, Karachi, Pakistan, 2008.
- Bowie, Norman. *Business Ethics in the 21st Century*. Vol. 39. Issues in Business Ethics. Dordrecht: Springer Netherlands, 2013. Accessed November 11, 2019. <http://link.springer.com/10.1007/978-94-007-6223-7>.
- Bukhārī (al), Muḥammad b. Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Pada Kitab Fatḥ al-Bārī*. Vol. 4. Hadis No. 4711 vols. Bairut: Dār Ibn Kathīr, 1993.
- Chattha, Jamshaid Anwar, and Syed Musa Syed Jaafar Alhabshi. "Risk Management in Changing Benchmark Rates Regime Prudential Implications for Islamic Banks and Supervisors", *Journal of Islamic Finance*, 2017.
- Chorafas, Dimitris N. *Liabilities, Liquidity, and Cash Management: Balancing Financial Risks*. New York: John Wiley & Sons, 2002.

- Choudhry, Moorad. *An Introduction to Banking: Liquidity Risk and Asset Liability Management*. 1st ed. United Kingdom: John Wiley & Sons, 2011.
- Connelly, Brian L., S. Trevis Certo, R. Duane Ireland, and Christopher R. Reutzel. "Signaling Theory: A Review and Assessment", *Journal of Management*, Vol 37, No. 1, 2011.
- Creswell, John W. *Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches*. New Delhi: Sage Publication Ltd, 2009.
- Daly, Saïda, and Mohamed Frikha. "Islamic Finance: Basic Principles and Contributions in Financing Economic", *Journal of the Knowledge Economy* Vol 7, 2016.
- Dent, Michael, Edward Wong Sek Khin, and Mohd Nazari Bin Ismail. "Critical and Interpretive Social Science Theory: A Case Study Approach", *Actual Problems of Economics*, 2013.
- D'Hulster, Katia, and Fernando Montes-Negret. *Micro-Prudential Supervision*: World Bank Group, 2015.
- El-Tiby, Amr Mohamed. *Islamic Banking; How to Manage Risk and Improve Profitability*. New Jersey: John Wiley and Sons, 2011.
- Fischer, Mario. "The Source of Financing in Mergers and Acquisitions", *The Quarterly Review of Economics and Finance*, August, 2017. Accessed December 4, 2018. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1062976917300078>.
- Glaser, Barney G., and Anselm L. Strauss. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. USA: Aldine Transaction, 2009.
- Gregoriou, Greg N., and Christian Hoppe, eds. *The Handbook of Credit Portfolio Management*. USA: McGraw Hill, 2009.
- Greuning, Hennie Van, and Zamir Iqbal. *Risk Analysis For Islamic Banks*. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development, 2008.
- Hafnida, Selamah Maamor, and Hussin Abdullah. "Islamic Financing Towards Economic Growth: A Study on 4 OIC Countries", *IJIB*, Vol 1, No. 1, June, 2016.
- Ḥanafy (al), Abd Allāh b. Maḥmūd b. Mawdūd al-Mawṣūly. *Al-Ikhtiyār Lita'īl al-Mukhtār*. Vol. 3. Dār al-Khayr.

- Haryono, Yono, Noraini Mohd. Ariffin, and Musthapa Hamat. "Factors Affecting Credit Risk in Indonesian Islamic Banks", *Journal of Islamic Finance*, Vol 5, No. 1, 2016.
- Hassan, M. Kabir, and Issouf Soumaré. "Guarantees and Profit-Sharing Contracts in Project Financing", *Journal of Business Ethics*, Vol 130, No. 1, August, 2015.
- Hermanto, Bambang. "The Role of DSN-MUI to Ensure Shariah Compliance of Islamic Financial Transactions in Indonesia (A Political Ambiguity Perspective)", *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol 6, No. 1, 2018.
- Hermawan A.N., Hendri. "Sumber dan Penggunaan Dana Qarḍ dan Qarḍul Hasan pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta", *La_Riba*, Vol 2, No. 2 (December 2008).
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Supervisi Audit Intern Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- . *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ilin, Thomas. "The Functional Integration of Operations Management in Banks", *The IUP Journal of Operations Management*, Vol 14, No. 2, 2015.
- Iman, Amalia Nurul, and Adityawarman. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 4, No. 3, 2015.
- Indonesia, Bank, Direktorat Perbankan Syariah. *Model Bisnis Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2012.
- Jan, Muhammad Tahir. "Will It Survive? Challenges Faced by Islamic Banking and Finance in Today's World", *Journal of Islamic Finance*, Vol 7, No. 1, 2018.
- Jin-min, Wang, and SHI Jin - Chu. "On the Prudential Regulation of Banks Theories, Institutions And Trends", *Journal of Zhejiang University (SCIENCE)*, Vol 2, No. 4, 2001.
- Kabir, Md. Nurul, Andrew Worthington, and Rakesh Gupta. "Comparative Credit Risk in Islamic and Conventional Bank", *Pacific-Basin Finance Journal*, 2015. Accessed December 7, 2018. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0927538X1500075X>.

Najmaei, Mehran, Shaheen Mansoori, Zukarnain Zakaria, and Markus Raueiser. "Marketing from Islamic Perspective, Tapping into the Halal Market", *Journal of Marketing Management and Consumer Behavior*, Vol 1, No. 5, 2017.

Nicolò, Gianni De, Andrea Gamba, and Marcella Lucchetta. “Microprudential Regulation in a Dynamic Model of Banking”, *Review of Financial Studies*, (April 2014). Accessed December 7, 2018. <https://academic.oup.com/rfs/article-lookup/doi/10.1093/rfs/hhu022>.

Oz, Erdem, Mohammad Mahbubi Ali, and Dr Romzie Rosman. *Shari'Ah Non-Compliance Risk in the Banking Sector: Impact on Capital Adequacy Framework Of Islamic Banks*. Islamic Financial Services Board (IFSB) and International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), March 2016.

Polizatto, Vincent P. *Prudential Regulation and Banking Supervision*. New York: The World Bank, 1990.

Rahmawaty, Anita, and Wahibur Rokhman. "The Role of Sharia Marketing in Increasing Customer Loyalty (An Empirical Study of BMT in Kudus Regency)", *Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 11, No. 2, 2018.

[illegible]

- Financial Institution Management Conventional & Sharia System*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Saleh, Mohammad, Agung Budi Sulisty, Nur Hisamuddin, and Ahmad Roziq. "Profit And Loss Sharing System and Profitability of Islamic Rural Bank in East Jawa Indonesia", *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, Vol 5, No. 9, 2018.
- Salem, Rania Abdelfattah. *Risk Management for Islamic Banks*. Edinburgh University: Edinburgh University Press, 2013.
- Sena, Vania. *Credit and Collateral*. New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2008.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Issues in Islamic Banking*. Leicester: The Islamic Foundation, 1994.
- Singh, Dalvinder. *Banking Regulation of UK and US Financial Markets*. England: Ashgate Publishing, 2007.
- Smith, Katherine A. "What Can Islamic Financing Tell Us About Macro-Prudential Policies?", *Applied Economics Letters*, 2018.
- Sochih, Moh. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau Dari Camel (Capital, Asset Quality, Management, Earning, And Liquidity) Untuk Mengukur Keberhasilan Manajemen Pada PT BPRS Margirizki , Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (Studi Kasus Pada PT BPRS Margi Rizki Bahagia)", *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Vol 6, No. 2, 2008.
- Toutounchian, Iraj. *Islamic Money and Banking Integrating Money in Capital Theory*. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Ltd, 2009.
- Trad, Naama, Mohamed Ali Trabelsi, and Jean François Goux. "Risk and Profitability of Islamic Banks: A Religious Deception or an Alternative Solution?", *European Research on Management and Business Economics*, 2016. Accessed December 7, 2018. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2444883416300274>.
- Ullah, Hafij. "Shari'ah Compliance in Islamic Banking: An Empirical Study on Selected Islamic Banks in Bangladesh", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol 7, No. 2, 2014.
- Ullah, Shakir, Ian A. Harwood, and Dima Jamali. "Fatwa Repositioning': The Hidden Struggle for Shari'a Compliance Within Islamic Financial Institutions", *Journal of Business Ethics*, 2016. Accessed December 6, 2018. <http://link.springer.com/10.1007/s10551-016-3090-1>.

- re: World Scientific, 2006.
- D. “Stricter Microprudential Supervision Versus Systemic Risk”, *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Vol 14, No 1, 2006.
- off. “Doing Interpretive Research”, *European Journal of the History of Economic Thought*, Vol 15, June, 2006.
- ja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia, 2012.
- ul J. J. “Banking Crisis and Prudential Supervision: A Review.” *International Economics and Economic Policy*, Vol 1, No 1, 2004.
- arry. “Bank Risk and National Governance in Asia”, *Journal of Banking & Finance*, Vol 49, 2014.
- ., Mohd. Isa, Md. Zabid, and Abdul Rashid. “Regulatory Capital and Risk-Sharing Behavior in Distressed Financial Institutions: An Empirical Analysis on Islamic Banks in Malaysia”, *Journal of Accounting and Accounting*, 2018. Accessed December 2019. www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JFRA-06-2015-0015

re: World Scientific, 2006.

D. “Stricter Microprudential Supervision Versus Systemic Risk”, *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Vol 14, No 4, 2006.

off. “Doing Interpretive Research”, *European Journal of the History of Economic Thought*, Vol 15, June, 2006.

ja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia, 2012.

ul J. J. “Banking Crisis and Prudential Supervision: A Review.” *International Economics and Economic Policy*, Vol 1, No 1, 2004.

arry. “Bank Risk and National Governance in Asia”, *Journal of Banking & Finance*, Vol 49, 2014.

., Mohd. Isa, Md. Zabid, and Abdul Rashid. “Regulatory Capital and Risk-Sharing Behavior in Distressed Financial Institutions: An Empirical Analysis on Islamic Banks in Malaysia”, *Journal of Accounting and Accounting*, 2018. Accessed December 2019. www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JFRA-06-2015-0030

re: World Scientific, 2006.

D. “Stricter Microprudential Supervision Versus Systemic Risk”, *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Vol 14, No 4, 2006.

off. “Doing Interpretive Research”, *European Journal of the History of Economic Thought*, Vol 15, June, 2006.

ja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia, 2012.

ul J. J. “Banking Crisis and Prudential Supervision: A Review.” *International Economics and Economic Policy*, Vol 1, No 1, 2004.

arry. “Bank Risk and National Governance in Asia”, *Journal of Banking & Finance*, Vol 49, 2014.

., Mohd. Isa, Md. Zabid, and Abdul Rashid. “Regulatory Capital and Risk-Sharing Behavior in Distressed Financial Institutions: An Empirical Analysis on Islamic Banks in Malaysia”, *Journal of Accounting and Accounting*, 2018. Accessed December 2019. www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JFRA-06-2015-0040

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter
Syariah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/43/DPM Tertanggal 16

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 46/SEOJK.03/2016

POJK No 23/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah

POJK No 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

POJK No 24/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah

POJK No 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

POJK No 66/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

POJK No 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

POJK Nomor 24/POJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

POJK Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

POJK Nomor 42/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bank Umum

POJK Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

POJK Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

POJK Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

POJK Nomor 66/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPRS

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPbS Tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS Tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Surat Edaran Bank Indonesia No 14/26/DKBU Tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Bank Pembiayaan Rakyat, Tanggal 19 September 2012

Surat Edaran Bank Indonesia No 15/22/DPbS kepada semua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Surat Edaran OJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2017

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2015

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

LAPORAN PUBLIKASI

Laporan Publikasi Triwulan BPRS Karya Mugi Sentosa, di akses melalui <http://ojk.go.id>

Laporan Publikasi Triwulan BPRS, di akses melalui <http://ojk.go.id>

Statistik Perbankan Syariah Desember 2017